

Saatnya Korban Bicara: “Menata Derap Merajut Langkah”



2009

PENGANTAR

SUBVERSI NARATIF KAUM KORBAN-PENYINTAS

Oleh :

I.Sandyawan Sumardi

Monumen Korban

Beberapa sosok manusia tengah bergerak pelan, gemetar dalam kelam. Seorang perempuan, seorang ibu tengah merangkul, merengkuh beberapa manusia korban sekaligus dalam pelukannya, sambil berlutut bersama. Wajah sang bunda tengadah ke atas. Teriaknya berpendar-pendar tanpa suara, matanya menerawang jauh. Rupanya tengah dibisikkan sebuah doa manusia pada situasi batas daya kemampuan hidupnya. Doa sunyi dari para korban tragedi kekerasan politik di negeri ini. Doa seorang anak, seorang mahasiswa, seorang petani, seorang warga miskin urban dan seorang perempuan muda yang tengah mendekap seorang bayi mungil. Sosok-sosok manusia yang sengaja dibuat dalam posisi bertekuk-lutut dengan kepala tertunduk lemah, untuk menggambarkan posisi yang dikenal sebagai simbol *gesture* dari orang yang teraniaya, tidak berdaya dan diancam untuk ditaklukkan.

Kembali pada figur di belakang: seorang ibu dengan ekspresi wajah berduka, dan *gesture* tangan yang merangkul dengan kepala yang mendongak ke atas berteriak, merupakan pernyataan simbolik yang kuat dari sebuah perlawanan moral terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sang bunda berteriak kepada dunia untuk menghentikan segala bentuk pengrusakan lingkungan hidup warga bumi Indonesia. Sebuah teriakan protes panjang tanpa suara kepada segala jenis kekuasaan yang memproduksi berbagai bentuk kekerasan politik di Indonesia dan

di manapun juga. Dengan sengaja dihadirkan citra ibu sebagai simbol *mother nature* yang selalu memberi perlindungan. Ibu negeri yang senantiasa membela tanah tumpah darah serta anak-anaknya yang menjadi korban ketidakadilan. Inilah simbol kaum *survivors*, kaum penyintas!

Itulah konsep ekspresi yang tertuang dalam rencana pendirian “Monumen Korban Tragedi Kekerasan Politik Indonesia 1965-2000” (MKTKPI 1965-2000), yang pernah digagas dan diusulkan kepada Pemerintahan RI (pemerintahan Abdurrahman Wahid – Megawati) di awal tahun 2000, oleh Paguyuban Keluarga Korban Tragedi Kekerasan Politik di Jakarta dan TRK (Tim Relawan untuk kemanusiaan), bersekutu dengan komunitas-komunitas basis masyarakat korban kekerasan politik dari berbagai daerah lain di negeri ini (Aceh, Papua, Timor Leste, Ambon, dll.). MKTKPI 1965-2000 yang diusulkan itu rencananya terletak di lokasi 1000 m² di Taman Monas, persis di depan dan menghadap ke Istana Negara RI di pusat Ibu Kota, di DKI Jakarta. Bahkan konsep ekspresi itu telah selesai dibuat miniaturnya oleh ibu Dolorosa, pematung terkemuka di negeri ini, yang rencananya akan terlibat penuh sebagai koordinator senimannya (dibantu seorang arsitek dan *landscape planner*). Bahan/material yang dipilih adalah perunggu, dengan teknik *lost wax* dan las *acetylene*. Tinggi monumen diperkirakan 8 meter dan lebar 12 meter. Konsep presentasi monumen dibuat dengan *base* sangat rendah (hanya 1 meter) sehingga kehadiran monumen ini terasa dekat dengan para pemirsanya.

MKTKPI 1965-2000 merupakan monumen “*memoria passionis*” (kenangan duka yang menggugat) bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat menggoreskan imperatif moral yang kuat dalam ingatan sejarah peradaban bangsa kita kini dan di masa mendatang, bahwa telah terjadi rangkaian pelanggaran hak-hak asasi manusia di negeri ini dalam bentuk kekerasan politik

negara secara massal dan sistematik. Kekerasan politik yang telah menjatuhkan ribuan masyarakat sebagai korban yang disiksa, dianiaya, diculik dan dihilangkan jati dirinya serta dibunuh. Kekerasan politik yang terjadi sejak tragedi pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa G30S/PKI, hingga tragedi-tragedi kekerasan politik yang terjadi ketika itu, di berbagai kota dan daerah di negeri kita, terutama yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, seperti tragedi Mei 1998 dan tragedi Semanggi I dan II.

MKTKPI 1965-2000 adalah simbol dan ungkapan gerakan moral-spiritual masyarakat korban yang ingin mengartikulasikan semangat rekonsiliasi bangsa. Rekonsiliasi merupakan proses berdimensi ganda, yakni berujud penyembuhan luka-luka yang diakibatkan oleh pelanggaran berat HAM dalam masyarakat, dan diadilinya para penanggungjawab pelanggaran HAM itu. Dengan demikian, melalui pembentukan Komisi Kebenaran, Komisi Amnesti dan Komisi Restorasi/Reparasi (belajar dari pengalaman rekonsiliasi Afrika Selatan) masyarakat, khususnya masyarakat korban dapat merasakan dan mengalami keadilan restoratif secara nyata, dan perasaan dendam dapat dinetralisir, dijernihkan menjadi energi kekuatan moral yang konstruktif bagi kebangkitan negara-bangsa di masa depan.

MKTKPI 1965-2000 dapat difahami sebagai ungkapan kerinduan kolektif masyarakat korban kekerasan politik dan gerakan-gerakan prodemokrasi di negeri ini yang tengah memprioritaskan diri pada usaha mendokumentasikan dan menyelidiki pola-pola pelanggaran HAM di masa lampau, dan menghasilkan rekomendasi mengenai cara-cara untuk mencegah praktek-praktek yang sama di masa yang akan datang. Maka yang menjadi medan perhatian penyelenggaraan MKKP ini cukup luas, tidak hanya menoleh ke belakang, yang menyangkut masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pertanggungjawabannya, tetapi juga menatap ke depan, yang menyangkut tantangan atas

kemungkinan timbulnya konflik kekerasan politik sistematis yang baru di masa yang akan datang. Dengan didirikannya MKTKPI 1965-2000 di Jakarta ini, diharapkan masyarakat bangsa kita akan semakin dewasa dan kuat termotivasi untuk melacak kembali fakta sejarah kaum korban dalam proses investigasi, pelaksanaan keadilan dan rekonsiliasi sejati.

MKTKPI 1965-2000 dan gerakan-gerakan “*active non violence*” komunitas-komunitas basis yang akan menyelenggarakan dan memeliharanya, merupakan ikhtiar masyarakat sipil dalam melawan, mencatat, memahami, dan mencoba bangkit dari kebrutalan masa lalu nasional yang berupa jaman diktator atau kekerasan politik sistematis dan massal adalah suatu proses yang memakan waktu beberapa tahun, dasawarsa atau bahkan generasi.

Pembongkaran kenangan sejarah pelanggaran hak-hak asasi yang cenderung digelapkan melalui pendirian MKTKPI 1965-2000 ini, dapat mengingatkan dan meneguhkan kita secara terus-menerus dalam memulai sebuah proses reformasi yang serius: membantu pemulihan para korban, dan memperkuat beberapa bentuk pertanggungjawaban pemerintah lainnya, termasuk mengembalikan citra pemerintahan yang bersih dan berwibawa di mata masyarakat dalam dan luar negeri.

Diharapkan MKTKPI 1965-2000 dapat menyentuh emosi massa, terutama dengan bantuan manajemen publikasi yang efektif dan luas, sehingga dapat menjadi wacana yang intens serta meraih pengakuan masyarakat luas. MKTKPI 1965-2000 dapat membangkitkan intensitas baru untuk menyembuhkan luka derita masyarakat korban di masa lalu, pendamaian dengan pengakuan kesalahan, dan pembersihan kejahatan terkeji di mata publik melalui optik media cetak dan elektronik.

Maket MKTKPI 1965-2000 dengan skala 1:10 direncanakan akan diresmikan pada tanggal 31 Mei tahun 2000 oleh Bapak Presiden Abdurrahman Wahid (mewakili pihak pemerintah), Almarhumah Ibu Bagoes Gedong Oka, KH. Sahid Agil Siradj, Almarhum Pdt. Eka Darmaputra, Bhiku Pannyavaro Mahathera, Kard. J. Darmaatmadja, SJ (mewakili agama-agama dan aliran kepercayaan serta masyarakat umum), Bapak AM. Arief Priyadi (mewakili Paguyuban Keluarga Korban) dan Ibu Karlina Supelli (mewakili TRK). Peresmian ini juga menjadi peresmian awal pelaksanaan pembangunan MKTKPI 1965-2000. Pelaksanaan pembuatan MKTKPI 1965-2000 direncanakan sudah akan dimulai pada awal bulan Mei 2000 dan selesai pada akhir bulan April 2001.

Sayang sekali, rencana pendirian MKTKPI 1965-2000 yang secara informal pada waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden Abdurrahman Wahid, bahkan sudah ada beberapa pengusaha yang telah bersedia secara suka-rela menanggung semua biaya pembuatannya, akhirnya mengalami kemacetan, bahkan pembatalan. Justru setelah penulis yang kebetulan waktu itu bertindak sebagai inisiator dan ketua panitia rencana pendirian MKTKPI 1965-2000, mengirimkan surat permohonan ijin dan proposal resminya kepada Presiden Abdurrahman Wahid melalui Sekretaris Negara ketika itu, Bapak Bondan Gunawan, ternyata 2 minggu kemudian kami cukup terkejut, karena yang menjawab/membalas surat kami bukanlah Presiden melalui Sekretaris Negara, melainkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ketika itu, Bapak Letjend.(Purn.) TNI Soesilo Bambang Yoedhoyono. Singkat kata, rencana pendirian MKTKPI 1965-2000 tidak diijinkan dan dilarang untuk didirikan, karena dikhawatirkan akan mengancam stabilitas negara, mengancam persatuan dan persatuan nasional. Dan ironisnya, tiga hari sebelum Presiden Abdurrahman Wahid dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden, kami mendengar

secara langsung pengakuan beliau, bahwa beliau sama sekali belum pernah menerima dan membaca surat permohonan kami itu, apalagi menolaknya.

Bukankah kita pernah membaca, sebuah torehan peringatan, di bekas kamp konsentrasi pertama Hitler yang terletak di kota kecil Dachau, di negara bagian Bavaria, Jerman, pada monumen utama yang didirikan setelah perang dunia II, di mana tertulis “*Nie wieder*” (Jangan pernah terulang lagi)? Dan ungkapan persis seperti itu, kita tahu, juga terdapat dan bergaung terus-menerus dalam Monumen Peringatan Jatuhnya Bom Atom di Nagasaki dan Hiroshima di Jepang, juga dalam Moseum Holocaust di Washington DC, Amerika Serikat. Apa yang jangan terulang lagi? *Holocaust* –pembasmian manusia oleh manusia lain. Sebuah kata, yang ditulis dalam situasi normal, yaitu setelah tragedi kemanusiaan yang luar biasa menimpa bangsa Jerman. Namun ia juga bukan kata yang merupakan diskripsi atas normalitas faktual, melainkan sebuah ekspektasi tentang masa depan umat manusia. Di satu pihak disadari bahwa yang mengerikan telah lewat, namun di lain pihak juga tersirat bahwa bahaya semacam itu tak sepenuhnya lenyap dalam kehidupan manusia. Bukan hanya karena masa depan itu tak sepenuhnya dapat kita duga, melainkan juga karena masa silam itu senantiasa membekas. Dengan kata lain, “*Nie wieder*” (Jangan pernah terulang lagi) mengacu pada kenyataan bahwa manusia harus senantiasa bersedia hidup bersama dengan tragedi. Normalitas harus ditegakkan dengan terus-menerus menghalau ancaman kembalinya abnormalitas.

Perlu kita bedakan antara sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai bekas dalam kesadaran kolektif. Tragedi Mei 1998 rasanya tak mungkin terjadi sama persis di tahun 2009 ini, tetapi sejarahnya telah meninggalkan struktur dan pola tertentu. Pola itu adalah bekas dari luka-luka sejarah yang “diingat” melalui

pranata-pranata sosial-kultural, baik oleh para korban, maupun para pelaku pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa itu. Bekas itu masih dipersepsikan karena tertanam dalam ingatan kolektif. Dan karena menjadi bagian struktural dari ingatan kolektif, bekas itu masih menentukan perilaku aktual. Bekas torehan itu tak sepenuhnya dilepaskan, tapi juga tak sepenuhnya ditahan. Bekas itu ditafsirkan, yaitu dilupakan sekaligus diingat.

Memperjuangkan Makna Derita

Sampai detik ini, di negeri ini, korban jiwa masih saja terus Sberjatuhan akibat tindak kekerasan, pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM), baik oleh sesama warga maupun oleh aparat negara. Reformasi yang menjanjikan kehidupan bernegara dan bermasyarakat lebih baik, menjadi sebuah paradoks yang amat memilukan. Kekerasan dan korban memang seperti menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Selama ada hubungan kekuasaan yang dilandasi ketidakadilan (persekongkolan neo-kapitalisme brutal yang erat antara kekuasaan ekonomi bisnis/uang, kekuasaan birokrasi negara, kekuasaan militer/senjata, kekuasaan agama, kekuasaan teknologi, dlsb.), selama itulah korban ada. Hubungan kekuasaan merupakan kebutuhan manusia akan tatanan sosial, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Prasyaratnya adalah pengakuan bebas dari semua yang terlibat di dalam tatanan tempat kekuasaan itu berlaku. Dasar untuk pengakuan bebas adalah keadilan. Ketika pihak yang berkuasa menolak tuntutan keadilan, pengakuan berlangsung atas dasar paksaan atau kekerasan yang melahirkan penindasan dan korban-korbannya, baik korban kekerasan fisik maupun struktural. Kedua jenis kekerasan ini berbeda karakteristiknya namun secara hakiki sama-sama merupakan pelanggaran terhadap swa-ruang seseorang, atau ruang tempat seseorang hanya berhubungan dengan diri sendiri.

Kisah korban adalah kisah peradaban hidup manusia. Riwayat korban adalah kisah tentang manusia yang menderita, terdomestifikasi dan terasingkan. Di dalam peperangan paling besar sekalipun, korban adalah angka-angka yang menyumbang bagi kemenangan; atau bukti untuk kekalahan. Sebagian dari mereka bisa ditemukan sebagai nama di tugu peringatan atau foto-foto di museum. sebagian lagi mungkin tercantum di kuburan-kuburan massal yang tersebar di banyak negara. Selebihnya tinggal dalam ingatan para kerabat, yang tidak tercatat, atau dengan sengaja digeser dari sejarah dalam sebuah *conspiracy of silence* yang dibangun demi kepentingan kekuasaan. Mungkin juga akibat kejenghahan manusia meninggalkan rekaman atas kedurjanaannya sendiri, sehingga pengalaman akan kebengisan tidak diperbincangkan.

Di sini, dalam buku sederhana ini, para korban bertutur, berkisah tentang pengalaman hidup mereka sendiri. Kaum korban bercerita tentang tragedi hidup yang mereka alami sendiri, tergedi kekerasan politik negara. Inilah narasi kaum korban. Betapapun kita semua mahfum, tak ada perjalanan sejarah sebuah negara-bangsa yang tak lepas dari kekerasan.

Apakah penderitaan tak terperi dalam pengalaman tragedi-tragedi kemanusiaan itu memiliki makna? Bukankah penderitaan itu sebuah pengalaman negatif yang di dalamnya manusia berhadapan dengan kesewenangan nasib yang tanpa ampun dan oleh karenanya manusia kehilangan orientasi dan tujuan hidupnya? Bukankah penderitaan itu suatu pengalaman perbatasan? Pengalaman yang memudahkan warna-warni penghayatan hidup kita dan merenggut semangat hidup kita tanpa ampun? Adakah pengalaman penderitaan senantiasa merupakan pengalaman manusia kehilangan makna?

Manusia berbahagia dengan menemukan makna dalam setiap situasi hidupnya. Demi penemuan makna itulah, jika perlu,

manusia siap untuk menderita. Manusia memiliki kehendak-untuk-makna. Manusia tidak hanya lapar akan makanan, tapi juga lapar akan makna, makna yang difahami sebagai sesuatu yang obyektif, yakni bukan sebagai sesuatu yang dapat ia konstruksikan sendiri, melainkan sebagai sesuatu yang harus ditemukan atau dikenali. Dalam kehidupannya yang paling gelap sekalipun, pada dasarnya manusia tak kan menghentikan pencariannya akan makna.

Dalam pengalaman penderitaan para korban tragedi kekerasan politik, begitu banyak orang merasa hidupnya dinistakan. Bahkan para korban tragedi 1965, yang mengalami pengalaman penjara dan pengasingan puluhan tahun, kehidupan ini terasa diperversikan. Kehidupan dan kebutuhan hidup manusia diprimitifkan dan disimpan secara total. Rasa putus asa, kecemasan, rasa rendah diri, pikiran untuk bunuh diri, obsesi dan rasa panik. Semua afeksi destruktif ini dapat meremukkan manusia, bila tak ada sarana perlindungan di dalam jiwanya untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan gelap ini. Karena itu afeksi-afeksi destruktif berubah menjadi apati. Maka dari itu para penghuni penjara yang hidup dalam “sistem pelupaan” ini, cenderung menjadi otomat-otomat tanpa perasaan, menjadi manusia-manusia tanpa kedirian. Manusia yang acuh-tak-acuh sekaligus agresif di hadapan lingkungan social mereka. Penderitaan semacam itu, yang pada umumnya jauh lebih dalam daripada rasa sakit jasmaniah, merupakan pengalaman hilangnya kebebasan dan perendahan martabat manusia.

Adakah memang kehancuran jiwa dalam pengalaman penderitaan tak terperi korban-korban pelanggaran HAM itu sekedar merupakan pengalaman absurd, atau memiliki makna? Menurut Victor Frankl, dalam bukunya *Man's search for Meaning: An Introduction to Logotherapy* (Boston: Beacon Press, 1962), segala macam wujud penderitaan itu dapat ditemukan maknanya. Namun makna penderitaan itu tergantung pada sikap yang benar

terhadap penderitaan itu sendiri. Manusia di dalam semua situasi kehidupannya senantiasa memiliki kesempatan untuk mewujudkan nilai atau makna kehidupannya. Melalui tindakan atau kegiatan aktif dan produktifnya manusia mewujudkan nilai-nilai kreatif dan melalui penerimaan pasif akan dunia seperti misalnya dalam pengalaman seni dan pengalaman akan alam, manusia mewujudkan nilai-nilai penghayatan hidupnya. Bahkan jika kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak dan menghayati pengalaman itu tertutup, tetap saja ada kemungkinan untuk mewujudkan nilai, yaitu dengan tetap berani mengambil sikap terhadap situasi batas daya manusia yang tak terperi itu. Inilah yang oleh Frankl disebut “nilai-nilai sikap” (*Einstellungswerte*), terwujud di mana saja terdapat hal-hal yang tak dapat diubah, sesuatu yang menyerupai nasib tak terelak. Dengan cara menerima hal-hal semacam ini, akan terbukalah suatu kelimpahan kemungkinan-kemungkinan nilai. Namun, hal itu berarti bahwa kehidupan manusia, tidak hanya dapat dipenuhi dalam tindakan menciptakan sesuatu ataupun menikmati sesuatu, melainkan juga bahkan di dalam penderitaan.

Hanya mahluk yang senantiasa mempunyai kesempatan untuk mewujudkan makna hidupnya adalah suatu mahluk yang merdeka. Manusia adalah mahluk yang senantiasa memutuskan. Manusia senantiasa akan memutuskan keadaannya saat ini dan akan menjadi apa dia pada saat berikutnya. Kemungkinan-kemungkinan untuk menjadi malaikat atau iblis, senantiasa ada di dalam diri manusia. Seorang pejuang dapat saja langsung menyongsong timah panas yang bakal menembus jantungnya begitu saja, atau dia menyongsong sambil mengheningkan-cipta dengan sebuah doa di bibir. Makna terakhir yang dapat diwujudkan oleh manusia dalam situasi batas daya kemampuan hidupnya, tak lain dari pada kebebasannya untuk memutuskan dia mau menjadi apa.

Demikian menurut Frankl, dalam diri manusia selalu ada kekuatan untuk mengatakan “tidak” terhadap ketakutan-ketakutan dan dan kerapuhan-kerapuhan jiwa. Kekuatan itu oleh Frankl disebut “*trotzmacht des Geistes*” (Kuasa Menidak dari Roh). Lebih daripada itu, menurut Frankl manusia itu pada hakikatnya aktif dan mengjar tujuan. Manusia bahkan membutuhkan tegangan agar ia sehat. Dan hal itu sendiri merupakan suatu gerak, karena ia dapat ada sebagaimana adanya dengan cara melampaui dirinya sendiri, dan mengacu pada suatu yang lain daripada dirinya. Proses menjadi manusia akan terganggu, bila proses tersebut tidak mewujudkan atau menghayati transendensi dirinya sebagai manusia. Kuasa menidak dari roh, transendensi diri, kebebasan eksistensial, semua ungkapan ini mengacu pada gerak untuk menemukan makna, pada kehendak untuk makna (*Wille zum Sinn*). Pahlawan dalam teks-teks Frankl –tidak seperti pahlawan dari Albert Camus- bukanlah seorang pemberontak yang menolak makna, yang meruntuhkan setiap interpretasi makna, melainkan seorang pemberontak yang menafsirkan makna; seorang yang memberontak melawan kondisi-kondisi kehidupan yang membatasi; seorang yang melawan semua itu untuk mewujudkan dirinya guna menemukan makna keberadaannya. Dia tidak menyerah untuk mencari makna. Bila ia, seperti dalam pengalaman penderitaan, tidak lagi dapat maju ke depan, dia tidak bergerak ke “ketinggian”, melainkan ke “kedalaman” kehidupannya.

Subversi Naratif

Menurut hemat saya, adanya puluhan, dan mungkin ratusan tulisan berupa hasil penelitian dan analisis sosial-ekonomi-politik-budaya tentang tragedi-tragedi kekerasan politik di Indonesia sejauh ini, pada umumnya belum memberikan sesuatu yang benar-benar bermakna untuk menjelaskan dan memahami

eksistensi dari rangkaian tragedi kekerasan politik yang sarat dengan pelanggaran HAM itu sendiri. Apalagi begitu banyak taburan tulisan dan analisis yang baru tentang rangkaian tragedi itu akhir-akhir ini, dapat dikatakan belum mampu memberikan segmen baru dari eksistensi tragedi-tragedi itu. Ada kecenderungan, berbagai pengalaman keterlibatan, cara pandang, tulisan dan analisis itu, hanya mengulang atau memperkuat apa yang (harus) dikatakan oleh setiap orang secara moral.

Dalam ungkapan sisnisme pada diri sendiri dapat dikatakan: ada kecenderungan pada diri kita untuk –sadar atau tidak- sekadar memenuhi harapan kita sendiri, keagungan kita sendiri, kegunaan kita sendiri pada masyarakat. Dengan kata lain, kita telah gagal berpartisipasi dalam tahapan-tahapan penemuan (*sequence of discoveries*) yang pada dasarnya merupakan keharusan dalam sejarah narasi dinamika perjalanan sebuah negara-bangsa. Jangan sampai kita tanpa sadar telah meletakkan diri kita di luar sejarah itu sendiri. Dan itu terjadi kalau keterlibatan kita, cara pandang kita, tulisan dan analisis kita ternyata justru menceraabut sejarah dari narasi besar dinamika perjalanan negara-bangsa kita sejauh ini.

Para korban yang menuliskan kisahnya secara naratif ini rupanya telah berusaha menyusun berbagai makna di sekeliling kisah hidup mereka, yang rasional dan irasional, yang aktif dan kontemplatif, yang ternyata justru lebih mampu menjelaskan eksistensi kemanusiaan mereka sendiri; lebih mampu menghasilkan sintesis antara rasa dan logika mendalam kehidupan mereka.

Narasi kaum korban ini semakin memberikan penegasan betapa imajinasi tentang keutuhan dan masa depan sebuah negara sering kali dibangun di atas puing-puing bangunan dan ceceran darah. Inilah hasil nyata, ketika seseorang atau sekelompok orang

merasa dapat menentukan nasib seseorang atau sekelompok orang lain, pada saat ia merasa mampu menjengkal nyawa sesamanya, pada saat itulah ia atau mereka mengangkat diri menjadi Yang Mahakuasa. Kemanusiaan, dengan segala keterbatasannya, pun akan tergusur: menghilangkan nyawa seseorang sama artinya dengan membinasakan semua manusia.

Sepuluh bahkan tigapuluh tahun telah berlalu sejak berbagai peristiwa mengerikan itu terjadi, dan belum banyak yang kita mengerti dan pelajari dari titik penting sejarah republik ini. Seolah-olah memahami sejarah kegelapan sama halnya dengan menorehkan tinta hitam pada buku putih lembaran sejarah nasional kita, yang selama ini dituliskan dengan tinta emas peradaban, keagungan, dan kepahlawanan.

Justru tulisan-tulisan naratif sederhana yang keluar dari lubuk hati yang tulus inilah yang lebih terasa mampu memanggil nurani kita sebagai warga negara-bangsa, lebih ketimbang hasil-hasil penelitian dan artikel “ilmiah” yang sudah ditulis tentang tragedi kekerasan politik sejauh ini. Teks-teks ini ternyata telah membentuk sebuah jendela yang sangat rasional untuk memahami carutmarut politik dalam ruang publik nasional. Dalam teks-teks naratif ini, dan dalam diskursus lain yang dibangun atas dasar laporan-laporan tragedi kekerasan politik negara sejauh ini, dimaknai sebagai sebuah peristiwa nasional sebagai sebuah episode perjalanan negara-bangsa ini.

Agak mengherankan memang bila kasus-kasus tragedi kekerasan politik negara di negeri ini ternyata masih cenderung terlupakan. Sepuluh, bahkan tiga puluh tahun telah berlalu, tetapi tulisan mendalam, penelitian-penelitian yang berusaha memahami kompleksitas dimensi kultural dan sosial tragedi-tragedi itu jumlahnya masih tergolong sangat sedikit. Itu pun sebagian besar berupa karya disertasi peneliti asing. Karya anak bangsa sering

terjebak ke dalam pengulangan-pengulangan yang, sayangnya, jadi sangat membosankan. Pembuktian tentang “provokator”, “pemeriksaan”, dan kaitan dengan tragedi kekerasan politik ditemukan dalam ruang narasi publik nasional, berdampingan dengan pembelaan dari para mantan tokoh militer dan politik tentang keterlibatan mereka dalam kekerasan itu.

Tayangan media, sebuah ritual tetap setahun sekali dalam bulan desember pada peringatan hari HAM internasional, juga menawarkan citra visual yang cenderung sama dan belum menawarkan sebuah perspektif kritis, seperti yang seharusnya ditampilkan dalam sebuah “investigative journalism”. Kekeringan pendekatan kritis untuk memahami tragedi-tragedi kekerasan politik di Indonesia, yang tampak dalam rangkaian pengulangan metafor dan trope dalam narasi teks dan tayangan media, dapat menjadi tragedi tersendiri dalam penulisan sejarah bangsa ini. Haruskah kita menunggu sampai 30 tahun, seperti saat kita menunggu pengungkapan sejarah pembantaian 1965-66, untuk memunculkan suara-suara mereka yang dibungkam oleh kekerasan politik dan kekerasan representasional (*representational violence*) ini?

Barangkali terlalu heroik apabila kita berusaha mengerti tentang apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa tragedi negara-bangsa itu. Memang, kita memerlukan sebuah sikap dan ketegaran untuk mengakui bahwa peristiwa sebesar ini tentu memiliki dampak penting dalam pergolakan politik nasional. Di lain pihak, sikap dan ketegaran yang sama juga diperlukan untuk mengakui bahwa setiap peristiwa kekerasan politik negara, adalah pembongkaran ruang eksistensi individual.

Peristiwa kekerasan menjadi penting bukan karena ia menentukan lalu lintas politik nasional, tetapi karena peristiwa itu membongkar dan merekonstruksi cara manusia memaknai

dunia di sekelilingnya. Pemahaman rasional dan logis barangkali dapat menghasilkan pola, peta, dan logika kerusuhan, tetapi ia tak dapat menawarkan secercah sinar untuk menerangi liku-liku kompleksitas nilai yang manusia pakai untuk memaknai peristiwa kekerasan yang mereka hadapi.

Barangkali sikap kita selama ini terhadap tragedi-tragedi kekerasan politik di negeri ini adalah cenderung memperlakukannya sebagai sebuah peristiwa sejarah yang disikapi secara logis. Kita menganggap peristiwa ini penting karena ia menjadi jendela terhadap sesuatu “*the logic of the state*”, cara berfungsi dan bekerjanya sebuah negara dan perangkatnya. Membaca narasi kaum korban yang ditulis sekian puluh tahun sesudah peristiwa itu terjadi ini, kita merasakan bekerjanya sebuah kekuatan raksasa, entah itu bernama “negara” atau “militer”, di balik bayangan hiruk-pikuk massa di jalanan dan di balik punggung para pelanggar HAM.

Narasi sejarah tak mungkin menjadi narasi logis semata. Ruang percakapan tentang tragedi kekerasan politik tak semestinya terbebani dengan keharusan untuk menjadi ingatan monumental tentang negara. Dalam pengalaman sejarah, seringkali terbukti, kisah naratif justru lebih mampu menghancurkan apa yang tampak sebagai kebenaran imperatif. Kisah naratif kaum korban ini merupakan sebuah subversi untuk penceritaan tentang kekerasan di Indonesia. Dan menurut saya, tulisan-tulisan naratif dari kaum korban ini sudah masuk dalam kategori “subversi naratif”, kita harus berterima kasih pada inisiatif yang telah dilakukan JSKK yang didukung beberapa pihak, yang telah berusaha membuka ruang percakapan bagi penceritaan pengalaman mereka yang menjadi korban tragedi kekerasan politik negara.

Beberapa penerbitan memoar dan acara temu korban mengingatkan bahwa kerusuhan adalah pengalaman yang sangat individual, dan suara-suara ini memiliki hak yang sama untuk masuk dalam narasi sejarah dan narasi antropologis kekerasan di Indonesia. Bagi mereka, pengalaman kekerasan bukan semata-mata pengalaman politik seperti yang selalu diyakini selama ini oleh para analis kekerasan, tetapi juga pengalaman trauma sosial. Penolakan terhadap narasi politik kekerasan bukan berarti mengecilkan arti peristiwa itu, tetapi sebaliknya justru membukakan peristiwa itu kepada sebuah dimensi yang sangat bermakna, dimensi kemanusiaan dan keseharian.

Secara politik, sepuluh, apalagi 30 tahun memang bermakna dalam. Ia merepresentasikan keengganan berlarut-larut untuk memasukkan peristiwa ini dalam panggung sejarah peradaban negara. Ia merepresentasikan sesuatu yang seolah-olah tak pernah ada, *as if nothing happens*, demikian kata antropolog John Pemberton. Akan tetapi, kurun itu adalah waktu yang lebih dari cukup untuk melakukan refleksi, mempertimbangkan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang masih harus dilakukan. Refleksi hanya mungkin apabila kebanggaan terhadap Sejarah (dengan “S” besar) dihadapkan secara kritis kepada kenyataan bahwa kekerasan, suka atau tidak, adalah sejarah (dengan “s” kecil) itu sendiri.

Peristiwa-peristiwa rangkaian tragedi kekerasan politik negara yang penuh dengan pelanggaran HAM adalah sebuah realitas sejarah yang menuntut kita agar lebih memahami subyektivitas kekerasan; kekerasan yang bermula dan berujung pada sikap, termasuk di dalam sikap terhadap penulisan sejarah kekerasan itu sendiri.

Kisah Perlawanan

Dari satu sisi, kisah-kisah yang dituturkan kaum korban-penyintas dengan penuh kesahajaan ini sebenarnya tak teramat istimewa. Kecuali bahwa kisah-kisah tragedi kehidupan ini rasanya semakin dekat memburu sanubari kita. Namun justru dalam peristiwa-peristiwa naratif ini, pra korban sepertinya tengah menggali tanpa ampun dunia batin dan jati diri kemanusiaan mereka sendiri. Dalam tuturan yang sederhana ini, kita jumpai problem manusia individualis, kaum urban korban-korban kapitalisme dan paham modern tentang *survival system*. Dalam kisah ini cukup kuat direkam dan dilukiskan deformasi jiwa manusia modern, baik dalam *psike* individual, maupun dalam lembaga-lembaga keluarga, masyarakat, negara yang serba gundah dan terpecah. Para korban adalah para pemberontak melawan deformasi jiwa yang membuat manusia mejadi hewan-hewan buas yang dilahirkan oleh sistem kebudayaan kita.

Dengan pertanyaan-pertanyaan berantai, narasi kaum korban seakan mendakwa jiwa pembaca: siapa yang ternyata cukup mampu menjaga harga diri tak tunduk mengaduh runtuh? Siapa yang menjawab secara benar terhadap tuntutan-tuntutan saat nyata dan mendesak? Siapa berhasil menjaga keutuhan jiwa dalam kemelut peristiwa-peristiwa tragis? Dalam manusia-manusia macam manakah ternyata masih bertahan substansi manusia sejati? Dan manusia mana yang ternyata tidak hancur dan tetap tahan uji moralitas kemanusiaannya?

Kaum korban-penyintas, dan kawan-kawan senasib seperjuangannya adalah serpihan-serpihan kusam kusuma bangsa yang tumbuh di dataran keras kehidupan negara-bangsa. Tak pelak, kumpulan kisah-kisah tradisi kecil ini hampir dapat dikatakan sebagai *hidden transcript* (catatan terselubung) komunias-komunitas basis masyarakat. Demikian kalau sampai

mereka mengisahkan pengalaman yang tak terkatakan ini, pada dasarnya mereka tengah menggambarkan dan terkadang sekaligus melambangkan kritik-kritik halus dan nyaris tersembunyi mengenai kekuasaan, yang hanya dilontarkan atau diterjemahkan secara diam-diam ke dalam perbuatan, atau dalam alam pribadi. Kaum yang terlindas oleh kekuasaan (baca: para penentang kekuasaan) ini, cenderung menciptakan dengan sendirinya suatu wacana samar yang lokasinya, baik secara ideologis maupun geografis, jauh dari arena percaturan politik utama, dari jangkauan atau pengawasan yang berkuasa.

Mungkin catatan-catatan kecil tak beraturan ini memang sebuah “nyanyi sunyi” tradisi kecil kaum korban yang mencoba untuk bertahan, melawan dan sesekali mendobrak hubungan-hubungan subordinasi yang mengungkungnya. Perjuangan mereka adalah perjuangan manusia yang menciptakan ruang gerak sosial, merakit ideologi-ideologi alternatif, mengembangkan suatu sub-budaya ketidaksepakatan, menggalang solidaritas kawan-kawan senasib-seperjuangan, dan mengasah teknik serta bentuk-bentuk perlawanan tidak langsung. Seluruh kisah kaum korban ini pada dasarnya merupakan kesaksian tentang perjuangan warga negara korban kekerasan politik negara, yang bertempur dalam iman manusia lemah namun jaya, yang tak pernah patah dan hancur nilai kemanusiaannya di tengah amukan massa zaman kejam serta penderitaan tak terperi yang tak pernah usai. Terlampau pagi menyebut mereka pemberontak, terlalu dini usia mereka untuk mendobrak. Namun toh justru dalam situasi batas daya kemampuannya, dalam perjuangan mereka yang suntuk, bahkan di ujung ajalnya, mereka merasa perlu menggoreskan pesan, kendati dengan keringat, debu dan darah.. Segalanya telah dihimpun dan dipertaruhkan, segalanya telah dicurahkan dan diikhhlaskan. Memang mereka seperti kalah, meradang, luka bahkan mati, namun kini mereka tidak lagi membisu. Mereka telah berteriak sunyi, tentang kemerdekaan yang demikian

mereka rindu-rindukan. Dengan itu pula kasus mereka menjadi kasus kepahlawanan modern, justru dalam keterbatasannya menghadapi nasib itu. Keterbatasan di dalam titik tawakal. Sebab hidup kita, ternyata terbuat dari kematian orang-orang lain yang tidak membisu.

Cermin Retak Paradoks Zaman

Narasi kaum korban-penyintas adalah sebuah cermin retak tentang sebuah paradoks zaman: di satu pihak ada kesewenang-wenangan yang brutal, kejam dan telanjang tanpa malu, di lain pihak kita masih dapat mendengar kesaksian-kesaksian otentik, betapa relatif dan fananya segala ideologi di hadapan inti dan esensi proses sejarah yang mengatasi kekerasan sebuah sistem politik. Inilah momentum untuk belajar, memperluas cakrawala pergulatan batin manusia, serta memperdalam pemaknaan sejarah manusia. Sejarah yang bukan sejarah institusional, yang *de facto* lebih ditentukan oleh kaum pemenang; kaum yang biasanya cenderung didukung atau mendukung ideologi, kebijakan atau pemerintahan resmi. Sejarah dalam narasi kaum korban-penyintas ini senantiasa mengisyaratkan sebuah perspektif yang berikhtiar untuk melakukan pelacakan kembali peristiwa-peristiwa “tradisi kecil” pada dataran hidup massa kebanyakan; yang membuat kita tidak mudah merayakan apa yang sering kita sebut peradaban sebagai lompatan-lompatan linear yang penuh keniscayaan, serba mutlak, tak bisa dipertanyakan lagi. Justru karena yang berada di atas timbangan adalah individu-individu atau massa yang berada di pinggiran lingkaran kekuasaan. Dan setiap kali kita membongkar apa yang cenderung dikubur oleh sejarah institusional, kita pasti akan berjumpa dengan noktah-noktah pengalaman dari mereka yang sering dianggap sebagai “kaum yang kalah”. Inilah sejarah sungai-sungai proses kesadaran dan pengolahan puncak-puncak

atau jurang-jurang eksistensi manusia, baik dalam kekelaman derita maupun dalam bunga-bunga liar mekar bahagia dalam genangan rawa-rawa kehidupan nyata.

Sikap manusia yang meskipun sadar bakal digempur terus menerus, namun toh tetap berlelgang juang terus teguh dalam pergulatannya, pada hakikatnya adalah sikap religius. Bukankah kita tetap menyaksikan kaum korban penyintas tetap menerawang pada awan-awan harapan di gerbang kehidupan mereka? Mereka tetap melihat pijar cahaya akhir, yang walau pun teramat jauh, membuat jiwa mereka tetap bertekad untuk hidup terus, merebut kehidupan sejati. Dan harapan sejenis ini, yang terekam dari teriakan panjang yang berpendar-pendar jauh merasuki relung-relung sukma sesamanya, ternyata hanya dapat disendikan pada dasar kepercayaan, bahwa memang benar-benar ada suatu Kebenaran Terakhir, suatu Keadilan Terakhir. Sehingga seluruh perjuangan itu toh punya makna. Nilai korban demikian tinggi. Kehendak untuk terus bertahan hidup dan berharap, meski kegelapan di sekeliling seolah tak memberi nafas harapan, adalah esensi dari sikap religius sejati. Sebab yang dituju religiositas sejati bukan dunia kaum pemimpi, bukan fatamorgana kosong, dan bukan rasionalitas belaka, melainkan benar-benar realitas nyata.

Kisah kaum korban adalah kisah kaum kecil. Kaum yang dengan keyakinan tipis, menyerukan protes untuk didengarkan oleh kaum dewasa dan berkuasa. Dan karena itu jeritan protesnya bagai hewan terluka, mengaum sampai di ujung kematian. Semangat mereka adalah semangat melawan stigma, nujum dan nasib, meskipun ternyata kalah. Mereka kalah, oleh apa yang oleh orang Yunani disebut *dike*, rancangan takdir. Memang orang kecil adalah orang, yang pada akhirnya, terlalu sering kalah. Adakah karena adagium hukum alam itu kini tengah berlaku kembali, sebagaimana pernah dibisikkan Jean Paul Sartre (1905-

1980), eksistensialis Prancis itu: “*When the rich wage war it is the poor who die*” (Apabila yang kaya mengobarkan perang, maka yang bakal mati adalah kaum miskin.)?

Religiositas Kaum Korban-Penyintas

Kisah kaum korban-penyintas akan membuat kita terjaga, betapa sejarah dunia senantiasa digenangi oleh berbagai inti perkara-perkara kemanusiaan: masyarakat terdiri dari tuan-tuan dan budak-budak. Namun juga berbagai macam sistem ideologi praktis, seperti kapitalisme yang mereka alami ternyata bukan penyelesaian yang pantas dirayakan, sebab di situpun skandal kuno kembali terulang: tuan-tuan menginjak-injak budak-budak. Tidak hanya dalam negara, tapi juga nyaris dalam seluruh dimensi kehidupan, ada benang merah sikap dan struktur tuan-budak itu. Sejak lahir dari kandungan dalam lingkungan keluarga, mereka telah diajari untuk tunduk, taat buta tanpa tawar-menawar. Namun dalam kenyataannya, otoritas lingkungan mereka tak pernah membuat mereka dewasa. Yang diciptakan adalah suasana ketakutan. Ketakutan pada otoritas kekuasaan adalah ketakutan yang purba, rasa ngeri dari sebuah zaman “pra-budaya”. Bisa jadi akarnya berupa sebuah trauma yang tersembunyi jauh dalam kesadaran kolektif kita: masa penjajahan. Sejarah tuan dan hamba, yang selama berabad-abad berlangsung gaduh di negeri ini, seperti halnya dialami beberapa negeri lain di Asia Tenggara lainnya.

Penderitaan manusia adalah ombak yang tak bisa dielakkan dalam sejarah sebuah bangsa. Dan anak-anak pun akhirnya bakal mengerti: bahwa di atas sana ada mesin yang ingin membersihkan manusia dan jagad raya, menjadi “murni”. Bahwa yang mustahil telah dipaksakan, dan yang mustahil pun telah melahirkan yang buas, sewenang-wenang. Nampaknya persoalannya sederhana:

bagaimana kekuasaan yang lahir dari uang dan bedil, bisa tunduk kepada sesuatu yang tak beruang dan berbedil. Tapi bukanlah yang demikian ini hanyalah sebuah masalah klasik? Klasik, tapi terus mengusik.

Demikianlah, dalam tataran religiositas, nampaklah seluruh hidup mereka dibayangi oleh rasa takut pada neraka, kepada hukuman Tuhan, yang tidak memungkinkan mereka menjadi manusia yang sadar yang bertanggungjawab atas sikap dan perilakunya sendiri. Oleh otoritas yang berkuasa, Tuhan telah dijadikan semacam tamal-sulam untuk menutup lubang-lubang kesulitan yang tak dapat dibereskan sendiri oleh manusia. Seakan Tuhan dijadikan tukang sulap pembuat mukjizat, untuk membereskan kerepotan-kerepotan yang dibuat oleh manusia sendiri. Namun justru dengan alam kesadaran yang teramat bersahaja, para korban dalam rangkaian naratif ini tanpa sengaja telah mendobrak kungkungan ideologis semacam itu, justru dengan kesaksian-kesaksian hidup penuh perjuangan membangun *survival system* dalam komunitas-komunitas basis kehidupan mereka.

Situasi batas daya kemampuan hidup yang mereka hayati demikian intens, berupa kepungan noda stigma sosial-politis nan keji, tersingkir, “sendiri tanpa dunia”, “ditinggalkan bahasa”, hidup dalam kebisuan, dalam dunia tanpa nada, tanpa nasib, tanpa hubungan, tanpa hak untuk mencinta dan dicinta. Sebuah rangkaian bunga hitam serba “tanpa”. Namun justru di tengah genangan dunia penuh negasi inilah secara amat menakjubkan telah merasakan, mengalami perpaduan penuh gaib antara ruang-ruang dalam dan ruang-ruang luar di dalam rongga jiwa mereka. Dalam suntuk ketidakberdayaannya, mereka telah mengalami suatu kesadaran reflektif: rindu pulang kembali ke negeri asali mereka. Mereka toh tak sudi untuk terus menerus menjadi “orang luar” yang terbuang. Sebagai pejiarah yang menanggung dahaga hebat, mereka rindu untuk kembali menemukan oase perdamaian

air kehidupan nan jernih. Damai, bukan berarti rujuk lepas dari egoisme, menghindari pertarungan *survival of the fittest* dalam dunia perjuangan di tengah kemiskinan mereka, tapi dalam makna metafisik individual, dalam makna tanggung jawab penuh sikap solidaritas antar sesama manusia. Dan lahirlah sebuah kesadaran baru, paling tidak sebuah dambaan: manusia pada situasi batas daya kemampuan hidupnya yang paling remuk sekalipun, ternyata dapat dan mampu menghayati serta memberikan kesaksian tentang makna kehidupan religius yang amat mendalam.

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Prolog.....	1
Munir, Cahaya yang Tidak Pernah Padam	6
Fatamorgana di Negeri Jiran	22
Jalan Panjang di Tanjung Duren.....	31
Menjaga Damai di Poso	39
Kesetiaan Seorang Guru	44
Yun Hap, Gugur Bersama Rakyat.....	58
Wawan, Tragedi Demi Tragedi	70
Saya Ingin Bertemu Wiranto	98
Katakan, Di Mana Mereka?	105
Tukang Becak dan Wisanggeni	122
Horor di Pagi Berkabut.....	132
Tanjung Priok, Sebuah Perjalanan Pencarian Diri	149
Piala Untuk Ayah	159
Pembantaian Massal dalam Memori.....	168
Epilog	167
Para Penulis	196
Profil JSKK.....	199

PROLOG

IMPIAN HAM KORBAN, KEBUTUHAN INDONESIA

Oleh :
Usman Hamid

Kita, tak ada salahnya kembali bertanya, mengapa sejumlah manusia kerap berkumpul memperingati peristiwa-peristiwa kematian? Mengapa kita memperingati peristiwa penghilangan aktivis-aktivis yang kritis? Mengapa kita memperingati peristiwa penembakan mahasiswa yang berdemonstrasi damai di Trisakti dan Jembatan Semanggi? Mengapa kita memperingati peristiwa-peristiwa Tanjung Priok serta Talangsari? Mengapa kita masih bertanya-tanya dengan peristiwa di tahun 1965? Mengapa masa lalu itu buram seperti sulit tertembus mata, hati dan bathin kita?

Dalam tiap kelahiran manusia, dengan sendirinya sejarah tentang dirinya dimulai, kemudian berlangsung untuk tempo tertentu. Perjalanan sejarah itu dicatat oleh dirinya maupun diingat oleh mereka yang mengenalnya. Sejarah manusia itu mulanya dibentuk. Tapi mengakhirinya adalah perkara yang tak mudah. Melupakannya sebagai masa lalu seakan seperti kita hendak meninggalkan bayangan hitam di belakang kita yang terus membayang dan mengikuti. Bayangan itu adalah sejarah yang hitam dari kemanusiaan. Noda hitam yang menodai putihnya hakekat manusia sebagai ciptaan-Nya, bahwa “setiap bayi yang lahir awalnya bagaikan kertas putih”.

Pembentukan sejarah manusia itu umumnya oleh keluarga. Namun tidak sedikit pula yang langsung dibentuk oleh alam atau lingkungan yang bukan keluarganya. Baru kemudian ketika akalinya mulai tumbuh, sejarah sesungguhnya ditentukan oleh

dirinya sendiri. Bukan orang lain. Bukan orangtua yang membesarkannya. Bukan agama yang diwariskan padanya. Bukan ideologi politik yang diajarkan padanya. Bukan lingkungan yang memproyeksikan dirinya. Saat berakal, saat itu pula tanggungjawab sejarah akan dirinya dikembalikan. Dia – manusia itu – sendiri yang menentukan sejarahnya. Dia itulah kita, yang hari ini wajib menentukan hendak ke mana arah sejarah masa depan.

Adapun citra dari proses pembentukan sejarah itu adalah sesuatu yang kemudian tampak di depan kita, yakni sosok yang kita kenal, kita identifikasi: “Dia” yang turunan Tionghoa, “dia” yang beragama Kristen, “dia” yang komunis, “dia” yang sosialis, “dia” yang agamis, “dia”lah yang dan seterusnya. Identifikasi itu tentu punya manfaat utama: memudahkan kita mengenali sosok, latar belakang, asal-usul atau akar budaya antar manusia. Identitas berfungsi sebagai penanda, pengenalan. Namun, dalam skenario orang-orang yang rakus akan harta dan kekuasaan, kita terhentak, saat identitas kemudian menjadi alasan berperang, menebarkan kekerasan, membunuh dan menganiaya orang lain, dibuat-buat – disebar, dikabarkan.

Mungkin itu sebabnya, orang-orang yang dulu menyerang kantor KontraS atau yang membunuh Munir tak perlu mengenalnya, tak perlu berbicara atau berdebat dengan Munir karena keyakinan buta atas penggambaran yang salah telah melahirkan disinformasi dan propaganda hitam bahwa Munir adalah musuh negara atau ancaman keamanan nasional.

Itu sebabnya, pokok-pokok kemanusiaan yang sejatinya juga dirintis oleh berbagai bangsa di dunia, kemudian jadi seolah-olah milik Barat, karena orang-orang itu sendiri menyerahkan identitas (dan justifikasi) itu pada mereka, pada Barat, pada asing. Padahal

kita, yang pernah mau melihat ke dalam diri, serta mengisi bangunan kemanusiaan dalam pergaulan di bumi.

Kita tidak hendak menyerang identitas kita sendiri. Identitas kita tetap kekal dan tak mungkin diubah kecuali kita mengizinkan, membiarkan, menelantarkannya. Identitas kita, bangsa ini – negara ini – telah secara luar biasa dibangun oleh para pendiri bangsa kita. Identitas bangsa ini terpatri dalam konstitusi kita. Kemajemukan yang disatukan nasib yang sama, penderitaan yang sama dan keinginan bersama untuk merdeka dan mandiri: *Bhinneka Tunggal Ika*. Hal yang terpenting lainnya adalah bangsa kita berdiri tegak di atas negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum, dengan demikian, bukan untuk menciptakan dendam sebagaimana sering diterapkan oleh mereka yang berkuasa. Hukum di sini, adalah cara menyelesaikan masalah secara beradab dan bermartabat. Segala bukti dihadirkan, untuk semata demi keadilan. Bukan keadilan sekelompok orang, atau para penguasa yang bergelimang harta, tapi keadilan untuk mereka yang tertindas.

Maka ketika sanak-keluarga dari *Theys Eluay* yang diculik dan dibunuh di Papua hingga sekarang menuntut keadilan, kita yang berada di tempat lain seharusnya menyediakan keadilan itu. Maka ketika sanak-keluarga dari *Tengku Bantaqiah* yang dibantai secara keji di Aceh hingga sekarang meminta pertanggungjawaban, kita disini – di Jakarta – seharusnya juga bertanggungjawab atas peristiwa yang mereka alami.

Dan toh, keadilan dan pertanggungjawaban itu tidak terwujud hingga kini. Kenyataan yang demikian ini, membuat kita bertanya-tanya: inikah identitas Indonesia yang dicita-citakan kemerdekaan 1945?

Kita tentu tak habis pikir. Identitas bangsa yang seperti apa yang hendak kita ceritakan pada Widaningsih yang suaminya tewas diberondong senjata di dusun Talangsari, di Lampung? Kepribadian bangsa yang seperti apa yang hendak kita sampaikan pada dunia jika semua keluarga orang-orang yang hilang, atau keturunan para korban Priok, Trisakti dan Semanggi terus menggugat kita seumur hidup? Sosok bangsa yang seperti apa yang dapat kita jawab ketika bapak dan ibu Tomo, ibu Fathah, ibu Tuti, ibu Nurhasanah dan pak Paian Siahaan yang anaknya dihilangkan bertanya: apakah mereka masih hidup? Apakah mereka mati? Dimana mayatnya? Siapa yang menculik dan siapa membunuhnya?

Bangsa yang besar pastinya melindungi sebuah nyawa, tanpa melihat warna kulitnya, apapun keyakinannya. Simaklah tulisan-tulisan korban di buku ini. Simaklah derita sejumlah keluarga manusia yang kehilangan kebahagiaannya saat terjadinya tragedi Trisakti-Semanggi 1998-1999, penculikan aktivis 1997/98, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989 hingga tragedi 1965. Tragedi mereka harusnya menjadi tragedi kita juga. Saya yakin dan percaya, identitas yang kita cita-citakan, yang diwariskan pendiri bangsa kita adalah identitas bangsa yang tidak mungkin menelantarkan satupun manusia di Sidoarjo. Karena bangsa yang bermartabat, tidak mungkin meniadakan “yang lain”.

Kita sama-sama menyaksikan para korban berjuang memperbaiki sejarah itu. Bukan untuk balas dendam, melainkan untuk kebijaksanaan identitas bersama yang diinginkan di masa depan.

Dari sejarah gelap Indonesia, kita mengambil pelajaran bahwa masa lalu yang kelam dan yang tidak terselesaikan akan menghambat kita untuk maju lebih jauh. Karena ketika kasus-kasus masa lalu dibiarkan terkatung-katung, maka dengan sendirinya kasus-kasus baru akan lahir. Dan akhirnya sejarah

bangsa hanya akan terus melahirkan korban-korban baru. Kita akan menjadi bangsa yang tak mengenal kata “jera”.

Untuk itu, sebagai bagian anak bangsa – sebagai masalah bersama – adalah tidak mungkin kita meninggalkan sejarah para korban serta sebaliknya menyilakan sejarah para pelaku. Untuk melangkah lebih jauh – untuk memenuhi kemajemukan yang menjadi dasar sekaligus cita-cita bernegara-bangsa – Indonesia selekasnya harus menyelesaikan masa lalunya.

Sebagai sebuah buku, masa lalu adalah halaman terdepan dari masa kini, rencana masa depan. Masa lalu, selama ini telah ditempatkan pada tempat yang salah. Masa lalu, selama ini telah dicurangi oleh tujuan-tujuan berkuasa semata. Keinginan banyak orang untuk menjadikan masa lalu berada di keranjang sampah – atau dilupakan saja – selain membunuh kembali para korban juga tak ubahnya mengkhianati “pembangunan identitas” kita, Indonesia yang bermartabat.

Ketika mengemukakan cita-citanya, Indonesia sesungguhnya mengemukakan identitas ideal yang hendak diwujudkan. Dalam perjuangan itu, saya meyakini pembentukan kepribadian Indonesia harus dibangun bersama – tidak parsial. Dan kepribadian Indonesia yang ideal hanya mungkin jika kita bersama-sama menyelesaikan masa lalu secara adil dan bermartabat. Lalu bagaimana memulainya? Simaklah ungkapan mata hati dan bathin para korban yang tertuang di dalam buku ini. Dari situlah kita semua perlu memulainya; menata derap serta merajut langkah bersama. Sebab impian yang kita impikan sendiri hanya akan menjadi sekadar impian. Namun impian kita bersama bisa menjadi kenyataan. Suatu hari nanti.

MUNIR, CAHAYA YANG TIDAK PERNAH PADAM

Oleh :
Suciwati

“Kenapa Abah dibunuh, Bu?” Mulut mungil itu tiba-tiba bersuara bak godam menghantam ulu hatiku. Gadis kecilku, Diva Suukyi, saat itu masih 2 tahun, menatap penuh harap. Menuntut penjelasan.

Suaraku mendadak menghilang. Airmataku jatuh. Sungguh, seandainya boleh memilih, aku akan pergi jauh. Tak kuasa aku menatap mata tanpa dosa yang menuntut jawaban itu. Terlalu dini, sayang. Belum saatnya kau mengetahui kekejian di balik meninggalnya ayahmu, suamiku, Munir.

Seolah tahu lidah ibunya kelu, Diva memelukku. Tangan kecilnya melingkari tubuhku. “Tbu jangan menangis...Jangan sedih,” kata-kata itu terus mengiang di telingaku.

Pada 7 September 2004, sejarah kelim itu tertoreh. Munir, suami dan ayah dua anakku –Alif Allende (10) dan Diva Suukyi (6)—meninggal. Siang itu, pukul 2. Usman Hamid dari KontraS menelepon ke rumah. “Mbak Suci ada di mana?” Firasatku langsung berkata ada yang tidak beres. Pasti ada hal yang begitu besar terjadi sampai Usman begitu bingung. Jelas dia menelepon ke rumah, *kok* masih bertanya aku di mana.

Benar saja. Tergagap Usman bertanya, “Mbak, apa sudah mendengar kabar bahwa Cak Munir sudah meninggal?” Tertegun aku mendengarnya. Seolah aku berada di awang-awang dan kemudian langsung dibanting ke tanah dengan keras. Kehidupan seolah berhenti. Seseorang yang menjadi bagian jiwaku, nyawaku,

telah tiada. Kegelapan itu mencengkeram dan menghujamku dalam duka yang tak terperi.

Nyatakah ini? Air mata membanjir. Tubuhku limbung. Perlu beberapa saat bagiku untuk mengumpulkan tenaga dan akal sehat. Aku harus segera mencari informasi tentang Munir. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada dia?

Begitu kesadaranku hadir, segera kutelepon berbagai lembaga seperti Imparsial dan kantor Garuda di Jakarta dan di Schipol, Belanda. Begitu pula teman-teman Munir di Belanda. Aku segera mencari kabar lebih lanjut dari kawan-kawan aktivis. Tak ada yang bisa memberikan keterangan memuaskan.

Orang-orang mulai berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Aku masih sibuk mencari informasi kesana-kemari. Sebagian diriku masih *ngeyel*, berharap berita itu bohong semata. Aku hanya akan percaya jika melihat langsung jenazah almarhum.

Pada tragedi ini, pihak Garuda amat tidak bertanggungjawab. Tiga kali aku menelepon kantor mereka di Jakarta, tapi tak satu pun keterangan didapat. Mereka bahkan bilang tidak tahu-menahu soal kabar kematian Munir. Sungguh menyakitkan, pihak maskapai penerbangan Garuda harusnya yang paling bertanggungjawab tidak sekali pun menghubungiku untuk memberi informasi. Padahal, Munir meninggal di pesawat Garuda 974.

Kantor Garuda di Schipol pun sama saja. Pada telepon ketiga, dengan marah aku menyatakan berhak mendapat kabar yang jelas menyangkut suamiku. Barulah informasi itu datang. Yan, nama karyawan Garuda itu, menjelaskan bahwa memang Munir telah meninggal dan dia menyaksikan secara langsung. Yan bahkan berpesan jangan sampai orang mengetahui kalau dia yang memberi

kabar itu kepadaku. Ah, apa pula ini? Tuhan, beri aku kekuatan-Mu.

Aku hanya bisa menangis. Si sulung Alif, saat itu baru 6 tahun, melihatku dengan sedih dan ikut menangis. Diva terus bertanya dalam ketidak mengertiannya, “Kenapa Ibu menangis?” Aku merasa seolah jauh dari dunia nyata. Kosong.

Jiwaku hampa. Saat itu, dengan kedangkalanku sebagai manusia, sejuta pertanyaan dan gugatan terlontar kepada Tuhan. “Kenapa bukan aku saja yang Engkau panggil, Ya Allah? Mengapa harus dia? Mengapa dengan cara seperti ini? Mengapa harus saat ini? Mengapa? Ya Allah, Kau boleh ambil nyawaku, hamba siap menggantikannya. Dia masih sangat kami butuhkan, negara ini butuh dia.”

Rumah tiba-tiba dibanjiri manusia. Teman, kerabat, tetangga berdatangan. Bunga berjajar dari ujung jalan sampai ujung satunya. Alif bertanya, “Kenapa bunga itu tulisannya turut berduka cita untuk Abah?” Anakku, aku peluk dia, kukatakan bahwa Abah tidak akan pernah kembali lagi dari Belanda. Abah telah meninggal dan kita tidak akan pernah bertemu lagi dengannya.

Alif menangis dan protes, “Bukannya Abah hanya sekolah? Bukannya Abah akan pulang Desember? Kenapa kita tidak akan ketemu lagi?” Amel, guru yang selama ini melakukan terapi untuk Alif yang cenderung hiperaktif, segera menggendong dan membawa Alif ke luar. Maafkan, Nak. Aku tak berdaya bahkan untuk sekedar menjawab pertanyaanmu. Aku tidak mampu.

Teman-teman dari berbagai lembaga juga datang. Antara lain dari Kontras, Imparsial, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Human Rights Working Group (HRWG),

dan banyak lagi yang tak mungkin aku mengingatnya satu persatu. Semua tumpah ruah. Puluhan wartawan juga datang, tapi aku tak mau diwawancarai mereka. Biarlah kesedihan ini mutlak jadi milikku. Meskipun aku yakin bahwa keluarga korban yang selama ini didampingi almarhum pasti tidak kalah sedih. Sebagian mereka datang dan histeris menanggapi kehilangan Munir.

Pada 8 September 2004, aku menjemput jenazah suamiku. Bersama Poengky dan Ucok dari Imparsial, Usman dari KontraS, dan Rasyid kakak Munir, aku berangkat ke Belanda. Ya Tuhan, beri aku kekuatan-Mu, begitu doaku sepanjang perjalanan.

Di ruang Mortuarium Schipol, jasad Munir terbujur kaku. Kami tiada tahan untuk tidak histeris. Usman melantunkan doa-doa yang membuat kami tenang kembali.

Sejenak aku ingin hanya berdua dengan suami tercintaku. Aku meminta teman-teman keluar dari ruangan. Aku pandangi Munir dalam derai air mata. Tak tahu lagi apa yang kurasakan saat itu. Sedih, hampa, kosong.

Lalu, kupegang tangannya. Kupandangi dia. Teringat saat-saat indah ketika kami bersama. Tiba-tiba ada rasa lain yang membuat aku menerima kenyataan ini. Aku harus merelakan kepergiannya. Doa-doa kupanjatkan. Ya Allah, berilah suamiku tempat terhormat disisi-Mu. Amien.

Di Batu, 12 September 2004, kota kelahirannya, Munir disemayamkan. Pelayat seolah tiada habisnya datang. Handai taulan, sahabat, teman-teman buruh, petani, mahasiswa, aktivis, wartawan semua ada. Banyak yang tidak tidur menunggu esok

hari, saat pemakaman Munir. Umik, ibu Munir, begitu sedih. Aku bahkan tak sanggup melihat kesedihan yang membayang di wajahnya.

Hari itu, masjid terbesar di Batu, tempat Munir disholati, tidak sanggup menampung semua yang hadir. Perlu antre bergantian untuk sholat jenazah. Kota Batu yang selama ini sepi mendadak dipadati manusia. Melimpahnya “tamu” Munir ini bagai suntikan semangat bagiku. Bahwa ternyata bukan aku dan keluarga saja yang merasakan kedukaan ini. Dukungan yang mereka berikan membuatku kuat.

Seperti menanam sesuatu maka kamu akan memanennya, itulah yang aku buktikan hari ini. Aku melihat yang dilakukan Munir selama ini membuktikan apa yang dia perbuat. Munir selalu mencoba berjuang bagi tegaknya keadilan dan perdamaian. Dia berteriak lantang menyuarakan keadilan bagi korban, baik di Aceh, Papua, Ambon, dan di mana saja.

Keberanian dan sikap kritisnya terhadap penguasa memang harus dibayar mahal oleh nyawanya sendiri dan juga oleh keluarga yang ditinggalkannya ‘anak dan istrinya’.

Tak mudah bagiku mencerna kehilangan ini. Perlu proses untuk menerima, mengikhlaskan kepergian Munir, dan menerima bahwa ini adalah kehendak-Nya. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka siapa pun dan dengan cara apa pun tidak akan mampu mengelak. Keyakinan bahwa hidup-mati manusia adalah kehendak-Nya itu membuat aku bangkit lagi.

Munir adalah manusia, sama sepertiku dan yang lainnya, yang bisa mati. Kemarin, sekarang, atau besok, itu hanya persoalan waktu. Sakit, diracun, atau ditembak itu hanya persoalan cara. Kematian adalah keniscayaan. Suka atau tidak suka, kita tetap

harus menghadapinya. Dan kehidupan tidak berhenti. Air mata kepedihan tidak akan pernah mengembalikannya.

Sepenggal doa Sayyidina Ali, sahabat Nabi Muhammad SAW, membuatku bertambah yakin bahwa aku harus bangkit:

“Ketika kumohon kekuatan, Allah memberiku kesulitan agar aku menjadi kuat.

Ketika kumohon kebijaksanaan, Allah memberiku masalah untuk kupecahkan.

Ketika kumohon kesejahteraan, Allah memberikan aku akal untuk berpikir.

Ketika kumohon keberanian, Allah memberiku kondisi bahaya untuk kuatasi.

Ketika kumohon sebuah cinta, Allah memberiku orang-orang bermasalah untuk kutolong.

Ketika kumohon bantuan, Allah memberiku kesempatan.

Aku tidak pernah menerima apa yang kupinta, tapi aku menerima segala yang kubutuhkan.”

Kucoba untuk merenung. Kuteguhkan hati bahwa ini bukan sekedar takdir, tapi ada misteri yang menyelubungi. Misteri yang harus diungkap. Aku harus berbuat sesuatu. Bersyukur, aku tidak sendirian dalam kedukaan ini. Banyak teman yang peduli kepada kami sekeluarga.

Dua bulan kemudian, tepatnya 11 November 2004, Rachland dari Imparsial menghubungi. Dia mengabarkan ada wartawan dari Belanda ingin mewawancarai. Dia juga bertanya, apakah aku sudah mengetahui hasil otopsi yang dilakukan pihak Belanda terhadap almarhum Munir. Hasil otopsi itu kabarnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri.

Aku berharap teman-teman memiliki jaringan ke Departemen Luar Negeri. Tapi, rupanya tidak. Aku pun menelepon 108 –

nomor informasi—untuk meminta nomer telepon kantor Departemen Luar Negeri. Teleponku ditanggapi seperti ping-pong. Dioper sana-sini. Sampai akhirnya aku berbicara via telepon dengan Pak Arizal. Dia menjelaskan bahwa semua dokumen otopsi telah diserahkan kepada Kepala Polri, dengan koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Entah, keberanian dari mana yang menyusup dalam diriku waktu itu. Aku tanpa ragu menghubungi dan berbicara dengan mereka, semua pejabat itu. Kebetulan, semua nomor telepon pejabat-pejabat penting itu terekam dalam telepon genggam suamiku.

Kepada para petinggi itu, aku bertanya, “Kenapa aku sebagai orang terdekat almarhum, tidak diberitahu tentang otopsi? Apa yang terjadi padanya? Apa hasilnya?” Mereka tidak memberikan jawaban. Padahal, sebagai isteri korban, aku memiliki hak yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Pukul 10.00 malam, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo AS meneleponku. Menurut dia, hasil otopsi telah diserahkan kepada Kepala Bagian Reserse dan Kriminal Suyitno Landung, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Malam itu juga aku menelepon kepala badan reserse dan kriminal (Kabareskrim). Aku meminta bertemu dengan dia esok paginya.

Bersama Al Ar’af dari Imparsial, Usman Hamid dari KontraS, Binny Buchori dari INFID, Smita Notosusanto dari Center for Electoral Reform (CETRO), dan beberapa kawan, pagi 12 November 2004 aku mendatangi kantor Pak Landung di mabes Polri.

Pagi itu pula aku menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Benarlah dugaanku bahwa ada yang aneh pada kematian Munir. Hasil otopsi itu menjelaskan dengan gamblang bahwa kematian

almarhum adalah lantaran racun arsenik. Racun itu ditemukan di lambung, urine, dan darahnya.

Ternyata dia memang dibunuh...!

Keluar dari Mabes Polri, kami sudah diserbu wartawan. Siaran pers pun digelar bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat di kantor KontraS. Isinya, mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi, menyerahkan hasil otopsi kepada keluarga, dan membentuk tim penyelidikan independen yang melibatkan kalangan masyarakat sipil. Desakan serupa dikeluarkan oleh tokoh-tokoh masyarakat di berbagai daerah. Desakan yang ditanggapi dengan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengusut kasus pembunuhan Munir. Janji penting itu adalah **'test of our history'** kalau negeri kita mau berubah lewat kasus ini ukurannya. Jika dituntaskan maka kita memang berubah menjadi lebih baik jika tidak tentu saja sebaliknya.

Tak lama pula kami membentuk KASUM (Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir). Banyak organisasi dan individu yang punya komitmen akan pengungkapan kasus ini bergabung. Ini memang bukan hanya persoalan kematian seorang Munir. Lebih dari itu, ini persoalan kemanusiaan yang dihinakan dan kita tidak mau ada orang yang diperlakukan sama seperti dia hanya karena perbedaan pikiran.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun sepakat untuk meminta pemerintah membentuk tim independen kasus Munir. DPR juga mendesak pemerintah segera menyerahkan hasil otopsi kepada keluarga almarhum. Pada November 2004, DPR membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus pembunuhan Munir.

Pada 24 November 2004, Presiden Yudhoyono bertemu denganku. Teman-teman dari KontraS, Imparsial, Demos menemaniku bertemu Presiden. Satu bulan kemudian tepatnya tanggal 23 Desember 2004 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden untuk pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Marsudi Hanafi. Tim ini terdiri dari kepolisian,deplu,kehakiman,kejaksaan,NGO,dan tokoh masyarakat.

Tim ini, di luar dugaan, bekerja efektif menemukan kepingan-kepingan *puzzle* siapa dibalik pembunuhan Munir. Fakta-fakta temuan tim ini cukup mencengangkan. Fakta yang menunjukkan benang merah pembunuhan keji penuh konspirasi dan penyalahgunaan kekuasaan serta kewenangan di Badan Intelijen Nasional (BIN). Sayangnya TPF tidak diperpanjang lagi setelah dua kali (enam bulan) masa kerjanya.

Adalah Pollycarpus, pilot Garuda, benang merah yang mengurai jaring laba-laba kebekuan dan kerahasiaan yang melingkupi BIN. Polly, sebuah nama yang sangat melekat dibenakku. Sangat dalam maknanya dalam perjalanan menguak kebenaran siapa dibalik kematian Munir, suamiku.

Dia adalah orang yang menelepon suamiku dua hari sebelum berangkat ke Belanda. Polly menanyakan jadwal keberangkatan suamiku dan dia mau mengajak berangkat bersama. Kebetulan waktu itu aku yang menerima telepon itu. Jika tidak, barangkali aku tidak akan pernah tahu keberadaan Polly. Munir mengatakan Polly adalah orang aneh dan sok akrab. “Dia itu orang tidak dikenal tapi tiba-tiba menitipkan surat untuk diposkan di bandara setempat ketika aku hendak ke Swiss,” begitu kata Munir.

Terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sang pilot tidak hanya menerbangkan pesawat. Dia adalah orang

yang mempunyai hubungan dengan agen BIN seperti halnya Mayor Jenderal TNI Muchdi PR, Deputy V BIN. Polly disebut sebagai agen non organik BIN yang langsung berada di bawah kendali Muchdi. Berkas dakwaan tersebut juga menyebutkan adanya pembunuhan berencana terhadap Munir.

Tercatat pula dalam berkas dakwaan untuk Muchdi PR, keduanya—Polly dan Muchdi—berhubungan intensif melalui telepon. Paling tidak 41 kali hubungan telepon antara Muchdi dan Polly yang terjadi menjelang, saat dan sesudah tanggal kematian Munir. Bisa diduga, keduanya berhubungan terkait dengan perencanaan, eksekusi, dan pembersihan jejak.

Kami, aku dan teman-teman KASUM, juga melakukan investigasi. Kami berusaha memetakan jejak sang pilot. Melalui berbagai penelusuran, terungkap bahwa Pollycarpus memiliki hubungan dengan para pejabat BIN. Sosok satu ini diketahui berada di berbagai daerah titik panas seperti Papua, Timor Leste, dan Aceh. Sebuah fakta yang tidak biasa dalam dunia profesi pilot.

Polly sendiri, dalam persidangan, mengaku bahwa dia pernah tinggal cukup lama di Papua. Katanya, dia bertugas sebagai pilot missionaris sebelum bekerja di Garuda. Mungkin kebetulan, mungkin juga tidak, keberadaan Polly di Papua ternyata bersamaan dengan Muchdi PR yang waktu itu menjadi Komandan Kodim 1701 Jayapura pada tahun 1988-1993. Lalu, Muchdi menjadi Kasrem Biak 173/ 1993-1995. Melihat rekam jejak ini, patut diduga, pada periode itulah perkenalan pertama sang pilot dengan sang jenderal.

Indra Setiawan, saat itu menjabat Direktur Utama Garuda, mengakui mengingat nama Pollycarpus karena khas dan unik. Pada 22 November 2004, ketika kami meminta keterangan kepada Indra.

Aku: “Apakah ada yang namanya Polly di Garuda?”

Indra menjawab dengan cepat: “Oh ya. Ada. Namanya Pollycarpus.”

Aku: “Bapak *kok* hafal padahal karyawan bapak lebih dari 7000 ?”

Indra: “Ya, soalnya namanya khas dan unik. Kalau namanya Slamet, saya pasti lupa.”

Belakangan, dalam persidangan, baik sebagai saksi atau pun ketika ditetapkan sebagai terdakwa pada tahun 2007, terungkap bahwa Indra mengingat Polly karena alasan khusus. Alasan yang berkaitan dengan BIN.

Polly merangkap pilot dan bagian pengamanan penerbangan (*aviation security*) atas permintaan BIN. Sebuah alasan yang masuk akal. Jika BIN yang meminta, kendati tidak benar secara prosedur, maka pihak Garuda tidak bisa menolak.

BIN mengeluarkan permintaan tersebut dalam surat yang ditandatangani Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali. Pada saat itu Kepala BIN dijabat oleh Hendropriyono –sosok yang selama ini sangat dekat dengan berbagai kasus yang diadvokasi almarhum.

Surat yang diteken As’ad patut diduga menjadi petunjuk bahwa rencana pembunuhan Munir melibatkan para petinggi BIN, bukan hanya Muchdi, tapi juga Hendropriyono. Apalagi, sesuai pengakuan agen BIN Ucok alias Empi alias Raden Patma dalam persidangan Peninjauan Kembali, Deputy II Manunggal Maladi dan IV Johannes Wahyu Saronto BIN juga diduga terlibat.

Serangkaian persidangan kasus pembunuhan Munir begitu melelahkan. Tak hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Betapa tidak, pada tingkat Mahkamah Agung, Pollycarpus hanya dihukum dua tahun. Polly hanya dinyatakan bersalah melakukan

pemalsuan surat, bukan pembunuhan. Semua ini tentu merupakan pukulan sendiri buatku.

Jantungku sakit sekali ketika aku mendengar putusan untuk Polly. Aku merasa kehilangan untuk yang kedua kalinya, kehilangan Munir dan kehilangan keadilan itu sendiri.

Bagaimana mungkin fakta-fakta yang begitu mencolok diabaikan begitu saja oleh hakim-hakim itu? Bagaimana mungkin keadilan hukum bisa kuraih jika dipenuhi oleh manusia tanpa hati nurani?

Dua dari tiga hakim yang membebaskan Pollycarpus dari dakwaan pembunuhan itu memiliki latar belakang sebagai tentara. Keduanya adalah purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal. Tak heran, beberapa pihak menduga, ada semangat korps dalam penanganan kasus ini sehingga menguntungkan Pollycarpus.

Kesedihan sama sekali tidak membuatku surut. Aku yakin pasti masih banyak aparat penegak hukum mempunyai hati nurani. Masih banyak yang peduli pada keadilan dan kebenaran. Ini terbukti dalam putusan pengadilan kasasi pada tanggal 25 Januari 2008 Pollycarpus dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun atas dakwaan pembunuhan berencana dan pemalsuan surat tugas.

Selesai? Belum. Misteri pembunuhan Munir masih jauh dari terungkap. Terungkap dari persidangan, juga keputusan pemidanaan Polly, ada mesin intelijen yang bekerja dengan jahat menghabisi nyawa Munir. Ini jauh lebih penting ketimbang sekadar menghukum Polly. Dia hanya pelaku lapangan, bukan orang yang secara sistematis menggunakan kekuasaan dan kewenangan dalam melakukan pembunuhan ini.

Tragisnya, sampai hari ini proses meraih kebenaran dan keadilan siapa di balik pembunuhan Munir masih terseok-seok. Tabir misteri belum tersingkap.

Benar, ada perkembangan baru dengan ditangkapnya Muchdi Purwopranjono, pada 19 Juni 2008. Jenderal bintang dua ini diduga kuat berada di balik pembunuhan Munir. Saat ini proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedang berlangsung untuk membuktikan dugaan tersebut ¹.

Yah, aku berharap persidangan ini berlangsung adil. Kejahatan para pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selayaknya dibawa ke pengadilan. Namun, kecemasan selalu hadir. Adakah keadilan akan berpihak kepadaku?

Aku berharap masih ada jaksa dan hakim handal yang mengedepankan hati nurani ada di pengadilan ini. Meskipun aku juga dalam keraguan seperti jutaan rakyat Indonesia yang selama ini terus menuai keraguan terhadap jaksa dan hakim-hakin yang tidak kredibel itu. Dan yang tak kalah penting adalah *political will* pemerintah mengingat bawahannya adalah Ka Polri, Ka Jagung, dan Ka BIN yang berperan penting dalam penuntasan kasus ini. Tentu saja harapan tertinggiku pelaku sesungguhnya segera ditangkap, siapa pun dia.

Perjalanan meraih keadilan begitu berliku. Satu hal yang paling aku syukuri adalah begitu banyak sahabat yang mendukung perjuangan pencarian keadilan ini. Teman-teman di KASUM dan tak sedikit sahabat yang secara pribadi memberiku kekuatan untuk terus berjuang.

Tak jarang teror hadir. Ada ancaman datang dari mereka yang ingin memadamkan pencarian keadilan ini. Bahkan statusku

¹ Pada 31 Desember 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Muchdi Purwopranjono bebas dari tuduhan membunuh Munir.

sebagai ibu juga menjadi bagian empuk untuk diserang oleh mereka. Tuduhan keji pencarian keadilan itu dianggap pencarian popularitasku...sungguh menyakitkan. Yakin bahwa itu adalah suara para pelaku aku tetap meneruskan langkah. Dan syukurlah, di saat-saat begini, sahabat-sahabatku setia mendampingi dan menguatkan.

Desakan penuntasan kasus Munir dari dalam negeri cukup kuat. Pada 7 Desember 2006, Tim Munir DPR RI mengeluarkan rekomendasi agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang baru. Berbagai kelompok masyarakat sipil pun terus mempertanyakan kasus Munir. Mereka datang dari berbagai kalangan, antara lain lembaga swadaya masyarakat, akademisi, petani, buruh, seniman, wartawan, dan berbagai profesi lainnya.

Tak hanya dari dalam negeri, dukungan juga datang dari segala penjuru dunia. Pada 9 November 2005, misalnya, 68 anggota Kongres Amerika Serikat mengirimkan surat kepada Presiden Yudhoyono agar segera mempublikasikan laporan TPF. Anggota Kongres AS tersebut mempertanyakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menuntaskan kasus Munir.

Pada September 2006, saat KTT ke-6 ASEM (The Asia-Europe Meeting) di Helsinki, Finlandia, kasus Munir menjadi salah satu sorotan peserta. Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso, peserta penting dalam konferensi tersebut, mempertanyakan kelanjutan pengusutan kasus Munir langsung kepada Presiden Yudhoyono.

Philip Alston, *UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions*, juga telah menyatakan kesediaannya untuk ikut membantu pemerintah Indonesia dalam mengusut kasus Munir. Pelapor khusus, yakni Hina Jilani (*Human Rights Defender*) dan Leandro Despouy (Kemandirian Hakim dan Pengacara), juga

telah menyatakan keprihatinan akan kasus Munir di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa.

Pada 26 Februari 2008, Deklarasi Parlemen Uni Eropa meminta pemerintah Indonesia serius dalam menuntaskan kasus Munir. Bahkan, 412 anggota parlemen yang menandatangani deklarasi ini meminta Uni Eropa memonitor kasus ini sampai tuntas.

Mengalirnya dukungan tersebut mestinya membuat pemerintah tidak usah ragu. Siapa pun di balik kekejian ini harus diungkap, tak peduli jika penjahatnya itu adalah orang kuat. Dukungan bagi pemerintah telah mengalir, secara hukum dan politik. Tinggal perintah dari sang presiden untuk memastikan kepolisian tetap bekerja mengusut kasus ini sampai terungkapnya sang aktor utama. Presiden juga hanya perlu memerintahkan Jaksa Agung untuk bekerja profesional. Hanya itu....

Presiden Yudhoyono pernah menyatakan bahwa pengusutan kasus pembunuhan Munir adalah ujian bagi sejarah bangsa. “*Test of our history*,” kata Pak Presiden. Jadi, aku, rakyat Indonesia dan komunitas internasional menunggu bukti perkataan itu. Aku menunggu pengusutan misteri ini sampai pada aktor utamanya, bukan hanya aktor pinggiran saja. Negara harus bertanggung jawab atas semua pelanggaran HAM yang telah terjadi.

Bagiku, Munir adalah cahaya yang tidak pernah padam. Kesan ini semakin mendalam terasa setelah kepergiannya. Munir beserta semangatnya telah memecahkan ketakutan yang mencekam, menciptakan budaya demokrasi, memberi harapan penegakan HAM. Semua yang Munir lakukan menjadi inspirasi bagiku dan teman-teman penggerak demokrasi di negeri ini. Niscaya, semangat itu diteruskan oleh para pencinta keadilan dan kebenaran dengan tanpa henti.

Ya Allah, aku bukan Sayidina Ali yang Kau beri kemuliaan. Aku hanya manusia biasa dan aku memohon kepadaMu sebab aku meyakiniMu. Berilah kemudahan bagi kami untuk mengungkap pembunuhan ini. Beri kami kekuatan untuk menjadikan kebenaran sebagai kebenaran sesuai perintahMu. Menjadikan keadilan sebagai tujuanku seperti tujuan menurutMu.

Ya Allah, aku tidak menjadi manusia yang lebih dari yang lain dengan berbagai ujian yang Kau berikan, seperti Kau muliakan Nabi Muhammad dengan berbagai ujianMu. Aku hanya minta menjadi manusia biasa dan dapat mengungkap kasus ini. Amin.

Jakarta, September 2008

FATAMORGANA DI NEGERI JIRAN

Oleh :
Yunita Rohani

Semua berawal pada Juni 2003.

Setelah lima bulan menganggur, hatiku tergerak juga. Dulu, sewaktu usiaku masih 14 tahun, belum punya Kartu Tanda Penduduk (KTP), seseorang pernah mampir ke rumah dan menawariku untuk bekerja di luar negeri. Karena masih di bawah umur, aku menolak.

Tapi Juni 2003, keadaan sudah lain. Aku telah lulus Sekolah Menengah Pertama PGRI Danujaya II, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Tanpa pekerjaan. Tak ada lagi sekolah. Orang tuaku, yang cuma petani kecil, tak punya uang untuk melanjutkan pendidikan putrinya.

Suatu hari, seorang sponsor atau calo kerja datang berkunjung ke rumah kami di Dusun Buana Sakti, Batanghari, Lampung Timur. Calo ini juga seorang guru sekolah dasar di desa saya. Entah ia mengajar mata pelajaran apa, yang pasti ia berasal dari desa tetangga, Desa Adiwarno Batanghari, Lampung.

Ia berbicara dengan bapakku. “Saya dengar anak bapak belum bekerja dan sudah lulus sekolah, *gimana* kalau kerja ke luar negeri saja?” begitu ia membuka pembicaraan.

Ia tak membawa surat tugas, tapi mengaku diutus oleh PT Bahana Trimitra Selaras, perusahaan penyalur tenaga kerja. “Kamu gak usah takut, banyak yang ikut saya, semua pada sukses,” katanya.

Orang tuaku menyerahkan sepenuhnya keputusan padaku. Tapi, aku tahu sebenarnya kedua orang tuaku setuju. Bekerja di luar negeri berarti gaji tinggi dan ada kemungkinan aku akan mengubah kehidupan ekonomi keluarga nanti.

”Kamu nanti di sana enak kerjanya. Kerja di toko atau menjadi pembantu rumah tangga,” kata guru itu. “Kalau sudah selesai kerja kamu bisa nonton tv dan bisa tidur siang, nanti kamu saya bawa ke PT untuk diproses dan kamu mau kan di-*trening*?”

Trening? Saya tak mengerti maksudnya. “*Trening* itu kerja di luar PT, nanti kamu juga digaji, sambil nunggu terbang. Tapi, kamu nggak boleh kabur ya?” bapak guru itu menjelaskan. Saya mengangguk setuju.

Lalu ia menyuruhku cepat ke Jakarta. “Tak usah bawa apa-apa, cukup KTP,” katanya. Saya pun ke Jakarta, menuju kantor PT Bahana Trimitra Selaras.

Di kantor itu, seorang staf yang bernama Susi mendata. Tiga hari di sana, aku menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan fit.

Tapi, malam harinya aku merasa tidak tenang dan nggak nyaman. Aku menangis sendiri. Calo yang mengantarku masih berada di kantor itu. Dia mencoba menenangkan diriku dengan janji-janji. Ya, janji yang akhirnya tidak pernah menjadi kenyataan.

Aku mencoba tenang, di dalam PT yang sangat tertutup itu. Banyak calon pekerja yang jatuh sakit di dalam ruang yang pengap itu. Kami dilarang keluar, mereka takut kami kabur.

Sambil menunggu keluarnya paspor, kami belajar banyak. Bahasa Inggris, belajar kata-kata sifat, kata kerja, kata benda, apa bahasa

Inggrisnya menutup pintu, terus berlatih tanya-jawab. Di Balai Latihan Kerja (BLK), kami belajar memasak, menyeterika, cara mengurus bayi, mengemas rumah, dan lain-lain.

Aku sebenarnya ingin masuk ke Singapura. Tapi karena terlalu lama menunggu di PT itu —hampir empat bulan—aku memilih tujuan lain: Malaysia.

Sejak itu aku di-”trening” di tempat teman pemilik PT Bahana. Saya bekerja mengasuh anak dan membersihkan rumah. Orangny sudah nenek-nenek, sangat cerewet dan keras kepala.

Setiap pagi pukul 04.00, pintu kamar digedor kuat-kuat. Ia membangunkan orang, sambil mulutnya memaki-maki, “Hey, bangun...!!! Orang lain sudah pada kerja, lu masih molor dasar babi. Setan lu orang semua, cepat bangun!”

Makian senada juga terdengar manakala kami melakukan sedikit kesalahan. Aku mencoba bertahan sekuat-kuatnya. Kalau aku sampai mengeluh macam-macam, PT Bahana akan menahanku lebih lama.

Ada 26 hari aku di- *trening*. Lalu, saya pulang. Menunggu seminggu lagi sebelum akhirnya visa turun juga.

Begitu ada visa, segera kutandatangani perjanjian kerja. Isinya hampir tak kuingat lagi. Intinya, aku memberi persetujuan akan digaji RM 400 per bulan, dengan potongan gaji selama enam bulan. Aku juga harus berjanji tidak akan kabur dan tidak akan memutuskan hubungan kerja sebelum masa kerjaku genap dua tahun.

Pekerjaanku sederhana, mengurus tiga anak di rumah tangga. Majikanku bernama Ng Tiam Kiat. Alamatnya No 30 Jln.

Kampong Telok Gong, 42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Hati ini meluap-luap oleh kegembiraan. Penantian lima bulan ini berakhir sudah. Angan-anganku melambung tinggi sekali.

Tanggal 24 Mei 2004, aku sudah berada di negeri impian: Malaysia. Umurku baru lima belas ketika itu. Impianku melambung.

Aku berangkat bersama lima orang teman. Kami berbeda agensi. Mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur, seseorang menjemput empat teman itu. Tapi aku harus menunggu sampai akhirnya seorang utusan agensi *Asal Bahagia* menjemputku keesokan harinya.

Tiba di kantor, seorang staf mendekatiku. Ia hanya mengizinkanku membawa separuh pakaianku, mengganti koporku dengan tas dari agen. Ia meminta alamat PT Bahana, tempat aku didaftarkan. “Kamu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan PT Bahana. Karena sudah di sini, urusan kamu sekarang dengan agen ini,” katanya.

Aku mulai merasakan keanehan, sesuatu telah berjalan di luar rencana, tapi aku takut bersuara. Tempat kerjaku ternyata sebuah industri rumahan, gajinya RM 400 dengan potongan selama enam bulan. Tepatnya di Pabrik Vegetarian Food Supply. Alamatnya sama dengan yang di passport, tapi nama majikannya berbeda. Namanya Ng Ah Seng. Gaji yang kuterima ternyata hanya RM 380.

Sampai di pabrik aku langsung bekerja. Di situ sudah ada empat buruh asal Indonesia.

Dua bulan bekerja aku mengalami kecelakaan, tanganku masuk mesin penggiling tahu atau tauki. Empat jariku luka, dua di

antaranya patah. Ya, aku memang tidak siap bekerja di sana. Selama di PT aku tidak pernah belajar cara menggunakan mesin. Aku hanya tahu mengurus anak dan mengemas rumah, selayaknya pembantu rumah tangga.

Seorang karyawan mengantarku ke klinik. Dokter memutuskan jariku harus diamputasi. Tapi karena majikanku menginginkanku terus bekerja, ia menolak anjuran dokter, dan aku dibawa ke Rumah Sakit Teunku Ampuan Rahimah Klang. Di sana majikan hanya menunggu di pintu masuk, karena ia bukan majikan yang namanya tertera dalam pasporku. Sedangkan aku hanya membisu seperti orang bodoh, menuruti apa yang mereka katakan.

Sore hari barulah aku di operasi. Jari yang patah dimasukkan kawat, untuk disambung kembali. Lima hari lima malam aku menjalani rawat inap sendirian, tanpa ada seorang pun yang menjenguk — kecuali teman kerja yang terus menjagaku di sepanjang hari pertama. Tak tahu siapa yang menanggung biaya pengobatan ini, yang jelas majikanku datang menjemput ketika masa pemulihan berakhir.

Sepulang dari rumah sakit, aku langsung ke pabrik. Bekerja lagi. Kejadian itu seperti terlupakan begitu saja. Aku bekerja dengan tangan kanan yang masih terasa sakit. Ya, masih dengan jam kerja di atas ketentuan – kadang sampai 20 jam sehari, dengan kondisi kerja, makan, dan tidur di bawah standar.

Sebulan kemudian, aku *check up*. Tak heran, hasilnya buruk. Jari tengahku tak bisa disambung lagi. Kalau tidak mau membusuk, harus diamputasi.

Aku hanya bisa pasrah, dan banyak berdoa ketika masuk rumah sakit yang sama untuk menjalani operasi itu. Empat hari aku

menginap di sana, sendirian. Orang tua di kampung tidak tahu-menahu kejadian yang kualami. Sejak awal aku dilarang berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia.

Aku sering menangis, kadangkala merasa menyesal kenapa harus ke luar negeri, meski aku yakin ada hikmah di balik semua ini.

Setelah diperbolehkan pulang, majikan menjemput, dan aku kembali menjalani rutinitas. Aku bekerja lagi.

Pernah suatu waktu aku dengan sembunyi-sembunyi mengirim surat ke kampung. Dua kali aku melakukan hal ini dan mendapat balasan dari keluarga. Tentu aku sangat bersukacita, tapi itu tak berlanjut karena majikanku tahu. Berdasarkan nomor yang kucatatkan di dalam surat, orang tuaku pernah menelepon pabrik. Tapi mereka menjawab: aku sudah tidak bekerja di sana lagi.

Perlu diketahui, di negeri itu aku tidak memegang uang. Gajiku tidak dibayarkan per bulan. Jika ada kebutuhan untuk membeli baju atau perlengkapan wanita, aku harus bilang kepada majikan perempuan. Dan itu pun harus dikawal sekuriti pabrik.

Bekerja di sana seperti mesin, tanpa bertanya, tanpa libur mingguan. Kami libur hanya pada hari besar, dan itu pun hanya satu hari.

Singkat cerita, dua tahun masa kontrak itu hampir berakhir. Tapi majikanku rupanya lebih menghendaki aku tetap bekerja di pabriknya. Enam bulan sebelum kontrak habis, ia menghampiriku dan bertanya, “Kamu masih mau kerja atau pulang?”

Melihat aku ragu-ragu, ia melanjutkan, “Gak usah pulang lah, kamu pulang mau ngapain? Di Indon gak ada kerja, lagian uangmu

belum banyak. Kerja saja dulu di sini.” Aku termakan rayuannya. Aku setuju memperpanjang kontrak satu tahun lagi.

Dan keadaan kerja tidak berubah. Belum genap setahun, aku pun sudah minta pulang. Majikanku sewot bukan buatan. “Kalau kamu mau pulang berenang sana, kamu belum punya uang, saya sudah beli kamu dari agen mahal-mahal, eh kamu tak mau kerja lagi,” katanya ketus.

Aku tak punya pilihan, tapi sekarang aku lebih pintar. Lima bulan sebelum pulang, aku sudah berani keluar pabrik dengan memanjat pagar seng. Ini terus terjadi sampai waktu aku pulang. Bahkan ada masanya, setiap malam minggu aku keluar, ke pasar malam.

Di situ aku bertemu Bapak Doyok. Ia dari Indonesia juga, tapi sudah lama tinggal bersama keluarganya di Malaysia.

Pak Doyok pedagang bakso dan mie ayam langgananku. Sewaktu isterinya berdagang di tempat lain, aku membantunya. Mula-mula sih sekedar melayani pembeli, tapi lama-lama aku pun bisa mengatakan bahwa membantu Pak Doyok adalah pekerjaan tetapku juga.

Setiap malam Minggu, usai bekerja di pabrik, aku langsung membersihkan badan, lantas menuju pasar malam. Ini berlangsung selama hampir empat bulan. Dari situlah aku mendapat uang untuk membeli perlengkapan, dari situ pula aku bisa mengabari keluarga di kampung, dan mempunyai banyak kawan orang Indonesia.

Jadi, walaupun bekerja seperti ini badan terasa capek, aku tidak peduli.

Suatu kali majikan laki-laki memergokiku di luar pabrik. Aku dimarahi habis-habisan, bahkan sampai dipukul majikan laki-laki itu. Tapi aku kini tegar.

Menghadapi semua ini, aku diam saja, dipukul pun aku tidak menangis. Mungkin karena air mataku sudah habis.

Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba.

Tanggal 24 Mei 2007, aku meninggalkan pabrik, dengan perasaan seolah-olah lepas dari kandang macan. Aku nggak tahu berapa jumlah uang yang pernah kupinjam dan belanjakan. Belum pernah aku mencatat semua itu. Yang terang aku pulang membawa gaji sebesar Rp 2.000.000 dan RM 5000.

Uang itu baru diberikan pada menit terakhir sebelum aku melangkah keluar pabrik. Begitu saja. Uang itu diikat karet gelang dan dibungkus plastik. Tak ada rincian tentang jumlah pinjamanku selama ini.

Seorang petugas agensi mengantar sampai Bandara Internasional Kuala Lumpur. Pesawat telah menerbangkan aku ke negeri asalku.

Sampai di bandara Soekarno-Hatta, aku diarahkan petugas untuk masuk ke jalur khusus TKI(Tenaga Kerja Indonesia). Di situ ada tulisan “Selamat Datang para Pahlawan Devisa.” Dengan bus, aku dan teman-teman sesama buruh migran dibawa ke Terminal 3.

Di dalam bus, petugas yang membantu mengangkat barang-barang kami minta uang. Bahkan petugas yang mengangkat kopor-kopor besar kemudian minta uang lagi. Saya transit di Terminal 3 karena penerbangan ke Lampung belum ada.

Terminal 3 sama sekali bukan tempat yang nyaman. Di sana terjadi banyak penipuan dan pemerasan. Secara tak sengaja aku melihat pemerasan fisik, juga pelecehan seksual. Ada yang tubuhnya dipegang-pegang.

Di terminal itu, tak ada tanda-tanda penghargaan bahwa kami pahlawan devisa. Para pejabat mengambil keuntungan, pemerintah hanya mempedulikan devisanya, bukan yang menyumbang devisa.

Sampai di rumah, ibuku langsung menangis histeris melihat jari saya yang hilang satu. Selama tiga tahun mereka tak mengetahui sama sekali keadaanku di sana. Sedih, tapi hatiku senang berada di kampung sendiri.

Lima bulan setelah tinggal di rumah, barulah aku sadar bahwa banyak hakku yang tidak dipenuhi. Aku bergabung dengan SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), di Jakarta Timur.

Aku belajar banyak hal di SBMI, termasuk tentang asuransi. Ya, dari situ aku tahu bahwa biaya pengobatanku dulu ditanggung asuransi yang diberikan PT Bahana. Majikanku menggunakannya untuk menutup biaya pengobatan.

Di SBMI aku menyadari bahwa perbaikan nasib buruh migran tidak datang begitu saja, melainkan harus diperjuangkan. Buruh migran harus berani menolak, mengemukakan pendapat, karena kita bukan barang dagangan.

Jakarta, Agustus 2008

JALAN PANJANG DI TANJUNG DUREN

Oleh :
Suparmi

Tak pernah terlintas dalam mimpi bahwa kami akan tergusur dari rumah kami. Rumah yang bata demi bata kami susun dengan susah payah.

Kami, 625 Kepala Keluarga, sejak tahun 1996 menempati lokasi lahan tidur di Kampung Sawah, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sejak awal mendirikan bangunan rumah, tidak pernah ada teguran atau larangan dari pemerintah setempat.

Penghuni di sini berasal dari berbagai suku, Jawa, Batak, Minang, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa aparat pemerintah yang juga tinggal di Tanjung Duren. Kami menempati lahan tidur ini sejak masih berupa rawa-rawa. Kami merawat dan menatanya hingga menjadi areal produktif. Bahkan kami telah mampu mengurus masuknya saluran air bersih (PDAM), listrik, dan telepon secara resmi.

Kebanyakan dari kami mampu membangun rumah semi permanen, termasuk rumah saya. Lantai peluran semen, dinding separo tembok, dan atap seng atau asbes. Ada juga rumah permanen dengan dinding tembok penuh, lantai keramik, atap genteng atau asbes dengan langit-langit eternit.

Ada banyak kenangan di rumah kami. Inilah tempat kami berkumpul dengan anak-anak, saudara, dan kerabat. Warga kampung juga sering berkumpul, baik untuk sekedar berkumpul atau untuk membicarakan persiapan peringatan HUT RI. Acara tujuh belasan, tidak pernah ketinggalan, selalu diperingati dengan meriah. Ada macam-macam perlombaan dan panggung hiburan rakyat.

Sebelum digusur, sebagian warga di wilayah kami adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jadi, kawan-kawan kader PDIP ini pun sering berkumpul di rumah kami, misalnya untuk membuat Kartu Tanda Anggota PDIP.

Lalu, datang hari nahas itu. Pada 7 September 2003, seseorang yang mengaku sebagai pemilik lahan datang, namanya Agustina Munawar. Warga meminta Agustina agar menunjukkan dokumen asli kepemilikan lahan, tapi Agustina tidak pernah menunjukkan diri dan dokumen yang diminta kepada warga.

Menanggapi tuntutan Agustina, warga bermusyawarah bersama tokoh masyarakat dan pimpinan kampung. Kami bertekad mempertahankan rumah dan wilayah tempat tinggal kami. Serta kami sepakat menolak penyelesaian yang ditawarkan dengan pemberian uang kerohiman sebesar Rp 500.000 untuk setiap rumah.

Hal ini ditanggapi Agustina Munawar dengan mengerahkan massa preman bayaran. Warga pernah diancam oleh para preman. Jika dalam jangka waktu 2 X 24 jam rumah tidak dikosongkan, maka rumah akan dibakar, dibongkar paksa, listrik diputus, air dimatikan. Berbagai kelompok pemuda juga dikerahkan untuk meneror dan mengusir paksa warga. Preman-preman itu menggunakan berbagai senjata tajam, pentungan, bahkan ada yang membawa *bécéng* (pistol).

Anehnya, perilaku para preman di lapangan ini justru dibiarkan oleh aparat Kepolisian. Warga melancarkan protes kepada Kapolsek Tanjung Duren yaitu Suparmin dan Camat Grogol Petamburan yang namanya Sukarna, tapi tak ada tanggapan.

Kami berjaga-jaga siang-malam untuk menghadapi segala macam bentuk ancaman teror dari para preman bayaran. Situasi ini

semakin meresahkan warga dan tidak tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Tepat pada hari Kamis 2 Oktober 2003 pukul 11.05 WIB, datanglah saat yang buruk itu. Beberapa kompi pasukan kepolisian dari Polres Jakarta Barat yang terdiri dari brimob, intel, reserse, polwan bersenjata lengkap bersama aparat kodim, hansip, trantib, dan preman yang juga bersenjata tajam, melakukan penyerangan terhadap warga dan mengusir secara paksa. Terjadilah bentrokan besar antara aparat gabungan dengan warga. Akhirnya warga mundur, sebab banyak yang terkena peluru karet dan gas air mata.

Bekho (alat berat) masuk ke lokasi pemukiman untuk menghancurkan secara paksa rumah-rumah warga. Kami “lumpuh” tidak berdaya lagi untuk menghalau tindakan tersebut. Kami hanya bisa menangis histeris, mengingat rumah yang telah bertahun-tahun dibangun dengan keringat dan usaha sendiri tanpa minta bantuan pemerintah.

Rumah habis, rata dengan tanah. Kami bertahan dengan tenda-tenda darurat yang didirikan di lokasi bekas rumah. Sebagian besar warga terlokalisir di area sekitar gedung eks Bank Dewa Ruci yang masih berdiri kokoh. Ada juga warga yang bertahan dengan tenda darurat yang didirikan di Halte Bus pinggir Jalan Raya S. Parman.

Warga membuat dapur umum yang dikelola dan yang dipimpin Ibu Nurhayati Manurung dan Ibu Manulang. Selang beberapa waktu kemudian, warga baru tahu kalau Ibu Nurhayati adalah Kader Partai Buruh pimpinan Mochtar Pakpahan, bahkan masuk dalam daftar calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2004. Perjuangan warga yang tulus ini menjadi “ternodai” oleh intrik-intrik politik sesaat.

Meskipun demikian warga tidak putus asa untuk berjuang dan mencari dukungan publik. Kami meluaskan jejaring dengan komunitas gusuran lainnya, seperti Komunitas Warga Gusuran di Jembatan Besi – Jakarta Barat, Cengkareng Timur – Jakarta Barat, dan Kali Adem – Jakarta Utara.

Awal tahun 2004, bantuan darurat disalurkan untuk warga korban gusuran di Jakarta. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial. Bantuan itu berupa uang Rp 300 ribu dan beras 50 kilogram.

Namun, terjadi keanehan dalam teknis distribusi bantuan, khususnya untuk warga gusuran Tanjung Duren. Departemen Sosial tidak membagikan bantuan langsung ke warga. Bantuan dibagi melalui Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh pimpinan Mochtar Pakpahan di daerah Pulo Asem – Jakarta Timur.

Bantuan yang sampai ke tangan warga pun sudah “disunat” dengan besaran bervariasi. Menurut Ibu Nurhayati dan pengurus DPP Partai Buruh, potongan tersebut untuk biaya pengurusan pencairan bantuan dari Departemen Sosial. Dengan kondisi ini warga makin marah namun tetap tanpa kekerasan dan memilih untuk mengadukan korupsi ini ke kantor kepolisian setempat. Pengaduan ini diproses dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib hingga akhirnya Ibu Nurhayati divonis pidana dan dipenjara di Tahanan Perempuan Pondok Bambu – Jakarta Timur.

Kehidupan warga belum tenang. Setiap harinya masih ada perlakuan kekerasan oleh aparat gabungan dan preman bayaran. Warga makin lelah dan buntu dalam memikirkan mencari penyelesaian yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Kami hanya bisa berpasrah diri dan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit, bumi, dan seisinya.

Tuhan mendengarkan doa kami, kaum tergusur. Datanglah sekelompok orang yang peduli terhadap kami kaum tertindas yang tergusur. Belakangan baru kami ketahui, bahwa sekelompok orang yang peduli ini berasal dari Sanggar Ciliwung. Dalam perjalanan, sekelompok orang inilah yang tetap setia menjadi kawan kami, kaum tergusur. Hingga kami sepakat untuk mengungsi dan sekaligus mengadakan kasus penggusuran paksa ke Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jl. Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat.

Kami telah tinggal mengungsi selama satu tahun di pelataran Kantor Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Meskipun demikian, kedua institusi tersebut tidak mampu memperjuangkan nasib kami kaum tergusur. Buntu!

Dengan segala cara kami tetap mendesak Komnas HAM sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM untuk bertindak. Kami berkeyakinan bahwa penggusuran paksa yang kami alami ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Bersama warga korban gusuran dari wilayah lain, melalui Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), kami terpaksa melakukan gugatan hukum dalam bentuk legal standing terhadap Institusi Komnas HAM. Hal ini pun tidak memberikan perbaikan hidup kami kaum tergusur yang berjuang mencari keadilan. Kembali lagi, kebuntuan yang kami temukan!

Akhirnya kami warga sepakat kembali menempuh jalur hukum dengan didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) untuk menggugat Walikota Jakarta Barat sebagai pihak yang mengeluarkan surat perintah penggusuran. Kami menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan warga dimenangkan PTUN. Walikota Jakarta Barat melakukan kasasi, proses yang masih berlangsung hingga saat ini. Pengadilan tak pernah memberi tahu kapan kepastian hukum atas kasus ini keluar. Kami justru dipingpong.

Proses Kasasi yang belum jelas penyelesaiannya ini, membuat kesabaran warga luntur. Hingga akhirnya warga berjuang untuk menguasai lahan eks tempat tinggal dengan merobohkan pagar tembok.

Tindakan ini berdampak dengan ditangkapnya 38 orang warga yang dituduh sebagai provokator oleh aparat Polres Jakarta Barat. Beberapa warga luka-luka karena bentrok dengan preman bayaran yang disewa menjaga lokasi. Warga yang berusaha mengadvokasi teman-temannya yang ditangkap ini dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum “Mawar Saron”.

Di pihak warga, ke-31 orang dipenjara dengan waktu bervariasi, paling lama dua tahun. Lima orang dibebaskan karena salah tangkap, dua warga dilepas karena masih di bawah umur. Mereka yang dipenjara adalah Darman Purba, Sayuti bin Udin, Borkat Nasution, Dedi Sitepa, Riyol Nainggolan, Basri Lubis, Sumaryono, Fendi Lubis, Parsaoran Sinaga, Rustam Haryanto Butarbutar, Wahyono Lubis, Agus Susilo, Hari Hardiansah, Ramidun Sihombing, Ardiman Silaban, Havis Muafa Sanusi, Sukarman, Hamdan Trina Jayadi, Kahar Rambli, Muhammad Imbalo Nasution, Nassruloh Parlindungan, Sabam Nainggolan, Adi Maulana, Dadi, Adi Wijaya, Maruli Sinaga, Zakaria, M. Syafei Sianipar, Faisal Tanjung, Andre Vattemina, dan Muhammad Suharto.

Biarpun dipenjara, kawan-kawan tetap bangga karena ini bagian dari perjuangan untuk membela hak yang telah dirampas penguasa. Bahkan Pak Sukarman yang biasa kami panggil Pak

Uban, “Saya rela masuk penjara, demi perjuangan untuk keadilan dan keselamatan orang banyak.”

Warga secara rutin dan sukarela mengumpulkan dana untuk membantu para keluarga yang ditinggal masuk penjara. Setiap minggu juga selalu ada perwakilan warga yang menjenguk di penjara. Sumaryono, seorang warga yang dipenjara, berkata, “Penderitaan lahir batin terpisah dari anak, istri, saudara, makan terlantar, begitulah perjuangan yang harus kami jalani bersama kawan–kawan untuk melawan ketidak-adilan pemerintah yang telah bersetubuh dengan pemodal.”

Kami juga melobi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan didampingi Kantor Pengacara Jasmin Damanik. Sayang, DPR RI pun tidak mampu memanggil Pengembang atau orang yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Gubernur DKI Jakarta juga kami hukungi. Nol, tidak ada komentar. Walikota Jakarta Barat menyebut kami sebagai warga liar. Presiden juga gagu dan bisu.

Kami belum patah semangat dan terus melangkah berjuang! Saat ini kami warga dengan didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) sedang merencanakan mengambil putusan kasasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Sebelum digusur kami sudah mengadu ke Komnas HAM dan DPRD DKI Jakarta. Tapi, tetap saja digusur. Memang itulah kenyataan hidup orang miskin, selalu diposisikan dalam ketidakberdayaan dan kebodohan. Pemerintah tidak mau membimbing rakyatnya menjadi pandai. Rakyat seperti kami terus menerus dimiskinkan dan dilemahkan secara politik.

Sejak tahun 2003, bersama dengan warga korban gusuran dari wilayah lain di Jakarta, kami membentuk Paguyuban Warga Anti Penggusuran (PAWANG). Kami warga korban berusaha

menguatkan elemen aksi solidaritas sebagai saluran perjuangan rakyat tertindas. Kami jadi makin tahu sepak terjang kaum elit dan penguasa.

Setelah kami rasakan dan amati, setiap pemerintahan, DPR, gubernur, dan walikota masih dalam tahap belajar. Makanya mereka tidak bisa menyelesaikan kasus - kasus pelanggaran HAM. Perjuangan warga korban penggusuran Tanjung Duren ini telah kami tempuh dengan berbagai macam cara tetapi belum mendapatkan hasil yang berkeadilan. Malah perjuangan kami ini cuma ditertawai oleh para pejabat.

Semoga tulisan kami, yang tidak berpendidikan ini, bisa dibaca oleh siapa pun. Karena perjuangan kami sampai detik ini pun belum selesai. Kami masih terus berjuang sampai terwujudnya keadilan bagi rakyat tertindas seperti kami. Meskipun sulit, kami siap menempuh perjuangan ini. Sekali lagi, kami akan terus berjuang.

Terima kasih.

Jakarta, September 2008

MENJAGA DAMAI DI POSO

Oleh :

Netty Kalengkongan

Poso, kotaku sayang, identik dengan kengerian dan ketakutan. Perjalanan kota kecil ini begitu lekat dengan tragedi konflik berdarah. Aku adalah bagian dari perjalanan yang kelam itu.

Segalanya berawal pada tahun 1998. Hanya lantaran perkelahian antar pemuda kebetulan berbeda keyakinan, Islam dan Kristen, maka pecalah konflik berdarah yang berkepanjangan. Saya ingat, hari-hari itu dipenuhi dengan suara tembakan, teriakan, tangisan menyayat, bahkan dentuman bom. Luka-luka bekas bom, dinding-dinding yang bolong, pun hingga kini masih tampak di berbagai sudut kota.

Puncak kekacauan bagiku terjadi pada tahun 2001. Ketika itu, hanya dalam tempo 36 hari, aku harus kehilangan dua orang yang sangat kukasihi. Mereka sedikit dari begitu banyak korban sia-sia dalam konflik berdarah ini.

Pertama, 12 September 2001, adikku, Henit Kalengkongan, 28 tahun, hilang di desa Tabalu kecamatan Poso Pesisir. Saat itu adikku sedang mengawal mobil tangki minyak tanah. Mobil tangki ini adalah pasokan dari Poso dan isinya akan di jual di Desa Kasiguncu, tempat tinggal kami.

Henit, adikku sayang, tak pernah pulang ke rumah sejak hari itu.

Tidak lama berselang, tepatnya 18 Oktober 2001, suamiku mengalami hal yang sama. Kamis yang kelam, Towelemba Kalengkongan, 34 tahun, suamiku, ketika itu mengendarai mobil

kanvas berisi barang-barang dagangan dari Desa Kasiguncu menuju Desa Tangkura – tempat pengungsian.

Dua orang aparat keamanan menemani perjalanan suamiku. Ini biasa dilakukan karena situasi memang belum aman. Tak disangka, pengamanan itulah yang berbuah petaka untuk suamiku.

Kamis sore, aku mendengar ada mobil yang dibakar warga di Desa Tabalu. Seorang penduduk di Desa Tangkura bahkan mengabarkan bahwa itu mobil suamiku. Secepat mungkin aku bergegas meminta petugas keamanan yang bertugas di posko untuk mengantarku ke Desa Tabalu. Tapi, aparat tidak mengizinkan ke sana dengan alasan situasi keamanan tidak memungkinkan.

Aku tahu suamiku sudah meninggal. Dengan segala usaha aku tetap memohon agar diizinkan untuk melihat kerangka mobil itu. Aku harus mencari jasad suamiku. Namun, sekuat apa pun usahaku, tetap saja tidak membuahkan hasil. Para petugas keamanan menahanku. Mereka berjanji, merekalah yang akan ke Tabalu dan mencari jenazah suamiku.

Keesokan harinya, 19 Oktober 2001, adalah hari ulang tahun anakku yang kedua, Monika Willelipu. Seharusnya ini hari yang bahagia.

Beberapa petugas mendatangi rumah kami. Mereka membawa kabar bahwa jasad suamiku tak bisa ditemukan. Mereka telah mengerahkan seluruh aparat keamanan dan warga desa setempat untuk mencari jasad suamiku, tetap saja tidak ketemu.

Seluruh harapanku pun hancur. Tak terbayangkan bagaimana aku harus menghidupi kedua anakku di tempat pengungsian, dalam keadaan yang serba kekurangan. Hari esok serasa gelap bagiku.

Namun, akhirnya aku sadar, yang bisa kulakukan hanyalah berpasrah diri kepada Tuhan.

Beberapa hari kemudian, setelah berembug dengan saudara-saudara, kami sepakat membuat surat berita kehilangan suamiku. Dalam surat itu kami menuliskan bahwa suamiku hilang dalam pengawalan aparat. Entah mengapa, aparat keamanan tidak mau menekan surat jika kami tetap berkeras mencantumkan bahwa suamiku hilang dalam pengawalan dua petugas keamanan. Jika tetap berkeras, kami pun dianggap memprovokasi masyarakat agar kembali berkonflik.

Aku pun menghentikan upaya pencarian jasad suamiku. Kuikhhlaskan dia. Yang terpikir olehku hanyalah bagaimana menyelamatkan hidupku dan kedua anakku. Tempat pengungsian terasa tidak aman bagi kami.

Seminggu setelah hilangnya suami, aku memboyong kedua anakku menuju kota Palu. Aku bergabung dengan saudara-saudaraku. Kami ingin menjauh dari konflik yang menyakitkan.

Konflik memang terus berlanjut di Poso saat itu. Saling serang antar komunitas masih terjadi. Bom meledak, orang hilang, warga tertembak peluru nyasar, adalah berita pagi, siang, sore, dan malam. Hari-hari berlalu dengan mengerikan. Ribuan aparat keamanan tak berdaya meredam kekacauan.

Sebulan kemudian, 21 November 2001, ada kabar tentang suamiku. Seorang aparat yang sedang memancing di sungai Puna, Kecamatan Poso Pesisir, menemukan jasad suamiku. Dia dikenali karena selembor jaket yang melekat di tubuhnya. Aparat itu ingat dia pernah bertemu suamiku yang mengenakan jaket itu sebelum peristiwa pembakaran mobil.

Kini jelas sudah. Suamiku tercinta memang telah meninggal. Harapanku bahwa suatu hari nanti dia akan kembali, kini pupus sudah.

Adapun jenazah Henit, adikku, sampai kini belum diketemukan. Konflik Poso telah merenggut orang-orang yang kukasihi.

Setelah peristiwa yang menimpa adik dan suamiku, aku tidak pernah berani kembali lagi ke Poso. Ketakutan masih saja membayangi langkahku.

Beruntung pada tahun 2004, aku bertemu kawan-kawan yang bernasib sama denganku. Saat itu aku diundang mengikuti workshop Temu Korban Pelanggaran HAM se Sulawesi Tengah yang diselenggarakan LPSHAM Sulteng, KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Jakarta, dan IKOHI (Ikatan Korban Orang Hilang).

Pada pertemuan itu aku bertemu dengan Ella, gadis muslim asal Poso yang juga menjadi korban konflik. Pertemuan ini menjadi awal keberanianku membuka diri menerima kawan senasib.

Pertemuan tiga hari itu sanggup membuka otak dan perasaanku. Aku dibuat melihat kenyataan bahwa konflik, di mana pun, selalu mengorbankan rakyat. Sejak itulah aku berjanji akan membantu saudara-saudaraku di Poso, juga yang tinggal di berbagai lokasi pengungsian di Palu. Aku ingin memberikan pemahaman kepada mereka bahwa sesungguhnya kita hanyalah korban dari konflik. Setelah workshop ini, kami mendirikan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Sulawesi Tengah (SKP HAM), tepatnya pada 13 Oktober 2004.

Kini konflik telah reda. Poso telah dinyatakan aman, meskipun ribuan aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di hampir setiap sudut kota.

Perdamaian haruslah dijaga. Caranya, antara lain, dengan diskusi-diskusi tentang perdamaian dan pentingnya memahami hak asasi manusia yang kini menjadi keseharianku. Aku belajar banyak hal tentang perjuangan menjaga perdamaian, yang antara lain dibayar dengan nyawa suami dan adikku.

Dengan keyakinan paras iman, sebagai umat Kristen, aku akan terus berupaya membangun solidaritas bersama korban-korban lain. Demi kebenaran dan keadilan untuk suami dan adikku tercinta.

Palu, 7 Juli 2008

KESETIAAN SEORANG GURU

Oleh :
Nurlela

Tak ada yang lebih membahagiakan bagi saya dibanding senyum anak-anak yang sedang bersekolah. Membantu mereka berjuang meraih masa depan adalah kebahagiaan tak terkira. Saya menjalani hari demi hari sebagai guru di SMP Negeri 56, Jakarta, dengan hati senang.

Lalu, tiba-tiba, Kamis itu ada sebuah rapat terbatas dengan kepala sekolah SMP 56. Saya diundang ikut serta. Dalam rapat itu disampaikan bahwa seorang pegawai negeri sipil (PNS), sesuai dengan sumpah jabatan, harus bersedia ditempatkan di mana saja jika dibutuhkan negara. Seorang pegawai negeri sipil tidak boleh membantah dan melawan bila sudah diperintahkan untuk berdinam mengajar di daerah tertentu. Jika membangkang, ia bisa terkena teguran, denda, bahkan sampai pencopotan status sebagai pegawai negeri sipil yang merupakan abdi negara.

Saya heran, ada apa gerangan di balik pesan ini? Rupanya SMP 56 hendak digusur dan dipindah ke Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Gedung sekolah akan *diruislag*, ditukar guling dengan gedung pusat bisnis. Lha, bagaimana bisa begitu?

Keesokan hari, selepas salat Jumat, saya, guru-guru, dan orangtua murid mengadakan rapat di aula sekolah. Dalam rapat itu, sebagian besar mereka tidak setuju agar sekolah ini dipindahkan. Mereka yang tidak setuju, antara lain, Bapak Syafi'i, mantan BP3, dan juga Bapak Sutomo, mantan kepala sekolah yang pertama.

Bapak Mulyadi Djojo Martono, selaku ketua Badan Pembantu Penyelenggaraan Pengajaran (BP3), melontarkan pertanyaan

kepada hadirin, terutama guru-guru. Dia bertanya, “Siapa, yang secara hati nurani dan tidak terpengaruh orang lain, berkeras untuk tidak mau pindah ke sekolah di Jeruk Purut?”

Dengan rasa takut mendalam, badan gemetar, dan tangan berkeringat dingin, saya memberanikan diri mengangkat tangan. “Saya, Pak.” Semua mata di ruangan menatap saya saat itu.

Dalam hati, berkecamuk berbagai hal. Sebagai seorang guru, sebagai manusia yang ingin tetap bertahan hidup, saya ingin menjaga kelangsungan pekerjaan saya demi keluarga. Namun, jika tak ada lagi yang berkeras mempertahankan sekolah ini, siapa lagi?

Bagi saya, dipecat tidaklah soal. Saya orang Betawi, bisa berjualan apa saja jika nanti tidak menjadi guru pegawai negeri sipil. Yang lebih saya khawatirkan adalah nasib anak didik. Mereka harus bersekolah di tempat yang lebih jauh, di kampung terpencil. Untuk menjangkaunya dibutuhkan biaya transport tidak sedikit, padahal sebagian besar murid berasal dari keluarga tidak mampu.

Saya juga tidak ikhlas dengan alasan kepindahan gedung. Sekolah, media mendidik insan-insan muda yang berguna bagi bangsa, harus dikalahkan gurita bisnis yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Saya juga selalu bertanya-tanya. Mengapa hanya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 56 saja yang harus dipindahkan? Sementara itu, Sekolah Menengah Atas (SMA) 6 yang terlebih dahulu akan dipindahkan malah masih bertahan. Padahal, SMA itu persis berada di depan pertokoan megah.

Tidak jauh dari kawasan itu ada juga gedung SMA Negeri 70. Sekolah saya juga bertetangga dengan SMP Negeri 12 dan SMP

Negeri 13. Kok, mereka tidak dipindahkan? Mengapa hanya sekolah tempat saya mengajar yang harus dipindahkan?

Dari sini saya mulai mencium gelagat tidak beres. Menurut informasi almarhum ayah saya, harga tanah di sekitar lokasi itu cukup mahal. Lahan Gedung Bank Bira, yang sekarang menjadi Bank HSBC, misalnya, dijual dengan harga Rp 15 juta per meter persegi.

Anehnya, tanah di gedung SMP Negeri 56 hanya dihargai Rp 2,5 juta per meter persegi sesuai harga Nilai Jual Obyek Pajak. Harga pasaran tanah di kawasan Jalan Melawai Raya ini pun Rp 5 juta per meter persegi.

Tak disangka, penolakan saya untuk pindah disambut hangat. Sebagian guru, orangtua murid, bersorak gembira menyambut keberanian saya. Terdengar teriakan, “Hidup Bu Nurlela!”

Lalu, pada hari Senin, BP3 membagikan angket kepada seluruh siswa, dari kelas satu sampai kelas tiga. Siswa yang berjumlah 1265 dimintai pendapat tentang rencana kepindahan sekolah.

Hasilnya, dari 1265 siswa, hanya 27 orang yang bersedia pindah ke Jeruk Purut. Patut dicatat pula, yang setuju kebanyakan adalah siswa kelas 3 yang memang tinggal di dekat Jeruk Purut.

Perundingan tak kunjung membuahkan hasil. Rencana kepindahan semakin menguat. Maka, pada Mei 2001, saya, guru-guru, orang tua murid, dan juga BP3 melakukan *long march* dan demonstrasi. Kami berjalan kaki dari SMP Negeri 56, di Melawai Raya, menuju kantor Departemen Pendidikan Nasional, Jalan Sudirman. Panas terik kami tak peduli.

Sayang, Bapak Yahya Muhaimin, waktu itu Menteri Pendidikan Nasional, sedang mengikuti rapat di Balai Kota Jakarta. Kami tak jadi menyampaikan aspirasi kepada Pak Menteri Yahya.

Kami menggelar orasi selama beberapa jam. Lalu, para guru dan orangtua pun kembali ke rumahnya masing-masing. Selama orasi berlangsung inilah saya melihat Bapak Rusli, bagian 'Tata Usaha SMP Negeri 56, ikut dalam kerumunan. Saya langsung menghampirinya dan bertanya, "Mengapa bapak ada di sini?" Ia menjawab polos, "Saya diutus untuk datang ke sini."

Setelah saya selidiki lebih jauh, kehadiran Bapak Rusli adalah untuk mencatat nama-nama guru yang mengikuti demonstrasi. Ini terbukti dari daftar nama guru yang kemudian dipanggil ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional. Yang dipanggil adalah guru-guru yang mengikuti demonstrasi, termasuk saya.

Pemanggilan dilakukan atas nama dinas. Jadwal panggilan kami berbeda-beda, mulai Senin sampai Jumat, sedari pukul 10 sampai pukul 1 siang.

Kami pun berkoordinasi. Kami sepakat mendatangi kantor Wilayah Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional) bersama-sama, yakni pada tanggal 30 Mei 2001. Kami membawa spanduk pernyataan sikap, "Para Guru SMP 56 tidak mau pindah ke Jeruk Purut." Namun, ketidaksetujuan kami tidak didengar.

Kami menggelar beragam cara agar pendapat kami didengar, mulai dari demonstrasi hingga mendatangi pihak-pihak terkait. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan bahkan Wakil Presiden Megawati kami datangi. Di kantor Megawati, kami ditemui Agus Yaumul Akhir, Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Namun, belum juga ada titik terang.

Berikutnya, pada 4 April 2003, BP3 dan para guru mengajukan gugatan *class action* yang berisi penolakan pindah ke Jeruk Purut. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sayangnya, pada 7 Mei 2003, para guru yang mengajar di Jeruk Purut diminta membuat surat pernyataan di atas materai. Isi surat itu menyatakan bahwa mereka tidak mewakili saya sebagai penggugat keempat. Dengan demikian, gugatan saya dianggap sebagai gugatan pribadi. Walhasil, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengalahkan gugatan saya pada bulan Desember 2003.

Melalui pengacara, saya mengajukan banding ke pengadilan tinggi pada Januari 2004. Tapi, pengadilan tinggi menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya lalu melakukan banding ke Mahkamah Agung. Namun, hingga kini belum ada kabar kelanjutan perkara ini.

Sejak penolakan pemindahan gedung, dari tahun 2001-2002, SMP Negeri 56 Melawai tidak membuka penerimaan siswa baru. Penerimaan murid baru dilakukan pada tahun 2003. Ketika itu, dari 120 murid yang mendaftar, hanya 65 siswa yang benar-benar masuk. Mereka resmi menjadi murid dengan mengikuti upacara pembukaan pada hari Senin, 19 Juli 2003.

Mereka, 65 siswa baru, dibagi menjadi 4 kelas. Para pengajar saat itu ada 10 orang yang berstatus PNS, termasuk saya. Kami dibantu beberapa guru honorer.

Kisah belum berakhir. Pada hari Senin, 19 Juli 2004, saya dipanggil Polda Metro Jaya. Status saya kali ini sebagai tersangka dan 9 guru lainnya sebagai saksi.

Cak Munir (almarhum) mendampingi saya dalam proses ini. Ia memberitahu, jika sudah pukul 5 sore, saya tidak perlu menjawab

pertanyaan yang diajukan penyidik. Jika pertanyaan penyidik dituruti, saya bisa pulang larut malam. Pada hari pertama, misalnya, saya dihujani pertanyaan sampai pukul 8.30 malam.

Saya mengikuti nasihat Cak Munir. Tepat pukul 4.30, saya beraksi. “Sudah sore, Pak. Saya tidak mau menjawab pertanyaan,” kata saya kepada penyidik.

Bukannya menghentikan proses penyidikan, polisi malah membentak saya. Menurutnya, seorang tersangka tidak berhak menentukan waktu kapan ia harus berhenti diwawancarai. Yang berhak menentukan adalah dirinya sebagai penyidik. Ia terus mengajukan pertanyaan. Saya tetap diam. Ia pun naik pitam.

Saya katakan pada petugas itu bahwa kondisi tubuh saya kurang sehat. Kepala saya terasa sakit. Mendengar keluhan ini, ia kemudian memanggil seorang dokter. Tepat pukul 5 sore, dokter masuk dan memeriksa saya. Ternyata, tekanan darah saya 160 per 100. Dokter bilang, saya harus beristirahat. Jika tidak, saya bisa pingsan.

Akhirnya, penyidik itu menghentikan pertanyaan. Saya diperbolehkan pulang, sama seperti pada hari pertama, pukul 8.30.

Pada hari Rabu, hari ketiga pemanggilan. Saya diberi waktu beristirahat. Tak ada pemeriksaan. Esoknya, Kamis, saya kembali datang ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan. Lagi-lagi, saya pulang ke rumah pada pukul 9.30 malam.

Saya memang tidak harus mendekam di tahanan selama menjalani proses penyidikan, tidak seperti tersangka pada umumnya. Cak Munir menjamin saya, sehingga saya boleh pulang ke rumah.

Selama menjalani proses penyidikan di Polda Metro Jaya, saya tetap mengajar seperti biasa. Pukul 7 sampai 12, saya mengajar di sekolah. Lalu, satu jam saya pergunakan untuk menuju ke Polda Metro Jaya. Proses penyidikan dimulai pada pukul 1 siang hingga malam hari. Proses yang melelahkan.

Banyak pihak mendukung saya. Tidak sedikit pula yang meminta saya untuk tidak ditahan. Dukungan antara lain datang dari Masyarakat Peduli Pendidikan (MPP) yang berdemonstrasi di pintu gerbang Polda Metro Jaya.

Keluarga besar juga mendukung saya. Kakak dan tujuh adik saya terus-menerus menguatkan hati saya. Dua anak lelaki saya juga begitu. Mereka menyerahkan segala keputusan dan mendukung perjuangan saya.

Hanya Puput, anak perempuan saya yang duduk di kelas tiga SMP, yang tampak kurang mendukung. Katanya, dia khawatir kalau saya dipenjara dan Puput tidak bisa untuk meneruskan ke jenjang SMA. Untunglah, kekhawatirannya yang berlebihan bisa saya tenangkan, “Puput jangan takut, Insya Allah Puput bisa sekolah terus.”

Akhirnya, Puput berubah pikiran. Terlebih lagi dengan seringnya saya diwawancarai oleh koran, majalah, dan televisi, banyak teman Puput yang salut atas perjuangan saya. Puput pun mendukung perjuangan saya. Suatu hari, sepulang sekolah, Puput berkata, “Mama teruskan saja perjuangan Mama. Puput dukung perjuangan Mama, Mama ada di pihak yang benar kok. Puput yakin sekali Mama tidak bersalah.” Anakku.....

Setelah satu bulan lebih, proses penyidikan berakhir. Saya diwajibkan lapor kepada Polda Metro Jaya setiap Senin dan Kamis, sampai bulan Desember 2004.

Sampai di sini, ujian yang saya alami belum juga berujung. Pada Senin 13 Desember 2004, saya sedang mengajar di depan gedung kosong di seberang hotel Melawai. Ketika itu datang pengacara yang selama ini mendampingi saya selama proses penyidikan. Ia membawa sepucuk surat.

Surat dari Kepala Tata Usaha Jeruk Purut itu bertanggal 6 Desember 2004. Betapa kaget saya ketika membaca isi surat yang diteken Gubernur DKI Sutiyoso itu. Saya dipecat!

Ini aneh bin janggal. Saya diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 1990 oleh menteri pendidikan nasional. Tapi, mengapa ini yang memecat saya adalah Sutiyoso, Gubernur DKI? Bukankah surat pemecatan ini menyalahi wewenang dan aturan prosedural yang berlaku?

Akibat pemecatan tidak hormat ini, orangtua murid sepakat memindahkan anak-anak mereka ke SMP Negeri terdekat, yaitu SMP Negeri 13, di Jalan Tirtayasa. Siswa yang pindah ada 54 orang.

Begitu banyak intimidasi, kepada para siswa dan orangtua mereka. Jumlah siswa kami semakin susut. Lurah Melawai, misalnya, langsung mendatangi orangtua siswa dan meminta mereka agar memindahkan anak-anak mereka dari SMP Negeri 56. Jika tetap bertahan di sekolah itu, kata kepala Lurah, anak-anak akan menemui banyak kesulitan saat melanjutkan sekolah. Soalnya, kata Pak Lurah, SMP Negeri 56 Melawai telah dianggap ilegal.

Pada hari Rabu, 28 Desember 2004, Masyarakat Peduli Pendidikan dan saya berdemonstrasi ke gedung kejaksaan agung. Yang diperbolehkan masuk hanyalah 4 orang ditambah 3 orang wartawan (*Kompas, Warta Kota, Indo Pos*). Kami diterima Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Suhandoyo.

Pak Suhandoyo memberitahu bahwa satu atau dua minggu lagi saya akan dijadikan saksi oleh kejaksaan tinggi, di Jalan HR Rasuna Said. Pak Suhandoyo dan timnya telah menemukan indikasi korupsi oleh sejumlah oknum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 12,4 Miliar.

Kata Pak Suhandoyo, “Ibu, kita jangan bicarakan tanah yang ada di Melawai ataupun di Jeruk Purut tetapi kita bicarakan yang di Bintaro SMA Negeri 87. Ibu tahu yang ada di sana?” Saya menjawab, “Ya, saya tahu. Tanah itu luasnya 4.170 meter persegi.”

Pak Suhandoyo menjelaskan, resminya tanah itu dilaporkan hanya seluas 3.435 meter persegi. Jadi, 735 meter persegi yang digelapkan. Di kawasan itu, menurut Pak Suhandoyo, tiap meter tanah dihargai Rp 500.000. Jadi, ada ratusan juta rupiah yang tidak ketahuan rimbanya.

Tak hanya soal tanah. Pak Suhandoyo melanjutkan, “Ibu tahu mebeleir?” Saya menjawab dengan antusias, “Meja, kursi, lemari dan lain-lain.” Total jenderal, selisih harga tanah ditambah harga mebeleir, menurut Pak Suhandoyo, negara telah dirugikan sebesar 12,4 milyar rupiah.

Kembali Pak Suhandoyo melontarkan pertanyaan, “Ibu tahu siapa orang yang harus bertanggungjawab atas semua ini?” Saya menjawab, kepala kantor wilayah yang dulu harus dimintai pertanggungjawaban.

Tapi, orang tersebut sudah meninggal. Menurut ketentuan, orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi dimintai pertanggungjawaban. Pak Suhandoyo meminta saya dan para wartawan bersabar. Pada saat yang tepat ia akan memberitahu kami tentang siapa yang bertanggungjawab. Setelah berbicara cukup lama, kami pamit. Kami pulang dari gedung kejaksaan agung.

Pada Jumat, 30 Desember 2004, *Kompas*, *Warta Kota*, dan *Indo Pos* memberitakan kasus yang disinggung Pak Suhandoyo. Tersangkanya, menurut pemberitaan itu, adalah Direktur Utama PT Tata Disantara.

Awal Januari 2005. Saya melayangkan gugatan kepada Pengadilan dan Tata Usaha Negara (PTUN) atas surat keputusan pemecatan saya. Gugatan saya ditolak.

Alasan penolakan gugatan itu, seorang pegawai negeri sipil harus bersedia ditempatkan di mana saja. Alasan lainnya, ini yang utama, saya disebut sudah dipindahtugaskan mengajar di Jeruk Purut tetapi saya tidak pernah datang mengajar. Saya melakukan banding kembali ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Sayang lembaga itu ternyata menguatkan hasil keputusan PTUN.

Saya tidak kehabisan energi. Saya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, sejak pengajuan kasasi pada tahun 2005, gugatan saya belum juga mendapatkan respon.

Pada Kamis, 1 Mei 2005, saya dipanggil Polda Metro Jaya. Menurut penyidik, saya akan diserahkan ke gedung Kejaksaan Tinggi Negeri DKI Jaya. Dari gedung Polda Metro Jaya menuju kejaksaan tinggi inilah saya didampingi oleh pengacara. Saya dipertemukan dengan jaksa penuntut umum.

Selama pemeriksaan di kejaksaan tinggi saya tidak ditahan. Saya hanya diwajibkan lapor setiap hari Senin hingga Kamis hingga bulan Desember 2005. Ini karena, berkas saya sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai terdakwa.

Pada 1 Februari 2006 di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan saya. Saya

didakwa untuk beberapa hal. Pertama, mendirikan satuan pendidikan tanpa izin, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Ke dua, membuat raport palsu dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ke tiga, memasuki pekarangan orang lain dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara.

Saya merasa tidak bersalah. Saya mengajukan eksepsi pribadi yang kemudian dikabulkan oleh hakim ketua.

Pada Selasa 21 Februari 2006, saya membacakan 7 halaman eksepsi pribadi. Seminggu kemudian, Hakim Ketua Johannes Suhandi, S.H., memutuskan saya bebas demi hukum.

Karena merasa tidak puas, jaksa penuntut umum mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Keputusan banding itu ternyata menguatkan hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saya memang berhasil menunjukkan bahwa diri saya tidak bersalah. Namun, pembebasan saya harus diiringi pengorbanan yang luar biasa. Saya kerap disebut sebagai pembangkang, bahkan dijuluki orang gila. Pangkat saya sebagai PNS diturunkan dari IV A menjadi III D. Gaji yang saya dapatkan tentu berkurang. Selain itu, gaji saya bulan Desember 2003 yang berjumlah Rp. 2.080.000 dikembalikan ke kas daerah oleh kepala sekolah Drs. H. Agus Bambang, M.Pd.

Ini memang perjalanan panjang. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi pembelajaran publik agar tidak terulang kembali kasus seperti yang menimpa SMP Negeri 56.

Pihak yang berwenang seharusnya mengkaji terlebih dahulu proses *ruislag* ini, apakah sudah benar atau belum. Tukar guling

yang terjadi pada SMP Negeri 56 terbukti memiliki banyak cacat hukum, yaitu tidak adanya keputusan presiden. Padahal, aset negara yang akan ditukar itu memiliki investasi uang di atas Rp 10 miliar.

Menurut Pak Suhandoyo, Kejaksaan Agung pun menggenggam nama aktor intelektual di balik kasus *ruislag* SMP 56 ini. Alih-alih ditangkap, tersangka itu hingga kini bisa *melenggang kangkung*. Lalu, sampai kapan proses kasus ini akan diusut?

Pada awalnya, saya tidak mengetahui adanya indikasi korupsi pada kasus SMP 56. Yang saya lakukan semata-mata kesetiaan seorang guru, yang menginginkan yang terbaik bagi muridnya. Saya hanya berusaha mempertahankan sekolah agar tidak tergerus ke pinggir kampung dan digantikan oleh bisnis-bisnis yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Pada proses selanjutnya, saya memahami ada unsur korupsi terjadi. Sesuai keterangan Farid Faqih, dari Government Watch (GOWA), tim investigasi GOWA menemukan bahwa tanah SMP Negeri 56 bukan hak milik negara tapi gedung eks hak pakai Cina. Karena itu, orang bisa mudah memainkan kekuasaan atas tanah sekolah tersebut.

Almarhum Cak Munir adalah sosok yang mengukuhkan langkah perjuangan saya. Ia selalu mendampingi dan melakukan advokasi terhadap kasus yang saya hadapi. Beberapa hari sebelum dia berangkat ke negeri Belanda, tepatnya pada Jumat sore, kami berbincang. Saya bertanya, apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Munir dengan mantap meyakinkan saya,

“Oh, perjuangan Ibu benar, Ibu jangan takut saya mendukung Ibu, walaupun saya di Belanda, saya bisa memantau Ibu dengan dua orang utusan saya.

Kalau saja Bapak Ki Hajar Dewantara masih hidup, beliau pasti senang karena ada R.A. Kartini kedua kini. Sudah puluhan atau ratusan tahun yang lalu, perempuan Indonesia tak ada yang berani seperti Ibu. Melawan atasan Ibu.

Ibu juga harus hati-hati, karena Ibu melawan militer dan penguasa. Ibu harus hati-hati bila teman Ibu memberikan air ataupun permen. Jangan diterima. Karena bisa saja air atau permen itu sudah disuntik dengan racun. Bila Ibu jalan, jangan sendirian. Ibu bisa diambil secara paksa atau Ibu diculik kemudian Ibu dibunuh dan mayat Ibu tidak diketahui keberadaannya.

Nah, bila Ibu tidak ada, maka siapa yang menggantikan Ibu untuk berjuang?"

Berdasar perkataan almarhum itu, sempat terbersit di benak saya, jangan-jangan kematian Munir terkait dengan perjuangan saya. Seandainya tidak dibunuh dan meneruskan kuliah di Belanda, dia pasti akan membongkar kasus korupsi yang terjadi dalam pengambilalihan tanah sekolah tempat saya mengajar ini.

Selain Cak Munir, ada orang yang selalu menjadi penyemangat perjuangan saya. Mereka adalah almarhum suami dan Enyak, ibu saya. Dari almarhum suami saya belajar agar tidak menjadi orang yang plin-plan dalam memegang prinsip jika itu memang benar. Jika pertama saya bilang A, maka seharusnya tetap A, tidak boleh berubah menjadi B. Nasihat inilah yang menjadi nafas dalam perjuangan saya.

Dari Enyak, yang dengan penuh kasih sayang mendidik saya selama ini, saya belajar arti kegigihan dalam berjuang apa yang

dianggap benar. “Ibarat orang berenang jangan sampai di leher saja, harus sampai tenggelam, Enyak doakan agar Ela bisa *timbul*. Bila kalah pun tidak apa-apa. Memang hanya pegawai negeri saja yang bisa makan? Enyak yakin Allah Subhanallah Wata’ala Maha melihat dan menyayangi hamba-Nya yang teraniaya.”

Kalimat itulah yang selalu terpatri dan menjadi energi bagi hati dan hidup saya.

Jakarta, September 2008

YUN HAP, GUGUR BERSAMA RAKYAT

Oleh :

Ibu Ho Kim Ngo

Yun Hap adalah harapan. Namanya bermakna “selalu cocok dan akurat.” Kakeknya yang memilihkan nama itu agar Yun Hap selalu membawa kedamaian bagi siapa saja yang ada di sekitarnya.

Dia lahir pada tanggal 17 Oktober 1977 di Pangkal Pinang, tepatnya di Jalan Koba Semabung Baru, Bangka. Dia anak pertama dari tiga bersaudara. Yun Hap kecil adalah anak yang manis. Dia tidak nakal, pendiam, penakut. Lihat film si Unyil di TV saja dia takut.

Waktu berumur tujuh tahun, kakeknya menyuruh Yun Hap masuk sekolah. Ketika itu bapaknya kerja sebagai buruh harian. Upahnya tak seberapa, tidak ada uang buat masuk sekolah. Untunglah, kakeknya yang menanggung biaya. Dia memasukkan Yun Hap ke sekolah. Dia membeli baju seragamnya. Tantenya dari Jakarta juga mengirimkan tas sekolah. Hari pertama masuk sekolah, Yun Hap sangat gagah dengan baju seragam.

Yun Hap kecil anak pintar. Bukunya sampai sobek karena dibukanya berulang-ulang. Dia juga sering mengusap-usap buku pakai jari, sayang sekali dia dengan buku. Di rumah, saya mengajari dia berbagai pelajaran, cepat juga dia bisa. Hari demi hari Yun Hap ngerti menulis, membaca, berhitung. Matematika dia selalu dapat nilai sepuluh. Tapi, Yun Hap anak pemalu. Disuruh menyanyi oleh Bu Guru, dia tidak bisa.

Sekarang, jika saya melihat anak-anak berseragam merah-putih dituntun ibunya pada hari pertama masuk sekolah, langsung hati saya ingat Yun Hap.

Kakeknya sangat sayang sama Yun Hap karena dia cucu pertama. Setiap kali mendapat uang, saat pulang kerja, kakek selalu membeli makanan buat Yun Hap. Kami selalu makan malam bersama. Apa pun makanan yang dia minta diturutin oleh kakeknya.

Sewaktu Yun Hap masih di kelas 1 SD (Sekolah Dasar), tahun 1985, ada famili yang punya pabrik kaleng di Jakarta sedang mencari karyawan. Bapak Yun Hap ditawari, mau kerja nggak di Jakarta? Dia mau. Akhirnya, kami sekeluarga memutuskan pindah ke Jakarta mengadu nasib.

Bu Guru awalnya keberatan memberi izin pindah kepada Yun Hap. Soalnya, Bu Guru sayang sama dia. Yun Hap pintar di sekolah. Bu guru menyarankan agar Yun Hap tinggal bersama kakeknya di Bangka. Kami tidak setuju karena dia masih kecil, kasihan kalau jauh dari ayah-ibu.

Yun Hap sendiri juga sayang sama ayam peliharaannya. Dia ingin ayam itu juga dibawa ke Jakarta. Tapi, akhirnya dia mau menerima bahwa di pesawat, penumpang tak boleh membawa ayam.

Sampai di Jakarta, kami menumpang sementara di rumah saudara. Kemudian kami pindah ke pabrik kaleng di Kapuk, Jakarta Barat, tinggal di mess yang ada di dalam kompleks pabrik kaleng. Yun Hap masuk sekolah dekat situ.

Waktu terus berlalu. Kami hidup dalam keterbatasan, tapi tetap mengutamakan pendidikan anak-anak, Yun Hap, Yun Yie, dan Liana. Pas menjelang ujian akhir kelas enam SD, dia bilang: “Ma, Ibu Guru berkata saya harus minum susu supaya otaknya kuat.” Saya belikan susu buat dia minum. Kita sebagai orangtua tentu mengharap yang terbaik buat anak. Akhirnya, Yun Hap lulus SD dan mendapat piagam gratis masuk Ancol selama setahun.

Selanjutnya, kami terus berjuang agar anak-anak bisa sekolah. Di SMP (Sekolah Menengah Pertama) 89, dia lulus dan masuk peringkat lima besar. Gurunya pernah menawarkan beasiswa ke Singapura setahun. Tapi, dia tidak mau, tidak berani. Dia memilih melanjutkan sekolah di SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri 78.

Waktu itu disiplin SMA 78 sangat ketat. Orangtua murid diundang Kepala Sekolah dan diberi penjelasan soal tata tertib sekolah. Siswa yang tidak naik kelas akan dikeluarkan. Yun Hap terus berjuang belajar. Dua kali meraih juara dua dalam lomba fisika. Pernah juga jadi juara dua lomba kimia. Sewaktu kelas tiga, sekolahnya menyelenggarakan les tambahan di luar jam sekolah. Tapi, bapaknya tidak sanggup bayar biayanya. Kata Bapaknya, “Hap, kamu belajar sendiri di rumah aja.”

Setiap malam Yun Hap belajar serius. Sampai akhirnya ketekunannya terbayar, dia lulus dengan nilai NEM 60,34 (rata-rata 8,62). Dia cuma kalah 0,1 dari siswa peringkat teratas.

Yun Hap juga mendapat beasiswa ke Jepang. Sekolahnya gratis, tapi biaya hidup ditanggung sendiri. Karena kami tidak mampu, Bapaknya memberi nasehat, “Hap kamu kuliah usahakanlah di Universitas Indonesia (UI). Kalau di swasta, Bapak tidak mampu. Biaya mahal.”

Dia pun belajar dengan lebih keras lagi. Buku-buku bertumpuk di meja. Tiap hari dia belajar untuk mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Dia memilih Fakultas Teknik Elektro.

Malam menjelang pengumuman UMPTN, Yun Hap berpesanan untuk dibelikan koran besok pagi. Saya pesan koran Pos Kota, harganya Rp 2.500, padahal biasanya itu koran tidak sampai seribu

rupiah. Pagi-pagi tukang koran sudah mengantar koran. Ada nama Yun Hap di situ. Alangkah senang dia. Adiknya, Yun Yie bilang, “Ma, bikin selamatan, Ma.” Saya juga turutin, besoknya saya masak sedikit, saya bagi-bagi kepada tetangga.

Hari pertama dia melangkahhkan kaki ke kampus UI, dia gembira sekali. “Ma, sekarang saya sudah jadi mahasiswa, dosen memanggil kita dengan panggilan adik-adik. Kalau dulu masih jadi siswa, guru memanggil kita anak-anak,” katanya. Ketika menjalani ospek, peloncoan, dia menginap di tempat kos temannya. Suatu malam, sekitar pukul dua belas, dia pulang meminta foto keluarga. Tapi, kami tak punya. Dia dihukum push up 50 kali karena itu. Begitu susah seorang anak memperjuangkan cita-citanya.

Biaya kuliah Yun Hap dibantu oleh saudara bos bapaknya. Yun Hap senang bergaul dengan mereka yang juga susah perekonomiannya. Saat krisis moneter, 1997, dia dan temannya suka membantu membagikan sembako di kampus. Suatu kali, saya suruh dia, “Hap, kamu tolong antre minyak di pasar.” Pulangnya, dia marah-marah, “Sudah capek-capek ngantre, waktu mau sampai giliran, mobil tangkinya pergi, padahal minyak masih ada.” Begitulah hidup kita, minyak, gula, beras beli dengan antre berdesak-desakan. Semua barang mahal.

Yun Hap sering main ke kos anak-anak Trisakti yang letaknya tidak jauh dari rumah kami. Pada saat kerusuhan Mei 1998, ibu yang kerja di kos itu juga masak catering buat anak-anak kos. Ibu itu cerita sama Yun Hap, dia tidak punya modal dagang lagi. Anak-anak kosnya pergi tidak kasih kabar. Lalu, Yun Hap pergi ke Trisakti mencari tahu. Tapi, tidak ketemu. Kami tahu cerita ini setelah Yun Hap tiada. Kata ibu kos itu, “Yun Hap baik, suka menolong.”

Pada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, 12 Mei 1998, sepulang dari UI – Depok, sorenya dia mampir ke Trisakti. Dia bilang kantin di Trisakti dibongkar orang dan makanannya diambil. Dia membawa pulang selongsong peluru dijadikan liontin kalung.

Kepedulian Yun Hap pada sesama sangat kuat. Dia bilang, kalau sukses nanti, ulang tahunnya akan dirayakan bersama anak-anak jalanan. “Kasihannya mereka, belum pernah mencicipi makan yang enak,” katanya. Bayu, teman Yun Hap, bercerita tentang ajakan Yun Hap kepadanya: “Bayu, hari ini kita tidak usah kuliah, kita ke Serang. Kita lihat tukang becak. Gimana nasib tukang becak cari nafkah, mengayuh becak di bawah matahari terik,” begitu kata Yun Hap. Becak itu dia pinjam, dia kayuh. Tapi, di rumah, Yun Hap tak pernah bercerita soal ini.

Kalau ingat apa yang dikata Yun Hap waktu itu, rasanya saya mau teriak, kenapa cita-citanya belum tercapai dia sudah pergi.

Hanya Bayu, satu-satunya teman yang dia ajak ke rumah. Rupanya sejak SMP dia sudah kenal Bayu. Saya pernah tanya, “Hap, kamu kok tidak pernah ajak teman kuliahmu ke rumah. Dia bilang, “Ma, teman saya orang kaya semua, hanya saya yang miskin.”

Menjelang semester tujuh, dia meminta uang untuk membeli dua buku kepada bapaknya. Sudah mau skripsi, katanya. Saya masih ingat hari itu hari Minggu. Bapaknya kerja sampingan. Belum hilang capeknya, Bapaknya memberi uang kepada Yun Hap. Dua buku itu harganya hampir seratus ribu rupiah.

Yun Hap pernah bilang dia lahir di Indonesia. Dia besar minum air Indonesia. Dia kuliah dengan beasiswa, biaya rakyat. Jadi, Indonesia adalah tanah airnya. Dia mau membela rakyat Indo-

nesia. Dia kuliah dapat biaya siswa itu juga uang rakyat. Ketika pemerintah membahas Undang-Undang PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya), Yun Hap berkata, “Ma, beberapa hari lagi mahasiswa seluruh tanah air mau turun ke jalan demo. Undang-undang itu tidak bagus buat rakyat, saya juga mau ikut.”

Saya mengingatkan dia, “Hap, jangan ikut. Tahun ini ciong siau ular.” Menurut tradisi Cina, ini pertanda tidak bagus. Tapi, dia bilang, “Ma, kita sejak lahir sudah digariskan hidup sampai mana, tidak bisa diubah lagi. Lihat saja Yopi (sepupunya), dia tidak ikut demo, tapi dia meninggal ditabrak mobil.”

Pada tanggal 23 September 1999, dia ikut berdemo. Sekitar pukul 10.00 malam, dia kasih kabar bahwa dia tidak bisa pulang. Besoknya, 24 September 1999, kami menunggu. Dia belum pulang. Bapaknya pun berangkat kerja. Yun Yie, adiknya, berangkat kuliah.

Sekitar pukul 9 pagi, dia pulang. Saya baru datang dari pasar. Sehabis mandi, kami berbicara :

Yun Hap : “Ma, tenggorokan saya berdarah.”

Saya: “Kamu kemarin banyak teriak kali.”

Yun Hap : “Saya banyak makan gorengan.”

Dia duduk di tempat tidur. Adiknya, Liana, pulang sekolah. Liana bilang, “Ini orang sudah pulang.” Yun Hap diam saja, tidak menyapa adiknya. Dia cuma bilang, “Saya lapar.” Sayur masakan saya dia makan.

Pukul 11.00, dia menyetel acara berita di TV. Beritanya tentang peristiwa demo kemarin. Ada yang luka, ada yang meninggal. Saya mengingatkan dia, “Hap, kamu jangan ikut demo lagi, itu lihat ada yang meninggal dan banyak yang terluka.” Lalu, sekitar

pukul 12.00, dia membawa tas. Saya tanya, “Hap, kamu mau kemana?” Dia hanya bilang, “Mau ke kampus.”

Ternyata itu adalah suara dia yang terakhir. Sampai sekarang suara itu masih mendering dengan rinci di kuping saya. Hanya saya dan Liana yang bertemu dengan dia pada hari itu.

Di depan rumah, dia bertemu temannya. Teman itu bertanya, “Hap, kenapa kok kamu jalannya loyo, kamu ikut demo, kamu tidak takut sama peluru?” Yun Hap menjawab, “Kenapa takut?” Yun Hap terus berjalan.

Malam, pukul 21.00, dia belum pulang. Kami sekeluarga menonton siaran berita, tentang demonstrasi menentang UU (Undang-Undang) PKB. Ada tayangan tentang kejamnya aparat memuntahkan peluru ke arah masyarakat. Sepertinya itu adalah mangsa yang dia buru, dia tidak bisa lagi membedakan itu adalah bangsa sendiri. Kekejaman yang sangat menyakitkan bagi kami orangtuanya. Bapaknya bilang, “Mungkin Yun Hap tidak bisa pulang, situasi lagi kacau di sana.”

Televisi kemudian dimatikan. Belakangan, kami tahu bahwa di akhir tayangan itu ada berita tentang Yun Hap dan fotonya. Tantenya yang bilang, “Namanya tidak jelas dan Yun Hap dilumuri darah.” Tantenya tidak mengenali dia.

Malam itu kami tidak bisa tidur memikirkan Yun Hap. Dia tidak pulang. Sekitar tengah malam, telepon berbunyi. Bapaknya yang angkat. Teman Yun Hap yang menelepon. “Ini rumah Yun Hap ya? Alamat di mana?” Teman-teman Yun Hap mau datang ke rumah. Kata mereka, Yun Hap ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Tidak lama kemudian, teman-teman Yun Hap dan Pak Dadan (dosen Trisakti) sampai ke rumah. Bapaknya langsung emosional.

Dia bertanya, “Yun Hap sudah meninggal ya? Saya tahu pasti dia sudah tidak ada lagi.”

Pak Dadan menenangkan bapaknya Yun Hap. Saya sendiri hanya menangis, berteriak-teriak sampai tidak bisa ngomong lagi. Lemas. Bersama saudara, teman-teman Yun Hap, kami berangkat ke RSCM. Liana tidak ikut. Saya titipkan dia kepada tetangga sebelah.

Sepanjang perjalanan, Jakarta terasa sepi dan gelap. Lampu jalan mati. Tak ada orang yang lewat. Sesampai di Cipto, saya lihat banyak sekali mahasiswa di situ. Banyak simpatisan, saya tidak kenal.

Saya mendengar bunyi tembakan. Semua yang ada di luar rumah sakit pada lari memasuki ruangan di dekat kamar jenazah. Ada juga pasien yang datang digotong masuk. Tak lama kemudian Cak Munir (aktivis hak asasi manusia) juga datang.

Banyak yang menyarankan agar Yun Hap diotopsi supaya nanti jangan sampai makamnya digali. Malam itu juga otopsi dilakukan. Peluru yang bersarang di leher kirinya diangkat. Peluru itu masih utuh. Punggung kanan Yun Hap kena peluru, tapi peluru itu nyangkut di leher kirinya. Gigi depannya ada yang patah. Waktu kena tembak, dia jatuh tersungkur.

Jenazah Yun Hap diperiksa oleh dokter Agus Purwadianto dan dokter Djaya Surjaatmadja. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada pembunuhan.

Ada yang bertanya kepada saya, rencana selanjutnya bagaimana. Saya bilang mau bawa ke Rumah Duka Abadi dulu. Soalnya, famili kami belum pada tahu. Menjelang pagi, sudah ada yang membawa petinya, saya tidak tahu itu peti dari siapa. Setelah dimandikan, jenazah dimasukkan di peti. Teman-teman Yun Hap berencana membawa jenazahnya ke UI, Depok. Tapi, karena

takut ada kerusuhan, jenazah itu disemayamkan di Balairung UI di Salemba.

Pagi itu, dosen yang mengajar dia datang. Dosennya bilang baru tahu peristiwa itu dari siaran radio. Dosennya sangat menyayangkan kepergian Yun Hap. Tiga bulan lagi dia sudah mau skripsi. Rektor UI juga datang.

Selesai disemayamkan di Balairung, jenazah dibawa ke Rumah Duka Abadi. Tamu-tamu terus berdatangan di sana. Rangkaian bunga, minuman, makanan, terus berdatangan. Kami pakai upacara agama Kristen.

Pada hari Minggu temannya yang datang semakin banyak. Saudara, kerabat, teman bapaknya, teman saya, teman Yun Yie, tetangga, tamu orang Bangka juga pada datang. Mereka dapat kabar dari siaran radio. Orang Bangka harus ikut berduka cita, ikut belasungkawa. Sampai-sampai dibuka satu ruang lagi.

Sekitar pukul 11.00, mobil datang membawa jenazah untuk memakamkan Yun Hap di Taman Pemakaman Umum Pondok Rangon. Kami semua ikut di belakang. Kami melewati jalan tol. Gratis, tidak dipungut biaya. Sepeda motor boleh masuk.

Di sepanjang jalan, saya merasa seperti bermimpi. Mengapa bukan anak yang mengantar orang tua ke kubur. Ini malah orang tua mengantar anak ke tempat peristirahatan yang terakhir.

Sesampai di pemakaman, sudah banyak orang menunggu. Setelah selesai doa, peti diturunkan di liang lahat. Saya sendiri sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi waktu itu. Saya hanya mendengar Yun Yie, adiknya, berteriak. Selebihnya, entah apa yang terjadi. Semuanya kabur.

Selepas pemakaman, kami pulang. Sampai rumah, saya terus-menerus memandang baju Yun Hap yang masih digantung. Hari itu, menurut tradisi Tiong Hoa, adalah tanggal 15 bulan 8 dan malam. Banyak yang sembahyang bulan saat itu karena dalam satu tahun, malam itulah bulan paling terang, bulan purnama.

Setelah Yun Hap tidak ada, teman-temannya datang menengok kami di rumah. Kami sangat sedih dan terpukul rasanya. Beberapa teman Yun Hap menginap di rumah kami, menemani kami. Takut terjadi sesuatu yang negatif pada kami.

Beberapa hari setelah pemakaman, Pak Akbar Tanjung bersama isterinya berkunjung ke rumah. Malam hari. Dia memberi amplop. Tapi, saya bilang, “Pak, maaf, bukan saya tidak mau terima. Tapi, menurut adat kami, kalau jenazah sudah dimakamkan, maka kami tidak boleh terima amplop lagi.”

Di belakang hari, entah dari mana, beredar isu yang tidak enak didengar. Ada yang bilang, adik-adik Yun Hap tidak perlu bayar uang sekolah. Ada yang bilang, tiap bulan kami dapat uang dari DPR. Ada lagi yang bilang kami beli dua rumah di Cibubur.

Namun, banyak pula yang bersimpati pada kami. Ada yang berkata, “Yun Hap tulang punggung keluarga, sekarang sudah tiada lagi.” Banyak orang memberi sumbangan kepada kami. Bantuan itu cukup besar dan kami pergunakan untuk membeli rumah yang sampai saat ini menjadi tempat tinggal kami sekeluarga.

Pada 27 September 1999, teman-temannya membawa kami ke UI. Jalan yang menuju ke Fakultas Teknik Elektro katanya mau dinamai Jalan Yun Hap. Kata mereka, “Waktu menjelang demo, Yun Hap dan teman-temannya ngobrol-ngobrol di bawah pohon. Lalu, dia bilang, kalau saya meninggal nanti nama saya dijadikan nama jalan bagus juga.” Maka, di kampus UI, kami mengabadikan namanya.

Saya teringat ceritanya. “Ma, tempat saya kuliah seperti hutan. Pohonnnya besar-besar. Nanti kalau saya wisuda, Mama lihat deh.” Ternyata, ucapan itu tidak kesampaian. Sangat menyakitkan.

Menurut penelitian Fakultas Kedokteran UI, mesin pembunuh Yun Hap adalah senjata laras panjang kaliber 5.56 milimeter SS1 milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada tanggal 5 Oktober 1999, barang bukti yang diserahkan proyektil ukuran 5.56 milimeter. Pakaian Yun Hap juga diserahkan sebagai bukti. Semuanya diserahkan Dr. Budi Sampurno kepada petugas Mabes Polri dan Polda Metro Jaya Kolonel Polisi Alex Bambang, Danpom Kodam Jaya Kolonel CPM Munggono, serta Lutfi Buhari, Wakil Senat Mahasiswa UI.

Waktu terus berlalu. Saya pun bergabung bersama orang tua korban yang lain mencari keadilan. Kita didampingi TRuK (Tim Relawan untuk Kemanusiaan).

Pada tahun 2000, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Ketika itu saya didatangi petugas Pomdam Jaya. Dia bertanya, apakah waktu berangkat kuliah badan Yun Hap sehat? Apakah kepalanya pusing? Saya menjawab, “Dia berangkat kuliah sehat-sehat saja. Saya masih tanya mau kemana, dia bilang ke kampus.”

Pada peringatan dua tahun Tragedi Semanggi I, saya diteror melalui telepon tiga kali. Bunyinya, “Awat, saya mau habisin kalian sekeluarga.” Suaranya seperti di tempat ramai, berisik.

Waktu di Pansus DPR proyektil yang menewaskan Yun Hap juga disorotkan, DPR bilang itu hanya pelanggaran HAM biasa. Kemudian Pansus berakhir, kita orang tua korban yang kalah, di kalangan DPR yang dukung suara kita sedikit.

Sebagai orang tua, kami tidak putus asa. Kami tetap berjuang mencari keadilan. Tahun 2003, kasus Yun Hap disidangkan di Mahkamah Militer. Terdakwanya Prajurit Kepala Buchori Sastro Tuaputy. Kami tidak diberi tahu. Kami hanya tahu dari teman bapaknya. Dia bawa koran Suara Pembaruan, Selasa 17 Juni 2003. Dia kasih lihat gambar terdakwanya.

Didampingi KontraS, kami menghadap Jaksa Agung. Saya bertanya, mengapa kami, orang tua korban, tidak diundang dalam persidangan. Jawabannya, orang tua korban memang tidak hadir, tetapi Yun Hap ada diwakili pengacara. Kami tidak pernah tahu siapa pengacara itu.

Kami, orang tua korban, juga sering mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komisi ini membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Hasilnya, terbukti terjadi pelanggaran HAM berat. Tapi, tak ada kelanjutan penyelidikan ini.

Lembaga yang berwenang, Komnas HAM, DPR RI, Jaksa Agung, Presiden, mereka semua sekadar kasih angin segar saja. Sejak peristiwa itu terjadi, sudah empat kali ganti presiden, tapi belum ada yang dinyatakan bertanggungjawab.

Tragedi berdarah adalah kekejaman alat negara, jadi pemerintah harus bertanggung jawab. Negara ini negara hukum, pemerintah jangan hanya kasih angin segar saja. Percuma kami berteriak sekeras-kerasnya jika hanya kami sendiri yang mendengarkan. Ke mana lagi kami harus mencari keadilan.

Teringat saya akan tulisan di atas salib di makam Yun Hap, tulisan yang diletakkan oleh temannya:

“Aku belajar disubsidi rakyat,
Aku harus membela rakyat,
Aku gugur bersama rakyat.”

Jakarta, 13 Agustus 2008

WAWAN, TRAGEDI DEMI TRAGEDI

Oleh :
Arief Priyadi

Petang itu sebuah tragedi menggores tanah air. Melengkapi tragedi demi tragedi kemanusiaan yang memenuhi perjalanan sejarah negeri ini.

Jumat, 13 November 1998, di kawasan Semanggi, Jakarta. Tepatnya, di depan dan di halaman parkir kampus Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya. Peluru tajam aparat berhamburan diarahkan pada mahasiswa yang tengah berunjuk rasa damai menolak Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat itu MPR masih dikuasai politikus Orde Baru yang tidak mendukung agenda reformasi.

Ini bukan satu-satunya. Pada 24 September 1999, juga di kawasan Semanggi, aparat bersenjata menembaki mahasiswa. Seorang mahasiswa dan beberapa warga tewas diterjang peluru tajam aparat. Ketika itu mahasiswa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya yang memberi peluang bagi aparat bersenjata untuk bertindak represif. Tragedi kali ini kemudian dikenal sebagai Tragedi Semanggi II.

Saya teringat kesaksian seorang wartawan televisi Belanda yang datang ke rumah saya sehari setelah Tragedi Semanggi I. Ia menuturkan betapa brutal aparat bersenjata ketika itu. Kekejaman aparat pada 13 November '98 itu, menurut dia, sepuluh kali lipat dibanding kekejaman yang terjadi pada Tragedi Trisakti, 12 Mei 1998.

Saya percaya pada penuturan wartawan yang berada di lokasi kejadian sepanjang siang, sore, petang, dan malam itu.

Hari itu, menjelang maghrib, saya juga berada di Jalan Sudirman. Saya menuju Rumah Sakit Jakarta, mencari B.R. Norma Irmawan (Wawan), anak saya, yang dikabarkan terkena tembakan aparat. Kendaraan saya sempat tertahan massa yang berkerumun di dekat Jalan Garnisun, beberapa meter dari Rumah Sakit Jakarta, tak jauh dari kampus Unika Atma Jaya.

Benar memang, kata wartawan tadi, suara-suara tembakan terdengar begitu mengerikan. Gas air mata ditembakkan dari berbagai penjuru ke arah mahasiswa. Mobil *watercanon* menyembrotkan air, entah air apa yang disemprotkan. Mereka yang terkena merasakan gatal-gatal di kulit.

Massa pun kalang-kabut. Teriakan histeris menyertai arus massa. Kendaraan di Jalan Sudirman langsung berbalik arah karena dihalau oleh panser, kendaraan lapis baja, truk berbemper kawat berduri dari arah selatan, atau dari arah Hotel Hilton (*sekarang Hotel Sultan*) ke arah utara.

Aparat bersenjata tampak tak mau tahu bahwa telah jatuh banyak korban, baik dari mahasiswa maupun masyarakat umum. Terkesan bahwa aparat di lapangan tidak mendapat instruksi untuk menghentikan tindakan brutal terhadap aksi damai mahasiswa. Atau memang justru mereka tengah melaksanakan komando untuk melakukan kekerasan terhadap mahasiswa. Itulah yang mestinya harus diselidiki secara tuntas.

Jumat Kelabu

Jumat kelabu, 13 November 1998, itu selalu saya kenang. Maraknya agenda demonstrasi hari itu telah membuat banyak jalan diblokade aparat keamanan.

Sekitar pukul 1 siang, saya berada di kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jalan Tanah Abang III. Suasana agak aneh. Beberapa nasabah yang juga sedang menunggu layanan nampak gelisah, bahkan ada yang membatalkan rencana transaksi.

Lalu, ada seseorang membisiki saya. Katanya, dia baru saja mendapat informasi bahwa terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa di kawasan Semanggi. Dan, aparat bersenjata akan melakukan tembakan bebas. Kabarnya lagi, ada himbauan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kepada kantor-kantor untuk segera memulangkan karyawan.

Saya pun ikut-ikutan membatalkan transaksi dan buru-buru kembali ke kantor yang tidak jauh dari situ. Benar saja. Sebagian besar karyawan di kantor saya sudah pulang.

Pada mulanya saya tidak terpengaruh oleh suasana itu. Bahkan saya sempat makan siang di kantor dan masih melanjutkan pekerjaan. Tetapi tak lama kemudian kantor terasa semakin lengang.

Pukul 2.30, saya pulang juga. Di perjalanan saya sempat mampir di sebuah bengkel untuk membeli oli mesin. Saya tidak merasa gelisah. Soalnya, Wawan, anak saya, selalu kami wanti-wanti agar tidak ikut demonstrasi di jalan, dan Wawan termasuk tipe anak yang patuh terhadap nasihat orangtua. Selama hayatnya, dia memang tidak pernah berulah yang merepotkan orangtua. Jadi, saya tenang-tenang saja.

Sore itu saya pulang. Pukul 4.15, ketika saya sedang memotong dahan pohon jambu di samping rumah, telepon di rumah berdering. Telepon dari Wawan.

Wawan : “Lho, jam segini kok sudah pulang, Pak?”

Saya : “Iya, katanya ada imbauan dari Panglima ABRI agar kantor-kantor segera memulangkan karyawannya. Ini berarti keadaan gawat, Wan! Kamu cepat pulang saja!”

Wawan : “Ya, penginnya cepat pulang Pak, tapi mana mungkin. Bawa motor, lagi! Jalan kaki saja susah! Di sini seperti mau perang, Pak.”

Saya : “Ya sudah, nggak bisa pulang nggak apa-apa, tapi jaga diri baik-baik, ya.”

Wawan: “Ya, Pak. Saya nggak pernah keluar kampus, kok. Sudah ya Pak, daaagh!”

Ternyata, itulah pembicaraan terakhir saya dengan Wawan. Percakapan yang hingga kini masih terngiang-ngiang di telinga saya. Agaknya sebelum menelepon ke rumah, dia menelepon ke kantor ibunya, di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi tidak ada yang mengangkat karena ibunya sudah dalam perjalanan pulang ke rumah. Wawan memang sangat dekat dengan ibunya.

Sekira pukul 4.30, isteri saya, Sumarsih, ibu Wawan, tiba di rumah. Dia langsung menyetel televisi. Dia melihat tayangan peristiwa yang terjadi di kawasan Semanggi dan seketika itu juga berteriak histeris: “Aduh, ada yang kena!” Memang terlihat di layar televisi, seorang mahasiswa tergelepar dipukul aparat, di jalan aspal dekat trotoar. Tetapi mahasiswa tersebut bukan Wawan.

Tak lama kemudian, telepon di rumah berdering lagi, dan diangkat oleh isteri saya. Dari seseorang yang mengaku bernama Ivon.

Ivon : “Tante, Wawan ada di mana?”

Sumarsih : “Wawan ada di kampus. Ada yang kena ya?”

Ivon, dengan gugup : “Tenang saja Tante, Ivon akan mencari Wawan. Nanti Ivon telepon lagi.”

Tidak sampai lima menit kemudian, Romo Sandyawan Sumardi SJ menelepon dan diterima isteri saya. Beliau mengabarkan bahwa Wawan kena tembak. Isteri saya tidak tahan. Gagang telepon kemudian diberikan kepada saya.

Saya : “Ya, Romo, ada apa? Saya bapaknya Wawan.”

Romo Sandy : “Ada berita buruk Pak, Wawan kena tembak. Bapak saya mohon segera ke Rumah Sakit Jakarta.”

Saya : “Dengan mobil atau sepeda motor saja, Romo?”

Romo Sandy: “Rumah Bapak di mana? Kami jemput saja.”

Saya: “Tidak usah Romo, saya mau datang sendiri!”

Isteri saya langsung menyiapkan kunci mobil. Kemudian meluncurlah kami berdua. Terlintas di pikiran saya untuk mengajak adik ipar, yang anggota kepolisian, untuk menemani. Saya khawatir di perjalanan nanti, fisik saya tidak tahan lagi.

Akhirnya, kami berangkat bersama adik ipar dan isterinya. Kami berangkat dari Meruya Selatan, Jakarta Barat, menuju Rumah Sakit Jakarta. Adik ipar yang menyetir mobil. Sepanjang perjalanan, isteri saya berdoa, “Tuhan Yesus, lindungilah Wawan, selamatkanlah anak saya, Bunda Maria tolonglah anak saya.”

Pada detik-detik tertentu, isteri saya merasa seakan-akan harus mengatakan, “Selamat jalan, Wan!”

Pada mulanya kami ingin melalui Jalan S. Parman. Tetapi begitu keluar dari jalan tol, tepatnya di lampu merah Tomang Raya, mobil dihentikan oleh aparat keamanan. Ketika kami minta bantuan pengawalan menuju Semanggi melalui Slipi, tidak dikabulkan. Bahkan kami diusir untuk segera meninggalkan tempat itu dengan alasan agar tidak mengundang massa.

Kami berputar-putar mencari jalan untuk bisa segera sampai di Rumah Sakit Jakarta. Akhirnya, kami bisa masuk ke Jalan

Sudirman dari arah Monas. Di Jalan Garnisun itulah saya menyaksikan kejadian yang sudah saya paparkan tadi. Tindakan aparat bersenjata benar-benar keterlaluan. Rakyat sipil yang berunjuk rasa tanpa senjata dihadapi oleh aparat bersenjata secara tidak terukur. Rakyat dipaksa berhadapan dengan aparat yang terlatih dan bersenjata. Jadi, benar kata Wawan bahwa keadaan di sekitar Semanggi seperti perang. Aparat bersenjata memerangi rakyat sipil.

Sesampai di halaman Rumah Sakit Jakarta, kami bertiga mencari Wawan. Adik ipar saya mencari tempat parkir mobil. Kami terpisah dan baru ketemu lagi esok pagi, di rumah, sekitar pukul 1 dini hari. Adik saya terpaksa berlindung di pos penjagaan satpam Rumah Sakit Jakarta karena khawatir terkena peluru nyasar. Katanya pula, dia berkali-kali mendengar dentingan suara peluru menyerempet tiang listrik.

Akhirnya kami bertiga bisa mendapatkan Wawan. Dia telah dibaringkan di keranda, di ruang jenazah di *basement* Rumah Sakit Jakarta. Beberapa jenazah korban yang lain juga ada di situ.

Pintu ruang jenazah dijaga ketat oleh puluhan mahasiswa. Mereka khawatir kalau terjadi penculikan jenazah. Ketika melihat Wawan terbaring, saya hampir tidak bisa menahan diri. Timbul kemarahan saya terhadap aparat yang menggunakan senjata yang dibeli dengan uang rakyat untuk membunuh rakyat. Terlebih-lebih saya marah terhadap pimpinan tentara yang tidak bijak.

Kira-kira pukul 8 malam, Wawan diberangkatkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk diotopsi. Di mobil jenazah, saya dan isteri duduk di belakang sambil memegang keranda bersama kru mobil jenazah. Duduk di depan adalah adik perempuan dan ibu Ita F. Nadia dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) yang dengan sabar mendampingi kami.

Dalam perjalanan, mobil jenazah yang kami tumpangi ditembaki aparat. Sungguh luar biasa kebrutalan itu. Mereka tak peduli terhadap bendera palang merah yang sudah kami lambai-lambaikan. Sopir saat itu berteriak, “Mobil kita ditembaki. Tundukkan kepala! Cepat keluarkan bendera palang merah, kibarkan cepat-cepat!” Tembakan itu mengenai bagian bawah dekat roda belakang sebelah kanan. Dari suara benturan peluru ke badan mobil, jelas itu bukan peluru karet.

Pukul 10.30 malam, otopsi di RSCM selesai. Jenazah dipindah ke Ruang Jenazah Rumah Sakit St. Carolus untuk dimandikan dan didoakan. Selanjutnya, kami membawa pulang jenazah ke rumah, di Komplek Pegawai Setjen DPR IV/46, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, pada pukul 1 dini hari, Sabtu 14 November 1998.

Jumat Kelabu itu mengawali penderitaan keluarga kami, hingga kini.

Di tengah kesedihan, kira-kira pukul 6 pagi, waktu itu Wawan masih disemayamkan di rumah, datang wartawan televisi – seingat saya RCTI, mewawancarai saya. Dia minta tanggapan saya mengenai ucapan Panglima ABRI Jenderal Wiranto yang mengatakan bahwa aparat bersenjata baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun polisi yang bertugas di sekitar Semanggi tidak dipersenjatai dengan peluru tajam. Kata Wiranto pula, peluru yang mengenai para korban bukan peluru standar ABRI.

Ketika itu saya berkomentar dengan nada kesal, kurang lebih begini: “Lalu, peluru yang mengenai korban hingga tewas itu punya siapa? Punya pemulung? Yah, dia ingin menghindar, dia ingin cuci tangan, dia ingin lari dari tanggungjawab. Dia memang pintar bersilat lidah dan bersilat sikap. Dia selalu putar otak untuk mencari kambing hitam, dan untuk membentengi diri!”

Entah mengapa, setiap disinggung nama Wiranto, yang terbayang oleh saya adalah kejadian saat Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden RI, pada tanggal 21 Mei 1998. Tertayang jelas di televisi, bagaimana Wiranto ketika itu cepat-cepat merapat ke mikrofon dan berbicara tentang hal yang tidak begitu penting, normatif saja. Kesan saya, Wiranto ketika itu tidak lebih dari sekadar ingin setor muka atau cari muka kepada keluarga Cendana.

Wawan dalam Kenangan

Wwawan, nama lengkapnya B.R. Norma Irmawan, bukanlah anak tunggal. Dia mempunyai adik perempuan bernama B.R. Irma Normaningsih, yang ketika itu kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI).

Wawan amat santun kepada kami orangtuanya, juga kepada siapa pun, dan sangat sayang kepada adiknya. Setiap pulang kuliah, selalu menanyakan keadaan adiknya. Kalau adiknya sudah ada di rumah, selalu menanyakan bagaimana kuliahnya. Suasana di keluarga kami ketika itu selalu ceria.

Kini, keluarga kami tidak utuh lagi. Kami tinggal bertiga. Suasana di rumah tak lagi disejukkan oleh gelak tawa. Harapan-harapan kami atas diri Wawan pun pupus sudah. Begitu pula perlindungan Wawan atas diri adiknya, Irma, kini tidak lagi menjadi harapan.

Hubungan di antara kami memang dekat. Dulu, sambil makan di meja makan, kami berdiskusi kecil. Tak jarang Wawan melontarkan humor-humor segar. Suasana kedekatan yang sekarang tinggal kenangan itu kami abadikan melalui kalimat yang terpahat di pusara Wawan, “*Selamat jalan Wan, tak terperikan dukacita kami yang kau tinggalkan.*”

Wawan kini telah tiada. Dia telah istirahat di Pemakaman Umum Joglo, Jakarta Barat. Saat pemakaman, hadir ribuan mahasiswa dan masyarakat mengantar kepergiannya. Tak henti-hentinya berkumandang lagu “*Gugur Bunga*” dan “*Ibu Pertivi Menangis*,” terutama oleh teman-temannya sepergerakan untuk mewujudkan reformasi.

Saya pun masih ingat, ketika itu di kiri-kanan jalan terpasang bendera merah-putih setengah tiang. Sepanjang perjalanan menuju pemakaman, masyarakat berdiri di pinggir jalan mengungkapkan rasa belasungkawa. Ada yang melambaikan tangan, ada yang mengusap air mata, bahkan ada pula yang mengambil sikap hormat. Dan tak kami lupakan, sekaligus menyampaikan terima kasih, bahwa penduduk di sekitar Pemakaman Joglo tak segan menyediakan air minum untuk para ribuan pelayat.

Hasrat Wawan untuk mandiri memang cukup kuat. Hal itu mulai nampak setelah lulus sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di Bunda Hati Kudus Jelambar, Jakarta Barat. Dia memilih meneruskan ke sekolah menengah umum (SMU) yang berkualitas dan berasrama. Dia ingin mengelola sendiri uang sakunya. Maka dipilihlah SMU Van Lith yang berada di kota Muntilan, Jawa Tengah. Meskipun sebenarnya dia diterima pula di sekolah unggulan di Jakarta Barat, yaitu SMU 78.

SMU Van Lith adalah SMU-Plus. Selain harus tekun belajar, para siswa juga dilatih kepekaannya terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan. Ada pembinaan ketrampilan, ada pula peluang untuk memupuk jiwa *leadership* atau kepemimpinan. Pendidikan di SMU Van Lith berlangsung ketat. Sistem gugur bagi siswa yang tidak naik kelas diberlakukan. Wawan melaluinya dengan mulus.

Pada tahun 1996, Wawan masuk kuliah di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Unika Atma Jaya Jakarta. Wawan pernah bercita-cita ingin menjadi ekonom sekaligus pelaku bisnis. Keinginan itulah yang mendorongnya memilih Fakultas Ekonomi, meskipun bidang sosial dan politik juga tidak luput menjadi minatnya. Dia hanya sampai pada semester lima, karena peluru panas aparat telah merenggut hidup dan cita-citanya.

Saya sebenarnya berharap dia menjadi penegak hukum. Nama Norma Irmawan dulu saya ambil dari kata “norma” yang berarti kaidah, aturan, ketentuan; dan kata “irmawan” yang saya ambil dari kata irama yang berarti gerak atau dinamika kehidupan masyarakat. Namun, rupanya Wawan kurang berminat melanjutkan studi di bidang hukum.

Wawan punya banyak teman. Telepon di rumah selalu berdering dari teman-temannya. Ibu dan adiknya sering bercanda seperti menjadi sekretarisnya, yang harus mencatat pertanyaan atau pesan buat Wawan. Misalnya, jadwal dan tugas kuliah, rapat Badan Perwakilan Mahasiswa, rapat Mudika (Muda Mudi Katolik), dan rapat Tim Relawan untuk Kemanusiaan.

Begitu banyak kegiatannya. Tak mengherankan jika ban motor kesayangannya, Honda GL-Pro, nomor polisi B 5194 PO, yang baru dipakai tiga bulan sudah tampak aus. Banyak teman-temannya yang heran dan bertanya kapan Wawan sempat belajar jika dia begitu sibuk. Hasil ujiannya pun relatif tidak jelek. Setahu saya, Wawan hampir setiap hari minta dibangunkan oleh ibunya sekitar pukul 04.30 pagi untuk belajar. Katanya, dia lebih bisa konsentrasi belajar pada pagi hari.

Tidak sedikit waktu belajar Wawan yang tersita untuk kegiatan lain di luar perkuliahan. Dia aktif sebagai pengurus Muda-Mudi Katolik Paroki Meruya Selatan, Gereja Maria Kusuma Karmel,

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya Jakarta, Redaksi Majalah Internal Unika Atma Jaya “Warta”, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa, Computer Club, dan Perkumpulan Bela Diri Tunggal Hati Suci.

Beberapa hari menjelang kepergiannya, Wawan disibukkan oleh persiapan penyelenggaraan sebuah diskusi panel yang diadakan oleh Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta pada hari Senin 9 November 1998. Saat itu sebenarnya kesehatan Wawan belum pulih. Dia baru saja opname di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta dari tanggal 4 sampai 7 November 1998 untuk menjalani operasi polip.

Sejak kecil, Wawan memang hobi membaca, di samping olahraga bulu tangkis. Karena itu ketika terjadi Perang Teluk, meskipun dia masih duduk di sekolah dasar tetapi bisa menceritakan secara runtut kronologi Perang Teluk, bahkan mengulas kekuatan negara-negara yang terlibat. Waktu itu saya dan isteri merasa heran, ternyata Wawan mempunyai ingatan yang kuat dan kreatif. Karena buku bacaan di rumah terbatas, dia sering meminjam buku di perpustakaan sekolah. Bahkan sejak Kelas IV SD ia sudah berinisiatif mendaftarkan diri menjadi anggota Perpustakaan Pemda Jakarta Barat.

Sering, sepulang sekolah, dia tidak ikut mobil jemputan dan naik kendaraan umum ke gedung perpustakaan. Pernah saya lihat dia meminjam buku mengenai konstruksi rumah, tata ruang kota, data penduduk Jakarta Barat. Rasa was-was kami sebagai orangtua jelas ada, mengingat dia masih kecil dan bepergian jauh dari rumah. Tapi kalau dilarang secara ketat, saya khawatir inisiatif dan kreativitasnya tidak berkembang.

Memanfaatkan waktu atau kesempatan untuk meningkatkan diri adalah ciri kehidupan Wawan. Sebenarnya Wawan meninggalkan sejumlah karya tulis serta puisi. Sayang, hanya beberapa saja dari tulisan dan puisi itu yang kini masih tersimpan. Menurut teman-temannya, karya tulis Wawan tersimpan di sebuah disket, namun sampai sekarang saya belum menemukan disket itu.

Langkah Mencari Keadilan

Keadilan tak bisa hanya ditunggu, melainkan harus diperjuangkan. Berhasil atau tidak memang banyak faktor yang menentukan. Untuk itu, sikap optimistis disertai langkah-langkah kongkrit perlu terus dipertahankan. Itulah kesimpulan saya setelah sekian lama saya, bersama keluarga korban yang lain, malang melintang menuntut kebenaran dan keadilan.

Ketika peristiwa masih segar, tangis keluarga korban memang penuh makna dan mampu mengundang empati orang. Namun dengan berjalannya waktu, apalagi masyarakat kita mudah terjangkit penyakit “lupa”, tangis kini hampir-hampir tidak lagi punya arti. Semangatlah yang harus dipupuk.

Meskipun demikian, mengandalkan semangat semata juga tidaklah cukup. Kami juga harus menguasai permasalahan. Berdasarkan kesadaran inilah maka sejak awal melangkah menuntut keadilan, saya selalu berusaha mengetahui perkembangan kasus.

Tragedi Semanggi I menewaskan sekitar 17 orang, termasuk 3 orang anggota Pam Swakarsa. Enam orang di antaranya adalah mahasiswa, yaitu : 1. B.R. Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Unika Atma Jaya Jakarta, 2. Sigit Prasetyo, mahasiswa Universitas Persada Indonesia-YAI, 3. Teddy Mardani, mahasiswa Institut

Teknologi Indonesia, Serpong, 4. Engkus Kusnaedi, mahasiswa Universitas Jakarta. 5. Heru Sudiby, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rawamangun, 6. Muzamil Joko, mahasiswa Universitas Indonesia.

Pada umumnya kami keluarga korban tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau mau menuntut, ke mana? Mestinya, untuk kasus pidana, apalagi yang mengancam kepentingan publik, aparat penegak hukum proaktif melakukan pengusutan. Tetapi sampai berbulan-bulan kami menunggu, tak ada geliat apapun dari aparat penegak hukum.

Dalam sebuah audiensi keluarga korban Tragedi Semanggi I dengan KontraS, tepatnya pada 5 Februari 1999, saya mendapat informasi bahwa tidak ada satu pun instansi yang menyatakan bertanggungjawab. Juga belum ada klarifikasi terhadap berbagai pernyataan pimpinan ABRI. Sementara itu proses pengusutan oleh Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya juga tidak menunjukkan kemajuan.

Pada 9 Februari 1999, kami bertiga, saya, isteri (Sumarsih), dan anak saya (B.R. Irma Normaningsih) mencoba mendatangi Pomdam Jaya. Kami bermaksud meminta fotokopi *visum et repertum* atas nama B.R. Norma Irmawan untuk dokumentasi pribadi.

Permintaan itu tidak dikabulkan. Alasannya, visum belum digunakan dalam persidangan. Dan ketika saya bertanya tentang kabar penyelesaian kasus, tidak ada jawaban tegas. Hanya sedikit penjelasan yang saya terima. Semua penjelasan kepada pihak luar, katanya, harus menunggu petunjuk Panglima ABRI. Sejak itu, saya mulai merasakan tanda-tanda bahwa institusi militer ingin menutup keadilan bagi keluarga korban. Semangat melindungi anggota kelompok (*l'esprit du corps*) begitu mengemuka.

Wawan adalah anggota Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK). Sejak Tragedi Semanggi I terjadi, tercipta kedekatan antara saya sekeluarga dengan TRuK. Kami pun kemudian mengajak para keluarga korban Tragedi Semanggi I yang lain untuk bergabung dengan TRuK.

Ketika itu TRuK sudah melakukan pendampingan terhadap korban dan keluarga korban Kerusakan Mei 1998. Dari beberapa kali pertemuan, timbul pemikiran tentang perlunya keluarga korban berhimpun. Maka terbentuklah sebuah paguyuban yang terdiri dari keluarga korban Semanggi I, keluarga korban kerusakan Mei 1998, dan TRuK.

Sejak itu keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia mendapatkan pendampingan dari TRuK dan KontraS. Kami mendatangi dan beraudiensi dengan berbagai pihak, misalnya Pusat Polisi Militer TNI, Fraksi ABRI DPRRI, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRRI, Komisi Hukum DPRRI, Fraksi Utusan Golongan MPRRI, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia, Polisi Militer Kodam Jaya, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Departemen Pertahanan dan Keamanan, Istana Merdeka, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Kejaksaan Agung.

Peradilan Militer Bukan Pilihan

Dalam pertemuan-pertemuan korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, juga ditelaah berbagai kasus. Dari telaahan itu berhasil disimpulkan bahwa antara

Tragedi Semanggi dan Tragedi Trisakti ada korelasinya. Dari sisi perjuangan reformasi, Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS) merupakan derap perjuangan mahasiswa menentang pemerintahan otoriter Orde Baru yang selama 32 tahun dikomandani Presiden Soeharto.

Pada Tragedi Trisakti, mahasiswa berjuang menancapkan tonggak reformasi. Lalu, Tragedi Semanggi I dan Semanggi II, mahasiswa berjuang mempertahankan reformasi. Dalam serangkaian perjuangan itu mahasiswa menghadapi kebrutalan aparat bersenjata. Kami pun berpendapat bahwa kasus Semanggi dan kasus Trisakti tidak dapat dipisahkan.

Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 terjadi akibat aparat bersenjata secara membabi-butu menembaki mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta, yang sedianya mereka akan melakukan *long march* ke DPR menuntut Presiden Soeharto mundur dari kursi kekuasaan.

Empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dalam peristiwa tersebut yaitu Elang Mulya Lesmana, Hendriawan Sie, Herry Hartanto, dan Hafidin Royan. Tragedi Semanggi I 13 November 1998 terjadi juga akibat aparat bersenjata membabi-butu menembaki mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi damai menolak Sidang Istimewa MPR pada masa pemerintahan B.J. Habibie.

Tragedi Semanggi II, 24 September 1999, juga akibat aparat bersenjata yang membabi-butu menembaki mahasiswa dan masyarakat umum ketika mereka melakukan unjuk rasa menolak rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Korban meninggal dalam peristiwa tersebut adalah Yap Yun Hap, mahasiswa Universitas Indonesia, dan beberapa warga masyarakat.

Begitu tragedi TSS terjadi, institusi ABRI terkesan berupaya menyelamatkan diri. Orang pertama di ABRI cepat-cepat menyampaikan pernyataan bahwa aparat di lapangan tidak ada yang membawa peluru tajam.

Puspom c.q. Pomdam Jaya melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang mengarahkan penyelesaian kasus TSS pada Peradilan Militer. Peradilan Militer memang cukup beralasan, paling tidak untuk waktu itu. Ketika itu belum ada alternatif lain. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia baru diatur oleh sebuah undang-undang yang terbit pada tahun 2000 yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Korban dan keluarga korban meragukan obyektivitas Peradilan Militer. Khawatir proses hukum itu bakal direduksi menjadi semacam panggung sandiwara. Hanya pelaku di lapangan saja yang bakal disentuh.

Seperti diketahui, Tim Penuntasan Kasus Tragedi Trisakti 12 Mei (TPK-12 Mei) sudah melakukan berbagai upaya, termasuk bekerjasama dengan Mahkamah Militer. Namun, hasilnya, kasus ini hanya ditetapkan sebagai kesalahan individu pelaksana di lapangan. Si pemberi komando tidak tersentuh alias terlindungi. Hal ini sangat mengganggu keadilan mengingat baik penyidik, penyidik, hakim, oditur, pelaku, maupun alat bukti dan lain sebagainya telah dikuasai oleh institusi ABRI. Belum lagi semaraknya *l'esprit du corps* yang pasti akan mempengaruhi proses hukum.

Sementara itu Komnas HAM pada waktu itu tidak bisa diharap banyak oleh korban dan keluarga korban. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 76 ayat (1), Komnas HAM hanya memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Komisi tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan.

Walhasil, setiap kali korban dan keluarga korban peristiwa TSS melakukan audiensi dengan komisi tidak pernah membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Komisi baru mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan setelah terbit UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada 23 November 2000.

Dengan terbitnya undang-undang tersebut, terbuka peluang bagi korban dan keluarga korban untuk mendesak agar kasus TSS diselesaikan melalui Pengadilan HAM *ad hoc*. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang ini mengatur bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*. Sedangkan ayat (2) Menentukan bahwa Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

Secercah Harapan

Terbitnya UU No. 26 Tahun 2000 memberi harapan baru bagi korban dan keluarga korban. Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II tidak akan dianggap kadaluwarsa karena undang-undang tersebut menganut asas retroaktif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1).

Poin berikutnya, terhindarnya penyelesaian melalui Peradilan Militer yang amat diragukan obyektivitasnya. Terbuka juga kemungkinan tidak hanya pelaku di lapangan saja yang akan diadili, tetapi juga para komandan atau atasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42.

Kami merapatkan barisan. Korban dan keluarga korban yang mendapat pendampingan dari mahasiswa, sejumlah lembaga nonpemerintah seperti KontraS, TRuK, PBHI, Elsam, dan

berbagai elemen masyarakat peduli HAM melakukan pendekatan terhadap Komnas HAM, DPR, dan Kejaksaan Agung.

Pendekatan terhadap DPR disertai harapan agar DPR mau mendesak pihak yang berwenang agar kasus TSS tidak dipetis-eskan. Ternyata, hasilnya mengecewakan. Panitia khusus DPR untuk Kasus Trisakti dan Semanggi I-II yang dibentuk pada 15 Januari 2001, sebenarnya memiliki kewenangan untuk memantau proses penyelesaian kasus TSS. Namun, Pansus DPR merekomendasikan untuk meneruskan Pengadilan Umum/Militer yang telah dan sedang berjalan.

Sebuah kesalahan besar dilakukan DPR, terutama dalam hal kewenangan untuk menentukan kompetensi peradilan. Keputusan yang sesungguhnya menyeleweng dari fungsi legislatif. Mestinya, parlemen tidak memiliki kewenangan sejauh itu, karena memang tidak ada dasar hukum yang membenarkannya.

Pansus DPR pun terbukti rendah tingkat partisipasinya. Bahkan banyak dugaan muncul, bahwa sudah terjadi konspirasi antara mereka yang ada di DPR dengan militer untuk menghindari penyelesaian melalui Pengadilan HAM *ad hoc*. Hal ini terlihat pada keputusan Pansus DPR yang merekomendasikan bahwa kasus penembakan mahasiswa dalam peristiwa TSS tidak berindikasikan pelanggaran HAM berat, sehingga bisa diselesaikan melalui Peradilan Militer. Pada hal, dari hasil temuan baik KPP HAM maupun TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta), terdapat banyak unsur yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Dan seperti yang dimuat dalam media massa, terdapat 19 perwira tinggi TNI/Polri yang oleh KPP HAM dianggap turut bertanggungjawab.

Proses mencari kebenaran dan menuntut keadilan lagi-lagi harus berbenturan dengan prosedur hukum. Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM terbentur masalah dalam melakukan pemanggilan terhadap para perwira tinggi yang diduga terlibat.

Sikap Kejaksaan Agung yang berulang kali mengembalikan berkas perkara dengan alasan prosedural memperburuk situasi. Rekomendasi Pansus DPR yang menyatakan tidak adanya pelanggaran sungguh melukai kami. Padahal, masyarakat tahu bahwa peristiwa TSS merupakan prahara besar yang menelan korban serta melibatkan pelaku yang beragam namun terkomando.

Rekomendasi KPP HAM

KPP HAM dalam rekomendasinya atas kasus Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II menyatakan bahwa pelanggaran HAM telah terjadi, antara lain:

- (1) Pembunuhan secara sistemik di berbagai tempat dalam waktu panjang, yakni Mei dan November 1998 serta September 1999.
- (2) Penganiayaan secara berulang terhadap mahasiswa dan anggota masyarakat yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri, di Universitas Trisakti, Universitas Atma Jaya Jakarta, dan Semanggi dengan akibat korban fisik.
- (3) Perkosaan atau bentuk kekerasan lain yang setara, terutama pada saat peristiwa Mei 1998, pada sejumlah perempuan sehingga mereka menderita trauma serta penderitaan fisik dan mental.
- (4) Penghilangan paksa, pada 1998, terhadap 13 orang aktivis dan anggota masyarakat, yang hingga kini belum jelas keberadaannya.
- (5) Perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik, termasuk penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan sewenang-wenang dan melampaui batas-batas kepatutan. Unsur serangan yang meluas dan atau sistemik, yang menjadi pengertian standar dalam pelanggaran HAM

berat, juga terdapat dalam peristiwa TSS. Bahkan serangan yang didefinisikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi, juga sangat kental menyertai peristiwa TSS tersebut.

Dalam tragedi TSS, aparat TNI/Polri tidak mengindahkan standar internasional tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparaturnya penegak hukum.

Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dapat diidentifikasi sebagai serangan sistemik. Penelusuran fakta lapangan menunjukkan :

- (1) Pernyataan verbal yang menunjukkan adanya kebijakan menyerang dengan kekerasan terhadap mahasiswa.
- (2) Adanya rencana menghadapi gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat yang secara formal dijabarkan dalam kebijakan Operasi Mantap ABRI (1997-1998) dan Operasi Mantap Brata (1999). Kedua kebijakan itu kemudian diturunkan dalam berbagai bentuk operasi dan wilayah (di berbagai Kodam) dengan bentuk penghadangan dan penyerangan terhadap aksi mahasiswa pada tiga tragedi tersebut.
- (3) Adanya tujuan politik yang ingin dicapai dari penyerangan itu, yakni untuk mempertahankan rezim politik saat itu - baik Soeharto maupun B.J. Habibie. Dalam konteks mencapai tujuan politik inilah maka mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan dipersepsikan sebagai “perusuh negara”.
- (4) Pengerahan pasukan dengan segala peralatan kekerasan secara masif.

Sebagai contoh, dalam Tragedi Semanggi I dikerahkan 18.040 pasukan TNI dan Polri, belum termasuk kekuatan sipil seperti Pam Swakarsa yang dihadapkan pada aksi-aksi mahasiswa. Polda Metro Jaya melibatkan kurang-lebih 125 ribu warga sipil pada Tragedi Semanggi I.

Dalam tiga tragedi tersebut unsur meluas terpenuhi. Penyerangan dilakukan secara berulang-ulang dengan penembakan secara membabi-buta dan pemukulan terhadap warga sipil. KPP HAM untuk kasus TSS, setelah menemukan fakta kemudian meminta pertanggungjawaban atas tragedi TSS dalam dua kategori yaitu:

- (1) Pertanggungjawaban secara langsung oleh mereka yang melakukan salah satu atau lebih dari bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
- (2) Pertanggungjawaban oleh mereka karena kapasitas sebagai penanggungjawab komando. Tanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan tersebut berada pada mereka yang memiliki tugas dan kewenangan pada tiga tingkat, yakni individu yang diduga :
 - Melakukan kejahatan kemanusiaan secara langsung di lapangan, yaitu sejumlah aparat TNI dan Polri.
 - Melakukan kejahatan kemanusiaan karena tindakan dan posisinya di tingkat komando pengendali operasi lapangan. Mereka adalah pemilik wewenang dan pengendalian efektif terhadap pasukan di lapangan.
 - Melakukan kejahatan kemanusiaan karena tindakan membiarkan dan posisi di tingkat komando strategi dan kebijakan, di mana mestinya mereka melakukan pencegahan atau menghentikan jatuhnya korban.

Atas dasar hasil penyelidikan yang dilakukan KPP HAM, Komnas HAM kemudian melakukan pemanggilan terhadap 19 perwira tinggi TNI/Polri yang dianggap bertanggungjawab atas kasus

TSS. Para perwira tinggi tersebut di antaranya adalah: Jenderal TNI (Purn) Wiranto (mantan Panglima TNI), Jenderal Pol (Purn) Diby Widodo, Jenderal (Pol) Roesmanhadi (Mantan Kapolri), Mayjen TNI Sjafrie Syamsuddin, Mayjen TNI Djaja Suparman (mantan Pangdam Jaya), Irjen Pol. Hamami Nata dan Irjen Pol. Nugroho Jayusman (mantan Kapolda Metro Jaya), dan sejumlah perwira menengah TNI/Polri.

Meskipun pemanggilan ini hanya bermaksud memeriksa, bukan menjatuhkan vonis, namun pemanggilan tersebut ternyata ditolak. Alasannya, eksistensi KPP HAM tentang kasus TSS dipertanyakan. Alasan kedua, DPR telah merekomendasikan bahwa kasus TSS bukan pelanggaran HAM berat.

Padahal, sebagai mantan pejabat penegak hukum, seharusnya mereka tahu bahwa rekomendasi DPR bukan produk hukum dan karenanya tidak mengikat secara hukum. Sejumlah analisis menilai bahwa pembangkangan sejumlah perwira itu adalah unjuk kekuatan militer, apalagi mengingat KPP-HAM hanyalah institusi sipil.

Hambatan penyelesaian kasus TSS juga datang dari Kejaksaan Agung, yang menolak hasil penyelidikan Komnas HAM oleh KPP-HAM dengan berbagai alasan, di antaranya adalah karena keterangan dari penyelidikan tanpa melalui sumpah sebagaimana dirumuskan oleh KUH (Kitab Undang-Undang Hukum) Acara Pidana tentang penyelidikan.

Menurut Kejaksaan Agung, hasil penyelidikan KPP HAM tidak dapat dijadikan bahan penuntutan. Di samping berbagai alasan teknis administratif, Kejaksaan Agung kembali berlindung di balik rekomendasi DPR yang menyatakan bahwa kasus TSS bukan pelanggaran HAM berat. Akibatnya, berkas penyelidikan Komnas HAM tentang kasus TSS bolak-balik dari Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung dan sebaliknya.

Berikut catatan pengembalian berkas penyelidikan Komnas HAM oleh Kejaksaan Agung :

- (1) Pada 21 Mei 2002. Alasannya, hasil penyelidikan hanya berupa transkrip wawancara. Penyelidik tidak melakukan sumpah jabatan.
- (2) Pada 13 Agustus 2002, dengan alasan: saksi dan penyelidik harus disumpah, para terdakwa dalam kasus Trisakti sudah divonis oleh Mahkamah Militer Tinggi II di Jakarta dan kasus Semanggi I dan Semanggi II masih dalam proses Polisi Militer Kodam Jaya.
- (3) Pada 30 Oktober 2002, dengan surat pemberitahuan penolakan menindaklanjuti hasil penyelidikan KPP HAM TSS.
- (4) Pada 8 Desember 2004, dengan surat pemberitahuan penolakan menindaklanjuti hasil penyelidikan KPP HAM TSS.

Kemudian, Komnas HAM mengembalikan berkas penyelidikan tersebut kepada Kejaksaan Agung pada 6 Januari 2005.

Rekomendasi DPR Yang Menyakitkan

Akibat desakan publik, DPR pada 15 Januari 2001 menerbitkan keputusan tentang pembentukan Pansus DPR mengenai kasus TSS. Pansus beranggota 50 orang dari 10 Fraksi, dengan tugas "... untuk memantau proses penyelesaian kasus Trisakti dan kasus Semanggi I dan II."

Hasil kerja Pansus adalah "rekomendasi" yang kemudian dilaporkan kepada Badan Musyawarah DPR. Rekomendasi ini dicapai dengan voting pada 27 Juni 2001. Menurut daftar hadir, anggota Pansus yang hadir sebanyak 26 orang, tetapi pada saat voting berlangsung, ternyata yang hadir hanya 19 orang.

Adapun hasil voting sebagai berikut: 14 suara setuju merekomendasikan penyelesaian melalui Pengadilan Umum/Militer dengan alasan bahwa tragedi TSS bukan pelanggaran HAM berat. Ada lima suara setuju dengan rekomendasi kepada Presiden untuk mengeluarkan Keppres tentang pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*.

Akhirnya, laporan Pansus kepada Sidang Paripurna DPR, 9 Juli 2001, merekomendasikan untuk meneruskan Pengadilan Umum/Militer yang telah dan sedang berjalan. Rekomendasi inilah yang kemudian dikenal sebagai “Rekomendasi DPR,” yang mengakibatkan kasus TSS dalam posisi menggantung. Rekomendasi ini juga yang selalu dijadikan alasan oleh Kejaksaan Agung untuk tidak menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.

Kami, korban dan keluarga korban serta masyarakat peduli HAM, beraudiensi dengan Ketua DPR Ir. Akbar Tandjung, 9 Juli 2003. Akbar berjanji mengadakan Rapat Gabungan antara Komisi yang membidangi masalah hukum, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM guna membicarakan Rekomendasi DPR tersebut. Janji itu tidak pernah ada realisasinya.

Setelah keanggotaan DPR berganti periode, dalam pertemuan Komisi Bidang Hukum DPR dengan korban/keluarga korban serta masyarakat peduli HAM pada awal Januari 2005, anggota Komisi Hukum menyatakan bahwa seharusnya Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Menurut Komisi Hukum DPR, Rekomendasi DPR tahun 2001 itu bukan produk hukum dan tidak mengikat secara hukum. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 30 Juni 2005, muncul kesepakatan seluruh Fraksi di Komisi Hukum yang menghendaki agar kasus TSS diungkap kembali.

Awalnya, Ketua DPR Agung Laksono terkesan mendukung. Dalam audiensi dengan korban dan keluarga korban serta masyarakat peduli HAM, pada 14 September 2005, Agung Laksono menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui prosedur formal sesuai mekanisme yang berlaku. Kesepakatan tersebut akan dibahas dalam Rapat Bamus DPR pada 22 September 2005.

Namun, lagi-lagi kami kecewa. Rapat Bamus pada 22 September 2005 itu, kasus TSS tidak masuk dalam agenda pembahasan.

Perjuangan Berlanjut

Kemudian pada 7 Desember 2005, korban dan keluarga korban beraudiensi dengan Komisi Hukum DPR dan diterima oleh perwakilan dari 9 Fraksi. Tidak ada wakil dari Fraksi Partai Golkar yang hadir.

Saat itu Komisi Hukum DPR berjanji akan mendesak melalui Sidang Paripurna DPR agar kasus TSS dibuka kembali. Dalam Rapat Paripurna DPR, 12 Januari 2006, Nursjahbani Katjasungkana (Fraksi PKB) dan Drs, Al Muzzammil Yusuf (Wakil Ketua Komisi Hukum) mengajukan interupsi, meminta Pimpinan DPR segera memroses rekomendasi Komisi Hukum yang sepakat membuka kembali kasus TSS.

Ketua DPR Agung Laksono, Pimpinan Rapat Paripurna DPR, menerima dan menampung interupsi tersebut dan merekomendasikan agar mekanismenya dibahas di Rapat Bamus DPR.

Pada 21 Februari 2008, secercah harapan datang. Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan menggugurkan kata “dugaan” pada Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

(UUD) 1945. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* harus memperhatikan hasil penyelidikan dari Komnas HAM dan hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung.

Keputusan MK tersebut memancing reaksi dari Menteri Pertahanan dan Kejaksaan Agung. Pada 17 Maret 2008, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, se usai pertemuan dengan mantan Menhankam/Pangab Wiranto dan Kababinkum Mabes TNI Laksda Henry Willem di Dephan, mengeluarkan imbauan kepada para purnawirawan TNI terutama mereka yang diduga terkait atau melakukan pelanggaran HAM berat, tidak usah hadir memenuhi panggilan Komnas HAM. Alasan Juwono, kewenangan hukum Komnas HAM diragukan dan UUD 1945 menganut asas non-retroaktif.

Putusan MK nampaknya juga berimbas pada tingkah Jampidsus Kejaksaan Agung Kemas Yahya Rahman. Pada 13 Maret 2008, Kemas mengatakan bahwa berkas penyelidikan pro-yustitia Komnas HAM tentang kasus TSS serta kasus Penghilangan Orang Secara Paksa telah hilang. Pernyataan ini dibantah oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung Bonaventura Daulat Nainggolan, 27 Maret 2008.

Tak berselang lama, tepatnya pada 1 April 2008, Kejaksaan Agung mengembalikan empat berkas hasil penyelidikan Komnas HAM itu ke Komnas HAM melalui kurir yaitu: (1) Kasus Wamena-Wasior, untuk dilengkapi; (2) Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, tidak akan ditindaklanjuti dengan alasan sudah diselesaikan melalui Peradilan Militer; (3) Kasus Kerusakan Mei 1998, dengan catatan menunggu terbentuknya Pengadilan HAM *ad hoc*; dan (4) Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa, juga menunggu terbentuknya Pengadilan HAM *ad hoc*.

Sebagai orangtua korban kasus Semanggi I, saya dan keluarga tidak pernah mendapat informasi bahwa kasus tersebut pernah disidangkan di Peradilan Militer. Dokumen dan peristiwa yang saya ikuti dengan seksama menunjukkan, justru kasus Semanggi I inilah merupakan satu-satunya kasus yang belum pernah disentuh oleh pengadilan mana pun.

Ternyata, hasil penyelidikan Komnas HAM mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu kini menjadi “bola panas” untuk saling lempar antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.

Penutup

Tragedi Semanggi I kini menyisakan derita bagi saya dan keluarga. Bukan hanya karena kami telah kehilangan orang yang kami cintai, tetapi juga dalam perjalanan waktu kami menghadapi banyak kekecewaan. Kami meniti hari dengan tragedi demi tragedi.

Penegak hukum yang seharusnya berpihak pada korban dan keluarga korban demi keadilan, justru berpihak atau melindungi mereka yang diduga terkait dengan tindak pelanggaran HAM berat. Entah karena mereka dihinggapi rasa takut untuk berbuat, entah karena kalkulasi politik.

Yang menyayat perasaan adalah bahwa kasus Semanggi I dan berbagai kasus pelanggaran HAM berat cenderung dijadikan komoditas politik. Pada masa kampanye pemilihan umum, misalnya, kasus ini dijadikan daya tawar. Dalam *fit and proper test* terhadap kandidat Panglima TNI, kasus ini menjadi salah satu materi pertanyaan. Kami khawatir bila kasus Semanggi dan lain-lainnya hanya dijadikan sekedar “amunisi” untuk menyerang atau menjatuhkan lawan politik, sehingga kasus ini sengaja dibiarkan

terus menggantung untuk dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu oleh para elite politik.

Sepuluh tahun sudah kasus Semanggi I terbengkalai. Saya bersama keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia lainnya tak akan berhenti menuntut kebenaran dan keadilan. Kami percaya bahwa suatu saat keadilan akan berpihak kepada kami keluarga korban. Entah kapan.

Jakarta, Agustus 2008

SAYA INGIN BERTEMU WIRANTO

Oleh :

Mohammad Sani (Mamang)

Pagi menjelang siang, Rabu 13 Mei. Dari radio saya dengar ada kerusuhan. Ada ramai-ramai. Pukul 11 siang, saya mandi dan berangkat ke tempat nongkrong, Kebonpala. Saya pengangguran waktu itu.

Menjelang berangkat, saya berpesan kepada anak-anak dan isteri saya, “Ini ada kerusuhan. Anak-anak semua jangan kasih keluar rumah. Semuanya jangan ada yang keluar. Ini bahaya.”

Dua anak saya, Mohammad Ihwan (Iwan), 22 tahun, dan Mulyani (Mumung), 18 tahun. Hari-hari menjelang kejadian itu, kelakuan mereka baik sekali. Mengaji, kumpul sama kawan-kawannya. Si Mumung bahkan sempet ngedandanin Ame, Mamahnya.

Setelah pamit, saya berangkat ke Kebonpala, Jatinegara. Ini tempat saya biasa nongkrong. Saya naik mikrolet dari Klender. Sesampai di Stasiun Jatinegara, saya lihat jalan di sekitar stasiun sudah dipenuhi orang. Saking penuhnya, mikrolet itu tidak bisa berjalan menuju ke Kampung Melayu.

Saya lihat orang-orang membakar bis kota dan kantor sebuah bank. Lalu, ada bus patas jurusan Bogor. Beberapa orang berperawakan tegap, mungkin anggota Kopasus, saya tidak tahu dari mana. Orang-orang tegap itu ada yang bilang, “Boleh ambil, boleh ambil, tapi jangan dibakar.”

Ketika itu banyak orang mengambil barang-barang dari toko. Semua barang diangkut. Saya jadi penonton saja, tetap di dalam mikrolet untuk melanjutkan perjalanan ke Kebonpala.

Sampai di Jatinegara Plaza orang sudah penuh di sana. Ada juga yang hendak menyerang Pasar Regional Jatinegara. Tapi, di situ semua pintu masuk sudah dijaga. Akhirnya, orang mengarah menyerbu Yogya Plaza. Ramai-ramai menjarah Yogya Plaza.

Saya tidak terpengaruh, tetap di dalam mikrolet. Sampai akhirnya saya tiba di tempat tujuan, Kebonpala. Saya duduk, mengobrol dengan teman-teman, menonton orang pada mengangkut barang jarahan.

Lalu, saya ingat ada kotak infak majelis taklim yang ditiptkan di Jatinegara Plaza. Memang saat itu saya menjadi Ketua Umum Majelis Taklim Al Jihad. Seorang utusan guru mengaji bertanya kepada saya, “Itu kotak amal bagaimana?” Saya jawab, “Ambil saja. Sayang kalau hilang.”

Kami pun menuju Jatinegara Plaza, tak jauh dari Kebonpala. Saya menghadap petugas Koramil, Brimob, dan petugas berwenang yang lain. Kami minta izin ke Jatinegara Plaza, bukan untuk menjarah tetapi untuk mengambil kotak amal yang ditipt di sana. “Oh, silakan,” kata seorang petugas.

Di Jatinegara Plaza, saya melewati kantor Polres 705, Jakarta Timur. Tak ada polisi yang berada di luar, semua ada di dalam kantor. Aneh. *Kok* polisi tidak mengamankan situasi, malah *ngumpet* di dalam.

Di luar Gereja Bethel, tampak pasukan Kopassus dan berbagai kesatuan lain. Mereka berseragam lengkap dengan senjata. Saya tidak tahu sedang ada apa. Tujuan saya untuk mengambil kotak amal ke Jatinegara Plaza.

Masuk ke dalam Jatinegara Plaza, keadaan gedung sudah gelap. Kotak amal bisa saya ambil meskipun sudah penyok. Tampaknya

isi kotak cukup penuh, banyak orang beramal. Kotak amal saya ambil. Saya pamit pada anggota-anggota TNI dan Brimob yang ada di situ. “Pak, ini saya ambil kotak amal Majelis Taklim.”

Kotak saya serahkan kepada ustadz. “Ini kotak amal hasil yang kita taruh di Jatinegara Plaza, ini saya serahkan.” Kemudian, saya kembali ke Jatinegara Plaza, ingin tahu keadaan. Semakin banyak orang mengambil barang. Saya hanya jadi penonton.

Keadaan makin menjadi-jadi. Ratusan, mungkin ribuan, orang datang. Ada yang mau menyerang kantor polisi. Entah kenapa, saya tidak mengerti. Bukan urusan saya.

Pukul 1 dini hari, saya mau pulang. Sudah tidak ada mobil lewat dan semua jalan diblokir. Tidak boleh ada yang lewat. Aneh. Akhirnya, saya menumpang teman mengantar saya dengan sepeda motor. Banyak jalan ditutup, kami *muter-muter* tidak keruan.

Sampai juga saya di rumah. Ameh, isteri saya, melapor bahwa Iwan dan Mumung, dua anak saya, tidak ada di rumah sedari siang. Belum pulang. “Coba lihat di Yogya Plaza,” kata Ameh.

Segera saya menuju Yogya Plaza. Ternyata di sana sudah banyak orang juga, mencari keluarga yang hilang. Saya lihat Ibu Untung mencari anaknya. Dia tetangga saya juga.

Saya berusaha naik ke lantai 2 dan 3 Yogya Plaza. Tangganya sudah goyang. Ruangan di lantai 2 sudah gelap. Saya pakai senter. Tampak masih ada sisa nyala api. Hawanya panas. Saya nggak kuat, sangat panas, saya turun lagi ke lantai 1. Saya *ngadem* dulu, duduk termenung. Apa iya anak saya ada di sini? Apa iya?

Setengah jam kemudian, hawa di luar sudah dingin. Saya naik lagi ke atas. Senter saya nyalakan. Mayat-mayat tampak bertumpuk di tangga eskalator. Mungkin tadinya mereka berebut

mau turun, tapi banyak asap membuat mereka kehabisan oksigen.

Saat menyaksikan tumpukan mayat itu, muncul perasaan galau. Wah, mati *deb* anak saya. Tapi, saat itu kondisi gelap. Tidak bisa saya mencari dan memastikan mayat siapa di situ. Susah.

Saya pulang. Saya diam saja di rumah. Tak bisa tidur. Pukul 6 pagi, saya berangkat lagi ke Yogya Plaza. Tapi, lokasi sudah diblokir oleh pasukan TNI. Mayat dari atas sudah diturunkan satu per satu.

Ada orang yang memberi kabar, “Bang Mamang, di situ ada Si Mumung sama Si Iwan.” Langsung saya cari mayat mereka. Tidak ketemu. Ada salah satu mayat yang menurut perasaan saya, ini anak saya. Kaki dan tangannya sudah nggak ada. Copot. Kata petugas, mayat-mayat itu akan dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi.

Siangnya, saya dan saudara-saudara datang ke rumah sakit. Mayat-mayat itu tidak semuanya hangus terbakar. Ada yang luka kena tembak, mayatnya bolong, tidak bau hangus. Saya lihat bahkan yang satu mayat perempuan yang lagi hamil. Mayat-mayat itu diberi nomor.

Korban-korban dikelompokkan menurut wilayah kedatangan. Ada dari Jakarta Barat, Ciledug, Jakarta Timur, Klender, segala macam ngumpul di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo). Saya mencari di bagian Klender.

Ada mayat yang saya curigai sebagai anak saya. Saya tanyakan kepada orang pintar keturunan Arab, “Di mana mayat dari Klender ? Dia menjawab, “Itu nomor 59. Ambil.” Katanya lagi, “Anakmu yang perempuan jangan dicari. Dia sudah *ketiban* tangga eskalator dari lantai 3, sudah hancur jadi debu, *ndak* bisa dicari.”

Lalu, saya minta izin kepada petugas untuk membawa pulang mayat anak saya. Kepada petugas rumah sakit, saya bilang, “Jangan coba-coba mempersulit, saya lagi kena musibah, saya lagi susah. Kalau dipersulit, saya bantai.” Alhamdulillah, saya tidak dipersulit. Di luar rumah sakit, saya diwawancara pers Amerika, Belanda, dan banyak lagi.

Sesampai di rumah, segera saya kuburkan anak saya. Pada waktu itu, saya *ndak* punya kerja. Duit seperak pun saya tidak punya. Sudah jatuh *ketiban* tangga. Ada musibah, uang *nggak* ada. Namun, alhamdulillah, teman-teman pada datang membantu.

Saat penguburan, pengurus makam sampai hati mempersulit. “Bapak orang mana? Satu lubang Rp 200.000,” katanya. Saya marah sama Pak Haji –sekarang orangnya sudah mati. Akhirnya teman saya bayar. Sesudah dimandikan, didoakan, mayat langsung dikubur.

Setelah itu, ada beberapa orang dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) datang ke rumah. Mereka mendata korban. Keluarga korban diminta datang ke kantor TRuK di Jalan Arus. Kami mendapat pengarahan. Bahkan, pernah juga diberi uang Rp 200.000. Uang itu tidak membuat hati saya senang. Saya *nggak* menjual anak.

Bersama Kontras, kami melakukan berbagai demonstrasi. Ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kejaksaan Agung, Universitas Indonesia, juga jalan *long march* dari Monas ke Kampus Atmajaya bersama TRuK yang telah membentuk Paguyuban Korban/Keluarga Korban Tragedi Mei 98, Tragedi Semanggi I, dan Tragedi Semanggi II.

Saya diajak (almarhum) Munir ke DPR dan ke Kejaksaan Agung, bersama banyak aktivis lain. Di DPR kami bertemu semua

utusan fraksi. Anggota DPR itu ada yang berkata, “Saya tetap akan membela rakyat, apalagi yang menjadi korban.”

Pernyataan itu saya balas, “Ini Bapak mau membela rakyat yang mana? Apa orang-orang kecil begini, orang-orang yang nggak mampu harus dijadikan korban politik? Bapak harus membela rakyat kecil sebab seorang wakil rakyat bisa duduk di kursi ini hanya dengan dukungan 400.000 orang. Tanpa dukungan rakyat, nggak mungkin Bapak duduk di sini. Sedikit-sedikit berkomentar mau membela rakyat, tapi rakyat yang mana?”

Omongan saya disambut tepuk tangan. Saya sengaja nggak mau ngomong *kalem*. Uneg-uneg saya, semua saya *keluarin*. Saya sudah *kesel* sekali.

Sampai sekarang, sudah 10 tahun kami berjuang. Sudah ada Tim Pencari Fakta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tapi berkas kasus ditolak berkali-kali oleh Kejaksaan Agung.

Kasus kerusuhan ini sepertinya tidak akan terungkap. Apalagi, di kalangan keluarga korban sudah terpecah-pecah. Ada beberapa orang yang bilang si A sudah terima duit, si Anu sudah terima segala macam. Kalau benar begitu, kalau mau *islah*, mengapa sendiri-sendiri? Sedangkan kita inginnya berjuang bersama-sama.

Memang, Tuhan saja memaafkan umat yang bersalah kalau orang bersangkutan mau bertobat. Masa manusia sendiri tidak bisa memaafkan? Tapi, buat saya, yang bersalah harus diadili dulu. Tanpa dilihat usia, tanpa dilihat yang lain-lainnya. Orang bersalah harus diadili. Terserah pengadilan memutuskan apa. Kalau sudah diadili, keluarga korban ada kepuasan tersendiri. Seharusnya memang begitu. Tetapi hukum di Indonesia ini hanya untuk orang-orang pejabat, hukum tidak untuk rakyat kecil.

Nah, karena ini persoalan politik, ya susah. Semuanya kait-mengait. Kapolda pada waktu itu, Pak Hamaminata, sudah

meninggal dan tidak mungkin ditanyai lagi. Tapi, *kan* masih ada Wiranto, Prabowo Subianto, Syafri Syamsudin, yang harus dibawa ke meja hijau, harusnya begitu.

Komnas HAM jangan takut. Sampaikan yang benar itu benar. Jangan dibilang yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Saya ingat janji Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum menjadi presiden, yang katanya akan mengusut kasus ini. Harus kita tagih janji itu. Jangan didiamkan saja. Secara pribadi, sampai kapan pun saya tidak akan melupakan bahwa kami pernah disakiti dan dikorbankan.

Saat ini saya bergabung dengan Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat). Sebelumnya ada orang memberi tawaran, “Mau ikut Hanura nggak?” Spontan saya berpikir, *ah* ini ada kesempatan bertemu Wiranto.

Wah, saya memang ada tujuan tertentu. Saya mau berjuang sendiri untuk supaya suatu saat bisa menghadap penguasa Hanura. Saya mau bertanya pada dia, bagaimana tanggung jawab dia atas kerusuhan Mei 98. Dia kan pimpinan ABRI pada waktu itu.

Jadi, begitu ada tawaran bergabung dengan Hanura, saya spontan mengiyakan. Tanpa pikir-pikir lagi, saya kirim foto dan kelengkapan untuk bikin kartu anggota. Jadi cepat.

Tidak ada tujuan lain buat saya di Hanura. Ini program pribadi. Berjuang dengan jaringan keluarga korban kekerasan sudah terlalu melelahkan. Sudah sepuluh tahun. Di partai saya tidak mengincar jabatan. Biar bagaimana pun, suatu saat saya harus menghadap dan ngomong kepada Wiranto.

Jakarta, Mei 2008

KATAKAN, DIMANA MEREKA? TENTANG PENGHARAPAN DAN PERJUANGAN

oleh :
Mugiyanto

Tahun 2008 memiliki makna khusus bagi bangsa Indonesia. Ini saat kita memperingati seabad kebangkitan nasional dan sepuluh tahun gerakan reformasi. Namun, bagi saya pribadi, 2008 adalah tahun yang punya nilai amat personal.

Sepuluh tahun lalu, tepatnya tanggal 13 Maret 1998, saya diculik oleh segerombolan orang berbadan kekar. Mereka, para penculik itu, oleh Pengadilan Militer kemudian diketahui sebagai Tim Mawar dari Grup IV satuan elite TNI Angkatan Darat Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Itulah peristiwa yang menjadi titik awal dan penegas tekad saya. Bahwa yang saya perjuangkan adalah benar. Dan, bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan.

Saya dan kawan-kawan saya diculik dari berbagai tempat seperti rumah, kantor, dan jalanan. Kami diculik ketika sedang istirahat di rumah, berada di dalam mobil, makan di jalanan, atau sedang bekerja. Penculikan terjadi di pagi, siang, sore, malam, dan dini hari.

Setelah diambil, lalu kami disekap dan disiksa sambil diinterogasi. Beberapa dari kami akhirnya dikembalikan kepada keluarga. Tapi, banyak kawan yang dihilangkan, sampai hari ini.

Para penculik selalu mengatakan, kami diculik atau “diamankan” karena kami membahayakan pemerintah. Pemerintah merasa

terancam karena kami menginginkan presiden baru, sistem multipartai, kebebasan berpendapat dan berserikat, mendukung referendum untuk rakyat Timor Leste, menolak Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), atau menolak International Monetary Fund (IMF). Mereka tak pernah kekurangan alasan untuk menculik kami.

Dari Rusun Klender ke Cijantung

Ketika diculik, saya sedang berada di rumah kontrakan di Klantai 2, Rumah Susun Klender, Jakarta Timur. Rumah itu baru kami tinggali selama seminggu. Selain saya, ada Nezar Patria, Aan Rusdianto, dan Petrus Bima Anugerah yang tinggal di rumah itu.

Kami adalah pengurus Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), sebuah organisasi gerakan mahasiswa nasional yang berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Kami juga adalah bagian dari beberapa gelintir orang yang menjalankan PRD yang saat itu menjadi musuh utama pemerintah.

Jumat, 13 Maret 1998. Hari sial bagi saya. Pukul 18.30, saya baru pulang dari pertemuan dengan dua orang dari East Timor International Support Center di Menteng. Saya pulang dengan membawa beberapa kotak dari restoran Jepang, Hoka-Hoka Bento, makanan mewah bagi aktivis. Nezar dan Aan saya telepon, saya minta mereka menunggu di rumah.

Dua puluh menit kemudian, saya sampai di rumah kami di Klender. Saya ketuk pintu rumah, tak ada jawaban. Aneh. Ke mana Nezar dan Aan? Seorang perempuan, tetangga sebelah, berkata kepada saya, “Temannya sedang keluar, Mas. Katanya akan segera kembali lagi.”

Oke, saya masuk rumah. Mungkin Nezar dan Aan sedang keluar rumah sebentar. Tapi, aneh, begitu saya buka kunci pintu, di ruang tamu ada segelas air jeruk yang masih panas. Seisi ruangan pun acak-acakan.

Insting saya berkata, ada yang gawat sedang terjadi. Pesan lewat operator *pager* saya kirim kepada Nezar. “Nez, kamu di mana? Aku tunggu di rumah ya.” Dua kali saya mengirim pesan dan tak ada respon.

Lima menit kemudian, saya semakin risau. Berbagai kemungkinan buruk berseliweran. Maklum, saat itu kami memang sedang dalam masa perburuan. Kami dituduh menjadi dalang kerusuhan 27 Juli 1996, peristiwa penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Jakarta oleh orang-orang berbadan kekar dan berambut cepak, yang menyebabkan ratusan orang hilang dan meninggal.

Saya ingat, ada dua kawan yang menelepon ke rumah sore itu. Mereka berdua panik. Seorang diantaranya menangis sambil berpesan, “Kalian hati-hati, jangan ada yang tertangkap lagi.”

Bukannya membesarkan hati, pesan itu justru menguatkan bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang mengancam diri saya. Saya membayangkan puluhan kawan PRD yang sedang dipenjara saat itu, termasuk Budiman Sudjatmiko, Dita Sari, Petrus Harianto, dan lain-lain.

Ternyata benar. Saya mendekati jendela rumah kontrakan di lantai 2 itu. Gorden saya sibakkan sedikit. Badan saya lemas. Di bawah sana berjejer orang-orang berbadan tegap menatap saya. Dari jendela yang lain, pemandangan yang sama juga tampak. Saya sudah dikepung.

Berjingkat saya berjalan menuju dapur. Sempat terpikir untuk meloncat ke bawah dan melarikan diri. Tetapi, mustahil. Puluhan orang berbadan tegap sudah menunggu saya di bawah. Lemas badan saya. Terbayang kematian saat itu.

Dengan tenaga tersisa, saya raih saklar untuk mematikan lampu. Persis pada saat itulah mereka menggedor rumah. “Buka pintu! Buka pintu!” Gemetar seluruh badan saya.

Kunci pintu saya buka. Lalu, segera selusin orang masuk. Ada dua orang berpakaian tentara dinas lapangan, selebihnya berpakaian preman.

Seorang bapak tua berpeci seperti perangkat kelurahan berkata dengan sangat sopan dan menenangkan, “Mas, ikuti bapak-bapak ini saja ya.”

Setelah mengacak-acak rumah, tiga menit kemudian saya dibawa turun. Saya dinaikkan kendaraan menuju suatu tempat yang ternyata adalah Koramil Duren Sawit Jakarta Timur. Setengah jam “kami” diinterogasi di sini. Saya sebut “kami” karena ada “teman” yang juga ditangkap saat itu. Namanya “Jaka”, begitu dia memperkenalkan diri kepada saya.

Belakangan diketahui bahwa Jaka adalah perwira komando pasukan khusus (Kopassus). Dia salah satu anggota Tim Mawar yang ditugaskan untuk memastikan bahwa saya tidak jatuh ke tangan kesatuan lain. Setelah tiga menit itu, saya dinaikkan kendaraan lagi. Kali ini dengan mata ditutup.

Dan, dari sinilah, prosesi interogasi dan penyiksaan khas serdadu didikan Amerika dimulai.

Pada tanggal 13 malam sampai 15 Maret 1998 sore hari, saya disekap. Interogasi dan siksaan silih berganti. Mata ditutup. Dua

tangan dan dua kaki diikat di tempat tidur *velbed*. Tak ada baju melekat, saya hanya memakai celana dalam.

Saya dikasih makan nasi padang yang dibungkus kertas. Tapi, mana mungkin saya bisa makan karena tangan diikat. Mulut saya perih, pecah, dan hancur babak belur karena pukulan penyiksaan.

Dua kali saya dibawa ke toilet yang jaraknya kira-kira 50 meter dari tempat penyekapan dan penyiksaan. Tangan diikat dan mata tetap ditutup. Satu kali, tutup mata saya dibuka dan seseorang memotret saya. Saya tak pernah tahu wajahnya karena dia memakai sebo, penutup kepala yang hanya memperlihatkan sepasang mata.

Dari tempat penyiksaan, suara sirine selalu meraung-raung. Suhu ruangan sangat dingin. Alat setrum listrik kerap terdengar seperti bunyi cambuk. Saban kali alat laknat itu mengeluarkan bunyi, saya menjerit tak berdaya. Itu pertanda mereka segera datang menginterogasi dan menyiksa saya.

Dua hari dua malam saya paripurna mengalami penyiksaan. Dipukul, ditendang, dan ditampar di seluruh tubuh. Sekujur kaki dan tangan saya juga penuh dengan titik-titik setrum. Mungkin waktu itu badan saya mengandung arus listrik yang dialirkan alat laknat itu. Sungguh keji mereka.

Sesekali, para penculik sengaja memperdengarkan suara jeritan orang lain yang sedang disiksa. Saya mengenali jeritan Nezar Patria dan Aan Rusdianto yang sedang disiksa orang-orang biadab ini. Dari jeritan itulah saya sadar bahwa Nezar dan Aan sudah duluan mereka culik. Pesan *pager* yang saya kirim untuk Nezar, pasti diterima para penculik yang zalim itu. Wah, kalau begitu, Bima juga pasti mereka jebak dan sudah pula diculik.

Dua hari dua malam ini adalah hari-hari jahanam. Siksa fisik dan mental yang teramat sadis kami alami selama berbaring di *velbed* itu.

Saya, Nezar, dan Aan (kami kemudian menjadi paket 3 orang) juga sempat “berdiskusi” dengan para penculik. Hampir dua jam, tetap dalam keadaan berbaring dengan dua tangan dan kaki terikat, mata ditutup, dan hanya memakai celana dalam, kami disodori pertanyaan-pertanyaan menarik.

“Coba kalian jelaskan kebaikan dan keburukan IMF?”

“Bagaimana cara mengatasi krisis ekonomi Indonesia saat ini?”

“Mengapa kalian mendukung kemerdekaan Timor Timur?”

“Apa hubungan PRD dengan Amien Rais, Megawati dan Gus Dur?”

“Mengapa kalian anti Orde Baru?”

Bergantian kami menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, jawaban kami berhenti setiap mereka membentak kami. Anehnya, selama “diskusi” ini, sirene tak pernah berbunyi. Alat setrum tak pernah dipakai. Tak ada pula kekerasan fisik. Paling yang ada cuma bentakan. Saat itu saya menduga, sang interogator pastilah orang berpangkat tinggi. Sayang, saya tidak bisa menerka siapa dia.

Sang interogator juga menanyakan berbagai soal seputar PRD dan SMID. Mereka juga ingin tahu soal pimpinannya, termasuk tentang Wiji Thukul.

Dua hari kami berada di Guantánamo Indonesia itu. Berdasarkan kesaksian 9 korban penculikan yang telah dilepas dan diselidikan Pusat Polisi Militer ABRI, sebagai markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, akhirnya kami dipindahtanggankan ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Jakarta.

Akhirnya Takluk

Di Polda kami diperiksa dan dikenakan pasal-pasal subversi. Aktivitas kami dianggap mengancam keberadaan penguasa. Bersama Nezar dan Aan, saya ditahan di rumah tahanan Polda dalam sel isolasi. Saya berada di sel nomor 11, Aan nomor 9, dan Nezar ada di sel nomor 6. Kami tidak boleh berkomunikasi satu sama lain. Kami tidak boleh juga berinteraksi dengan para tahanan kriminal lain.

Namun, toh, para tahanan kriminal narkoba, pencurian, pencopetan, menunjukkan simpati dan dukungan mereka kepada tahanan politik seperti kami. Secara diam-diam, mereka memberi kami rokok, sabun mandi, sampo, makanan kecil, koran, dan bahkan buku. Mereka juga bersedia menyampaikan pesanku untuk Aan dan Nezar dan sebaliknya. Para tahanan kriminal itu akhirnya menjadi kurir bagi kami.

Pada suatu pagi, sekitar dua minggu setelah saya ditahan di Polda Metro Jaya, Kapten Arismunandar, kepala penyidik kasus saya menghampiri sel saya. “Mugi, ada yang datang membezukmu. Temuilah, kamu punya waktu 15 menit!”

Saya penasaran, siapa yang berani membezukku. Kawan-kawan PRD? Sebagian besar mereka menyelamatkan diri karena menjadi target Daftar Pencarian Orang (DPO). Mungkinkah itu Munir, Ori Rahman, atau Ester Jusuf, orang-orang dari Lembaga Bantuan Hukum yang menjadi pengacaraku?

Pintu sel dibuka oleh Kapten Arismunandar. Dengan mengenakan kaos oblong warna biru bertuliskan “Tahanan Polda Metro Jaya”, saya berjalan pelan ke arah ruang bezuk yang agak jauh, di dekat pintu masuk. Langkahku tiba-tiba terhenti ketika yang kulihat sedang duduk menunggu adalah bapak dan kakak perempuanku.

Saya dituntun Kapten Arismunandar untuk mendekati mereka. Airmataku mendadak tumpah. Saya menangis. Tak bisa mengucap satu kata pun untuk mereka. Aku peluk Pak Sipin, bapakku, lalu kakak perempuanku, Muyatin. Aku masih menangis, dan bisu!

Bapakku dan kakakku, dua orang kampung itu sungguh luar biasa. Walau dengan mata berkaca-kaca, bapaklah yang akhirnya memecah kebisuan.

“Gak opo-opo, Nang. Kowe ra usah khawatir. Mak’mu lan sedulur kabeh podho apik-apik wae. Yo wis, dilakoni wae. Kowe ora salah.”

(Tak apa, anakku lelaki. Kamu tak perlu khawatir. Ibu dan saudara-saudaramu semua baik-baik. Ya sudah, dijalani saja. Kamu tidak salah)

Aku masih tidak kuasa mengatakan apapun. Hanya menangis. Dan, lima belas menit yang berharga itu akhirnya berakhir. Saya harus kembali ke sel isolasi. Bapak dan kakakku harus kembali ke kampung untuk membawa kabar bahwa aku memang dipenjara dan menangis.

Di dalam sel isolasi, saya melanjutkan tangis. Saya membayangkan betapa Bapak, Ibu, dan semua saudaraku menjadi demikian repot karena “ulahku”. Saya telah “merepotkan” mereka. Dari hati yang paling dalam saya menyesal, sedih, dan akan meminta maaf pada mereka, atas “kerepotan” yang saya akibatkan.

Namun, saya tidak pernah menyesal, sedih, dan meminta maaf pada siapa pun atas apa yang telah dan sedang aku lakukan, yang mengantarku ke penjara. Bapakku tahu itu. Juga Ibuku dan semua saudaraku. Dan mereka selalu mendukungku, hingga detik ini,

10 tahun kemudian. Ya, aku memang bisa takluk, hanya kepada keluarga yang mendukung...

Ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, keluargaku tahu bahwa saya aktif dalam gerakan mahasiswa dan gerakan demokrasi secara umum. Pesan bapakku yang selalu kuingat hingga detik ini :

“Sing mok lakoni iku apik, bener, tur migunani wong akeh. Sedulurmu yo podho ndukung. Nanging kowe mesti ati-ati. Soale, sing mok adepi iku negoro. Kowe mung se kuku ireng!”

(Yang kamu lakukan itu baik, benar, dan berguna bagi orang banyak. Saudaramu semua mendukung. Tapi, kamu mesti hati-hati karena yang kamu hadapi adalah negara. Kamu hanya sebesar kuku hitam –editor)

Bapak saya memang orang kampung. Namun, beliau memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dalam melihat hidup dan masyarakat.

Saya yakin, Pak Sipin bukanlah minoritas di Indonesia. Paling tidak, ayahanda Petrus Bima Anugerah yaitu Pak Utomo Raharjo juga memiliki pandangan hidup serupa dengan memberikan dukungan sepenuhnya pada aktivitas anaknya yang sampai hari ini masih hilang entah di mana.

“Pembebasan”

Selama periode kebangkitan rakyat (*people's uprising*), Maret – Mei 1998, saya mendekam di penjara Polda. Namun, para tahanan kriminal memberi akses pada kami untuk terlibat. Melalui koran dan majalah yang diselundupkan ke sel, kami bisa memantau apa yang terjadi di luar.

Saat itu, kami bisa mengetahui betapa mahasiswa terus menggelar demonstrasi di kampus dan jalanan dengan berbagai isu lokal dan nasional. Orang-orang di perkotaan dan pedesaan juga menggelar aksi protes penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak, kelangkaan pangan, korupsi dan sebagainya. Kaum buruh juga bergerak berdemonstrasi menolak pemecatan dan menuntut upah layak.

Semua itu memberikan harapan bahwa saya pasti akan segera dilepaskan. Dan harapan itu semakin mendekati kenyataan ketika tanggal 12 Mei 1998, empat mahasiswa Trisakti ditembak ketika sedang demonstrasi.

Di tahanan kami juga ikut bergerak. Lagu Gugur Bunga juga dikumandangkan oleh para tahanan di seluruh ruang tahanan Polda Metro Jaya. Ilustrasi musik di radio dan televisi samar-samar kita dengarkan dari dalam sel penjara.

Pada 21 Mei 1998, Soeharto dipaksa turun dari tampuk kekuasaan yang telah dipegangnya selama 32 tahun. Periode baru Indonesia segera mulai, walau tidak mudah, dengan ditunjuknya Habibie sebagai Presiden RI.

Harapan pembebasan menjadi kenyataan ketika Presiden Habibie waktu itu mencabut legislasi antesubversi yang menjadi dasar penahanan kami. Akhirnya, pada tanggal 6 Juni 1998, penahanan atas diri saya ditangguhkan atas permintaan Cak Munir dan kawan-kawan yang menjadi pengacara kami.

Perjuangan dan Pengharapan

Saat ini saya bekerja di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Sebuah organisasi untuk korban dan keluarga

korban pelanggaran HAM, khususnya korban penghilangan paksa. Salah satu kasus yang menjadi kepedulian dan prioritas saya sebagai Ketua IKOHI adalah kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi tahun 1997-1998.

Pada periode 1997-1998, 23 orang tercatat telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya (saya salah satunya), dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini.

Kasus tersebut sudah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasar UU No 26/2000 Tentang Pengadilan HAM dan diserahkan ke Jaksa Agung sejak 2 tahun lalu. Namun, hingga kini Jaksa Agung masih belum mau melakukan penyidikan, apalagi penuntutan di pengadilan HAM. Padahal Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Februari 2008 menyatakan demikian.

Kasus penghilangan paksa aktivis pro demokrasi 1997-1998 ini harus segera diselesaikan, bukan karena ini satu-satunya kasus penghilangan paksa, atau sebagai kasus yang paling besar, tapi semata karena kasus penghilangan paksa 1997/1998 ini proses hukumnya sudah cukup maju. Kasus ini sudah berada di pintu masuk pengadilan HAM. Dari sanalah kita akan melihat bagaimana kasus penghilangan paksa yang terjadi paska 30 September 1965, Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh dan Papua, Pembunuhan Misterius (Petrus) dan lain-lain akan dipertanggungjawabkan oleh negara.

Penting juga diperhatikan bahwa kasus penghilangan paksa (*enforced disappearances*) punya karakter yang unik dan spesifik. Penyiksaan (*torture*) sering disebut sebagai ibu dari pelanggaran HAM, karena hampir semua tindak pelanggaran berat HAM mengandung unsur penyiksaan.

Penghilangan paksa adalah muara dari pelanggaran berat HAM. Artinya penghilangan paksa mengandung unsur-unsur pelanggaran berat HAM lainnya seperti penyiksaan, penahanan, bahkan sampai pembunuhan.

Tindakan menghilangkan orang secara paksa adalah juga tindakan menegasikan dan menihilkan keberadaan manusia. Manusia yang telah dilahirkan, hidup dan tumbuh dengan jiwa, raga dan pikiran tiba-tiba coba dihilangkan begitu saja oleh manusia yang lain.

Penghilangan paksa juga spesifik karena keluarga yang ditinggalkan terus menerus berada dalam ketidakpastian, mengenai nasib dari orang yang dihilangkan tersebut. Situasi ketidakpastian ini sendiri adalah bentuk penyiksaan tersendiri.

Karena dampak lanjutan bagi keluarga inilah mekanisme PBB (*United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances* - UNWGEID) kemudian mensyaratkan adanya *urgent* dan *prompt action*, langkah darurat dari negara untuk segera turun tangan begitu kasus penghilangan paksa terjadi. Karena penundaan atau keterlambatan, bahkan satu menit, bisa berakibat fatal bagi korban. Di Indonesia, kami perlu menunggu 10 tahun, bahkan mungkin lebih. Jutaan keluarga korban yang lain pada kasus 1965, perlu menunggu lebih dari 40 tahun.

Keluarga korban penghilangan paksa juga menghadapi kesulitan-kesulitan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Stigmatisasi sebagai separatis, komunis, pemberontak, fundamentalis adalah fenomena harian. Stigma ini kemudian berlanjut pada diskriminasi dan isolasi tidak hanya secara sosial oleh masyarakat tapi juga yang struktural oleh negara, melalui kebijakan-kebijakan yang ada.

Suatu hari, anak seorang korban penghilangan paksa menghadapi masalah di sekolah. Fajar Merah, anak Wiji Thukul, ditanya oleh

gurunya mengapa ia mengisi kolom nama ayah dengan nama ibunya, Dyah Sujirah. Fajar menjelaskan bahwa ia tidak mengenal bapaknya. Ibunyalah yang membesarkan dia selama ini. Ibunyalah yang selama ini menjadi ayah bagi dia.

Dia sendiri tidak tahu apa bapaknya masih ada atau tidak, karena ibunya juga tidak tahu. Ia tahu bahwa ayahnya adalah Wiji Thukul, tapi ia tidak mengenalnya dengan dekat karena dipisahkan kediktatoran.

Pertemuan terakhir Fajar dan Wiji terjadi pada bulan Desember 1997, ketika Fajar ulang tahun yang ketiga. Thukul mengabadikan momen ulang tahun Fajar waktu itu dengan sebuah *handycam*. Tidak ada yang tahu, apakah Thukul kini sedang memutar video rekaman ulang tahun anaknya itu.

Keluarga Suyat (korban penghilangan paksa yang lain) di Gemolong, Sragen, punya cerita tentang sebuah pengharapan. Sejak Suyat diculik awal 1998, keluarga berharap ia segera bisa dikembalikan para penculiknya, seperti yang lain. Mereka sudah mempersiapkan seekor kambing yang akan dipotong bila harapan indah itu terjadi.

Namun, tahun demi tahun, harapan itu tidak datang juga. Kambing itu pun telah dimakan usia. Hingga akhirnya, karena masalah ekonomi, kambing yang disiapkan itu terjual. Tetapi, toh, harapan tetap ada. Dan kambing yang siap dipotong bisa datang dari mana saja.

Menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Menunggu kepastian adalah pelipatgandaan atas situasi yang sangat membosankan, meresahkan, dan membuat putus asa. Terlebih lagi ketika rentang waktu menunggu terus diulur. Ia menjadi sesuatu yang bisa membunuh, mematikan.

IKOHI mencatat, dari keluarga yang dihilangkan pada periode 1997/1998 tersebut, 3 orang tua korban telah meninggal. Mereka adalah ayahanda Yadin Muhidin, ayahanda Herman Hendrawan, ayahanda Noval Alkatiri. Mereka semua telah berpulang karena sakit, karena dibunuh ketidakpastian. Mereka meninggal ketika orang-orang yang mereka sayangi belum juga pulang memeluk mereka.

Beberapa orang tua korban penculikan yang lain juga mengalami psikosomatis. Sakit yang bersumber dari keresahan jiwa. Masih ada puluhan, ratusan atau bahkan ribuan korban dan keluarga korban lain yang kini mengalami hal serupa.

Banyak sekali masalah-masalah riil yang dihadapi keluarga korban dalam kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah yang membutuhkan negara untuk menanganinya. Secara hukum, kasus harus diselidiki, disidik, dan mereka yang bertanggungjawab dituntut di pengadilan dan dihukum secara adil.

Korban dan keluarga korban pun harus mendapatkan hak-hak pemulihan. Rehabilitasi oleh negara untuk menjadikan korban dan keluarga korban berada dalam kondisi seperti ketika peristiwa belum terjadi.

Betapa perih keluarga korban yang harus mendapatkan jawaban lengkap dari negara atas pertanyaan agung:

“Di mana keberadaan orang-orang yang kami cintai?”

“Bagaimana keadaan mereka?”

“Kami siap menerima jawaban seburuk apapun.”

“Kalau mereka sudah meninggal, dimana mereka dikuburkan?”

Mereka juga akan meminta, “Kembalikan mereka dalam keadaan seperti ketika kalian mengambil mereka!”

Kepada saya, Parveena Ahangar, seorang ibu yang anaknya diculik tentara India di Kashmir, India, berbagi cerita di Jakarta tahun 2005 yang lalu.

“Suatu saat saya diminta bertemu dengan seorang perwira militer India yang membawahi kota Srinagar. Di kota inilah anak saya diculik. Dalam pertemuan yang disaksikan beberapa keluarga korban yang lain, perwira itu berkata, “Ibu, sudahlah, jangan ungkit-ungkit peristiwa itu lagi. Tidak mungkin kita mengembalikan anak Ibu yang hilang. Ini kami berikan santunan 100 ribu dollar (sekitar 920 juta rupiah) supaya ibu bisa melupakan peristiwa tersebut, dan Ibu bisa hidup kembali dengan normal...”

Saya berkata kepada perwira itu, “Bapak, bagaimana kalau sekarang saya kasih Bapak uang dua kali lipat dari yang Bapak berikan kepada saya, lalu saya bunuh anak Bapak!”

Parveena menangis karena menahan amarah ketika bercerita. Kini ia memimpin organisasi keluarga korban penghilangan paksa di Kashmir, India yang bernama *Association of Parents of Disappeared Persons* (APDP).

Refleksi 10 Tahun

Wilson, seorang kawan yang juga pernah diculik dan dipenjara pada tahun 1996-1998 menuliskan sebuah surat elektronik ketika Soeharto meninggal. Berikut petikannya:

“Satu Soeharto mati, muncul ribuan Soeharto yang lain. Tapi satu kawan yang berjuang hilang, susah betul mendapat gantinya.”

Ada juga kutipan lain yang baru-baru ini saya temukan kembali. Kutipan ini ada di pidato pembelaan Budiman Sudjatmiko, waktu

itu Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik yang tahun 1997 diadili oleh pengadilan Orde Baru. Dia menuliskan:

“Aku menjadi saksi atas penderitaan rakyatku yang tengah berjuang, dan akan kubawa kesaksian itu sampai ke pembebasannya.”

Saya merinding mendengar kalimat itu. Karena sampai hari ini, rakyat belum juga terbebaskan. Begitu pula 13 korban penghilangan paksa, antara lain Wiji Thukul, Herman Hendrawan, Suyat, Petrus Bimo Anugerah, dan Yani Afri. Saya yakin, Budiman masih memegang teguh apa yang pernah dituliskannya.

Suyatno, kakak Suyat, orang desa yang kesehariannya menjadi tukang kayu nun jauh di sana di Gemolong, Sragen, Jawa Tengah selalu mengatakan, “Kalau tidak karena Suyat, tidak mungkin Gus Dur, Mega, dan SBY menjadi presiden.”

Ketika pamit kepada Sipon (nama lain Dyah Sujirah) istri tercintanya pada tahun 1997, Wiji Thukul mengatakan, “Pon, aku harus balik ke Jakarta karena kawan-kawan pada dipenjara.”

Kini, sudah 10 tahun peristiwa itu terjadi. Anak saya dan anak teman-teman saya, telah tumbuh besar tengah bermain. Waktu begitu cepat berjalan.

Namun, saat menyaksikan poster korban penghilangan paksa yang dipajang di kantor IKOHI dan wajah keluarga dari mereka yang masih hilang, saya merasakan waktu berlalu begitu lambat. Bagi para orang tua dan isteri yang anak dan suaminya dihilangkan seperti Ibu Tuti Koto, Ibu Nurhasanah, Mbak Sipon, Pak Utomo, Ibu Tomo, Ibu Fatah, Ibu Poniem, Pak Paimin, Bu Zuniar, dan lainnya, rentang penyiksaan itu masih terus terasa. Anak-anak, suami, dan saudara mereka belum kembali.

Entah di mana kini teman-teman kami. Yang jelas, kami tidak akan pernah lupa, bahwa dalam rentang sejarah bangsa ini, kami adalah para saksi atas kekejaman mesin penindasan pemerintahan Orde Baru.

Dan, sebagai korban dan keluarga korban, kami memiliki hak konstitusional untuk menuntut apa yang memang menjadi hak kami. Hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan perdamaian.

Jakarta, September 2008

TUKANG BECAK DAN WISANGGENI

Oleh :

Christina Widiartanti, S.H

Slamet, 35 tahun. Telah lebih dari dua dasawarsa dia mengayuh Becak. Abang becak ini masih setia dengan profesinya di tengah hiruk-pikuk Jakarta.

Dengan mata menerawang, Slamet mengisahkan pengalaman pahitnya kepada saya. Dia mengenang hari kelabu ketika terjadi pemberangusan hak asasi para penarik becak. Saat itu, aparat Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Pemerintah Daerah DKI Jakarta, di bawah pimpinan Gubernur Wiyogo Atmodarminto, datang memberangus hak para tukang becak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Slamet masih belia ketika pertama kali datang ke Jakarta, tahun 1989. Usianya baru 16 tahun. Kampungnya di Klaten, Jawa Tengah, dia tinggalkan lantaran tak lagi menjanjikan masa depan.

Slamet remaja menarik becak di sekitar wilayah Jakarta Pusat. Becak yang dia sewa dari orang yang disebut *toke*. Ketika itu, ongkos sewa Rp 3.000 per hari. Saban bulan Slamet bisa mengantongi penghasilan bersih rata-rata Rp 25.000. Tak jarang dia bisa mengantungi Rp 30 – 60 ribu per bulan. “Saya senang karena penghasilan semakin membaik,” katanya.

Setahun di Jakarta, dia memberanikan diri menikahi seorang perempuan asal Pekalongan, Jawa Tengah. Ongkos sewa becak ketika naik menjadi Rp 4.000 per hari.

Lalu, datanglah hari-hari yang merisaukan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum,

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melarang becak beroperasi di Jakarta. “Becak, kata Gubernur Wiyogo, telah membuat Jakarta kotor. Pekerjaan sebagai penarik becak adalah pekerjaan yang tidak manusiawi,” begitu Slamet menirukan pernyataan Pak Gubernur.

Slamet, juga ribuan penarik becak lainnya, tidak bisa memahami pernyataan Wiyogo. Bagaimana bisa becak mengotori Jakarta? Kenapa pekerjaan yang mulia sebagai penarik becak, kok dibilang tidak manusiawi? Apanya yang tidak manusiawi?

Bagi Slamet, menarik becak sama manusiawinya dengan pekerjaan jasa lain. “Pokoknya Mbak, para penumpang becak, yang umumnya perempuan dan ibu rumah tangga, sama sekali tidak perlu mengangkat barang-barang belanjannya,” kata Slamet. Sejak dari dalam pasar, toko, pangkalan becak, sampai menuju rumah, bahkan dapur, Abang Becak siap membantu.

Penarik becak juga dengan sukarela, tanpa meminta imbalan, membawakan barang belanjaan penumpang, seberat apa pun barang itu. “Ini kan tidak pernah dilakukan sopir bajaj, apalagi sopir taksi,” kata Slamet. Jadi, “Dari segi mananya yang tidak manusiawi itu? Saya jadi bingung banget.”

Seingat pak Slamet, larangan Gubernur membuat para ibu rumah tangga sangat kesulitan mendapatkan angkutan umum yang ramah. Tak ada lagi Abang Becak yang dengan senang hati dan setia mengantar dan menjemput anak-anak dari sekolah sampai dengan selamat ke rumah. Tak ada lagi becak yang mengantar mereka ke pasar, puskesmas, dan juga ke tempat praktek bidan. “Kami sedih mendengarkan keluhan ibu-ibu yang sebelumnya menjadi pelanggan becak kami,” kata Slamet.

Pada akhir 1990, terjadi penggarukan besar-besaran. Para penarik becak tak bisa berbuat apa pun. Mendadak, di tengah jalan, becak-

becak mereka dirampas petugas trantib. Mereka dipukuli, bahkan ada yang diinjak-injak dengan sepatu boot saat mencoba mempertahankan becak.

Konon, semua becak hasil rampasan itu dikumpulkan di Cakung. Sebagian besar dibuang ke laut untuk dijadikan rumpon bagi ikan-ikan, begitu penjelasan Pak Gubernur di koran-koran.

Yang paling menyakitkan hati Slamet dan kawan-kawan, becak-becak yang disimpan di gudang atau di dalam rumah kontrakan pun ikut dirampas. Becak yang sudah dilepas dari rakitan, sudah dalam bentuk potongan besi, juga tak luput dari rampasan trantib yang menggeledah rumah-rumah kontrakan penarik becak.

Penarik becak kadang dibolehkan menebus becak yang dibuang di Cakung. Tapi, harus ada ongkos tebusan: Rp 250 ribu per becak. Padahal, biasanya becak dibeli dari daerah di sekitar Cirebon seharga Rp 700 – 750 ribu per becak.

Ketika itu, banyak sekali penarik becak yang jadi stres atau linglung. Ada teman Slamet yang jadi gila. Dia baru membeli becak dengan hasil keringatnya sendiri, tapi sehari kemudian becak itu sudah dirampas trantib. Dia tak punya uang sama sekali untuk menebus becaknyanya. Slamet bertanya, “Kalau sudah begitu, siapa yang tidak manusiawi, Mbak? Penarik becak atau gubernur?” Matanya berkaca-kaca.

Para penarik becak tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berupaya melakukan perjuangan. Mereka menuntut diperbolehkannya usaha menarik becak kembali di wilayah pemukiman, pasar, serta jalan-jalan biasa. “Bukan jalan protokol,” kata Slamet.

Ketika itu, Institut Sosial Jakarta (ISJ) yang dipimpin Romo Sandyawan membantu para penarik becak. Sekitar 1500-an

penarik becak melakukan demonstrasi ke Gedung DPR. Mereka juga berarakan mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ke Istana Negara, dan juga mendatangi gedung tempat berlangsungnya pertemuan internasional tentang transportasi yang tidak menimbulkan polusi. Becak *tob* adalah kendaraan yang ramah lingkungan.

Bersama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, penarik becak juga pernah menuntut Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI karena pelanggaran hak asasi para penarik becak. Pada tahun 2001, ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden, ada 2000-an penarik becak berbondong-bondong mendatangi kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat. Mereka menagih komitmen PDI Perjuangan yang kerap mengumbar janji memperjuangkan nasib wong cilik.

Slamet juga mengikuti demonstrasi ke kantor PDI Perjuangan. “Soalnya, hingga tahun 2001, nasib kami tidak pernah diperjuangkan oleh Ibu Megawati sebagai pemimpin partai wong cilik,” katanya. Saat itu juga, para penarik becak menyerahkan kembali seluruh kartu tanda anggota PDI Perjuangan. “Kami, sebagai wong cilik dan sebagai anggota partai, tidak percaya lagi kepada PDI Perjuangan,” kata Slamet.

Sekarang, saya masih bisa menjadi penarik becak di wilayah Jakarta. Meskipun, mereka harus memodifikasi becak kami menjadi gerobak. Namanya BEGO, becak gerobak.

Tak jarang mereka harus kucing-kucingan dengan petugas ketika kami bekerja mengayuh becak demi sesuap nasi bagi keluarga. Upaya penangkapan dan penggarukan oleh aparat, kecamatan atau pun kelurahan, masih berlangsung.

Begitulah nasib penarik becak. Selalu tergusur dalam ikhtiar mencari nafkah. “Keinginan kami hanya satu, Mbak,” kata Slamet, “diizinkan untuk menjalankan pekerjaan kami sebagai penarik becak di jalan-jalan dalam pemukiman, sekitar pasar tradisional, jalur-jalur khusus becak.” Slamet menambahkan, “Kami tahu diri, kok, kalau kami tidak bisa beroperasi di jalan-jalan protokol.”

“Semoga ada yang mendengarkan dan memperjuangkan nasib kami, ya, Mbak.” Khusyuk dia mengatupkan kedua telapak tangan ke wajahnya yang makin kuyu. “Amin,” bisiknya pasrah. Kami berdua mengakhiri percakapan sore itu.

Sejak peristiwa penggarukan besar-besaran terhadap becak-becak di Jakarta, awal 1990, kami di Institut Sosial Jakarta (ISJ) sibuk menerima pengaduan. Hampir setiap hari para penarik becak mendatangi kantor kami yang kecil di Jalan H. Yahya Nomor 13, Jakarta Timur.

Ketika itu, setiap hari bisa datang 5 – 6 metromini yang berpenumpang para penarik becak. Mereka datang bersamaan, menceritakan berbagai peristiwa penggarukan becak yang dilakukan aparat trantib secara brutal dan tidak manusiawi.

Terus terang, sejak November 1990, saya yang masih tergolong baru di ISJ, merasa hampir frustrasi. Ada perasaan marah dan muak dengan cara-cara penggarukan becak-becak tersebut. Kekerasan demi kekerasan yang dialami penarik becak berakibat luka-luka fisik, ringan, sampai berat. Tak sedikit pula yang terganggu kejiwaannya.

Saya sendiri pernah menyaksikan peristiwa penggarukan becak secara brutal, di sebuah gang di Jalan Kayumanis V, Jakarta Timur,

dekat rumah kontrakan saya. Penarik becak itu sudah berteriak-teriak sambil menyembah-nyembah, dia memohon agar becaknya tidak digaruk. “Ini becak punya orang lain, Pak,” kata si tukang becak.

Namun, petugas trantib merespon permohonan itu dengan mendaratkan pentungannya di wajah penarik becak itu. Darah segar mengalir. Kepalanya bocor. Aku dan beberapa warga yang menyaksikan hal itu berlari-lari menolong penarik becak. Seorang bapak berteriak, “Maling, lu!” Dia melemparkan batu ke arah aparat trantib yang sedang melarikan becak itu dengan mobil dinas penggarukan.

Kami membawa Abang Becak yang terluka dan pingsan itu ke rumah warga terdekat. Seorang ibu yang kebetulan bekerja sebagai perawat datang membantu. Dia mengobati dan menutup luka di kepala penarik becak. Ketika si penarik becak sudah siuman, saya memutuskan membawanya ke kantor dan melaporkan peristiwa itu pada teman-teman di kantor.

Saya ingat komentar umum para penarik becak yang datang mengadu ke kantor ISJ. “Mbak, Gubernur Wiyogo ini, kok, tidak manusiawi, ya. Dulu, di zaman Pak Ali Sadikin jadi Gubernur, kami hanya diberitahu pakai tulisan bahwa becak dilarang masuk ke wilayah atau jalan-jalan protokol. Kami semua mematuhi itu.”

Tanda “Becak Dilarang Masuk” berupa gambar becak dalam bulatan merah dan digaris miring, dipasang di ujung jalan. “Kami tidak perlu dipukuli sampai babak belur begini. Tidak perlu juga becak kami dirampas, kami sudah nurut kok,” tukang becak yang lain menyambung.

Penarik becak yang lain menambahkan, “Memang, masih enakan zaman Gubernur Ali Sadikin, ya. Sekarang trantibnya jadi kaya

algojo pembunuh para penarik becak dan keluarganya. Apakah aparat pemerintahan di Indonesia sudah pada jadi pembunuh ya?”

Saya hanya bisa menjadi pendengar setia. “Yang sabar, ya, bapak-bapak,” hanya itu kalimat yang sanggup kuucapkan.

Pada sebuah pertemuan, kami saling menguatkan hati dengan memutar sebuah lagu berjudul “Bento”, yang dinyanyikan Iwan Fals. Hampir semua penarik becak yang ada di ruangan itu seperti terbangun. Mereka bersemangat kembali untuk berjuang bersama rekan-rekan penarik becak lainnya.

Sebagai langkah awal, kami di ISJ melakukan proses advokasi kasus penggarukan becak. ISJ mengadakan pertemuan akbar seluruh penarik becak di Jakarta, pada akhir tahun 1990. Pertemuan diselenggarakan di SMEA Budaya, Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat.

Di luar dugaan kami, penarik becak yang berkumpul melebihi 600 orang. Saya ingat betul jumlah itu karena kebetulan saya yang bertanggungjawab menyiapkan konsumsi bagi mereka. Saya hanya memesan 500 kotak makanan kecil. Tentu saja, semua kotak sudah habis terbagi, sementara masih banyak yang belum mendapatkan makanan kecil.

Pertemuan itu merupakan upaya menggalang kekompakan dan rasa solidaritas para penarik becak di seluruh DKI Jakarta. Kami juga bermaksud menghibur mereka supaya rasa frustrasi dan keputusasaan mereka sedikit terobati. Paling tidak, menurut Romo Sandyawan, pertemuan ini bisa sedikit mengurangi kemarahan para penarik becak yang sudah memuncak. Dengan begini, para korban tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis.

Menyaksikan begitu banyak penarik becak berkumpul, satpam sekolah panik. Di luar dugaan kami, Pak Satpam melaporkan pertemuan itu kepada aparat keamanan. Langsung saja, petugas keamanan dari Kodim setempat datang menggerebek. Pertemuan pun langsung dibubarkan.

Seorang petugas keamanan berpakaian preman meminta panitia pertemuan berkumpul. Kami diminta masuk ke mobil kijang milik aparat keamanan. Saya ingat betul, bagaimana kami –staf ISJ dan beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara – dibentak dan dipaksa masuk mobil.

Kami dibawa ke kantor Kodim Jakarta Timur, di depan stasiun KA Jatinegara. Kami ditahan pukul 19.00 WIB. Pukul 01.00 dini hari, Romo Sandy dan kami dilepaskan bersama-sama. Legalah kami semua. Kami keluar dari kantor Kodim sambil tertawa. Bagi kami, yang paling penting tidak ada satu pun penarik becak yang ikut dicituk atau ditahan.

Jelas, penggarukan sewenang-wenang oleh aparat Ketenteraman dan Ketertiban DKI adalah perampasan hak untuk hidup layak para penarik becak. Ini juga perampasan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hak atas pendidikan, terhadap penarik becak dan seluruh keluarga mereka.

Sejak peristiwa penggrebekan pertemuan itu, kami sepakat untuk tiarap lebih dulu. *Ngalah* tetapi bukan berarti kalah. Ini penting agar jumlah korban tidak makin bertambah. Sambil tiarap, kami semua tetap memikirkan jalan keluar bagi nasib para penarik becak itu. Sebagian besar dari mereka memutuskan untuk pindah sementara ke daerah pinggiran dan luar Jakarta, seperti Pondok Labu, Bekasi, Tangerang, atau Parung (Bogor) yang masih membolehkan becak beroperasi bebas.

Dua bulan sesudah peristiwa penggerebekan, kami mengumpulkan para penarik becak. Romo Sandy punya gagasan menggelar sebuah pagelaran wayang kulit. Acara yang dilakukan di daerah Pondok Labu ini dimaksudkan sebagai teriakan akhir dari seluruh penarik becak menggugat kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya.

Kami sepakat memilih lakon ***Wisanggeni Gugat***. Menurut Romo Sandy, Wisanggeni adalah lambang orang kecil yang pemberani dan otonom melawan kekuasaan sang penguasa yang lalim dan tidak adil.

Hal yang mengagumkan kami, seluruh personil dalam pagelaran wayang itu adalah keluarga tukang becak. Dalang, sinden, penabuh gamelan, semuanya dari tukang becak dan keluarganya.

Kami terharu. Kami bahagia. Meskipun mereka tukang becak, tetapi mereka punya kepandaian luar biasa dalam bidang seni. Mereka tetap kreatif berlatih kesenian, khususnya perwayangan –hal yang tidak mudah dilakukan oleh mereka yang tak punya darah seni.

Melalui Wisanggeni Gugat, para penarik becak yang harus menyerah kalah kepada sang penguasa yang lalim, tetap ingin menunjukkan jati diri mereka. Mereka memang miskin, tetapi mereka punya sikap berani dan otonom, mencintai kehidupan, menghormati hak asasi sesama manusia. Mereka juga hormat pada keadilan, jujur, dan memiliki solidaritas pada yang lebih susah hidupnya.

Pada pagelaran wayang kulit malam itu, kebahagiaan para penarik becak bertambah. Di luar dugaan mereka, Kyai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersedia hadir menemani para penarik becak yang sedang tercabik-cabik karena sikap penguasa.

Bagi rakyat kecil, saat itu Gus Dur adalah seorang bapak yang tidak lupa pada mereka. Bapak yang bersedia dekat dengan mereka dan bersedia berpihak pada mereka.

Kehadiran Gus Dur, berdampingan dengan Romo Sandy, Romo Priyo, serta beberapa tokoh lain, adalah tambahan kekuatan tersendiri bagi para penarik becak. Para tokoh ini setia membisikkan kata-kata sejuk, “Marilah kita tetap berjuang dengan gerakan tanpa kekerasan. Kekerasan yang teman-teman terima tidak harus dibalas dengan kekerasan. Terimalah kekerasan itu dengan tetap tersenyum. Bersikaplah rendah hati. Bangun rasa solidaritas di antara teman-teman. Solidaritas untuk tetap cinta pada sesama.”

Pagelaran “Wisanggeni Gugat” berlangsung sukses. Masyarakat sekitar pun ikut terhibur. Mereka juga senang bisa menemani para penarik becak yang sedang teraniaya.

Malam itu saya merenung. Benarkah masyarakat kecil di Indonesia ini sudah merdeka? Merdeka untuk mendapatkan hak-hak hidup yang layak? Sudahkah kita masing-masing berani memberikan rasa kemerdekaan itu pada sesama, di mana pun kita berada?

Jakarta, 5 Mei 2008.

HOROR DI PAGI BERKABUT

Oleh :
Purwoko

Kenyataan sering kali lebih kejam dari film horor di layar perak. Dua hari dalam hidup saya, pada 6 – 7 Februari 1989, di Talangsari, Lampung, adalah bukti betapa kekejian manusia – yang diperalat kekuasaan–bisa tak terbatas. Kekejian yang selalu menghantui hidup saya, hingga kini.

Saya masih sebelas tahun saat itu. Masih remaja kencur, yang seharusnya hidup dalam keceriaan. Hari-hari itu saya dipaksa menyaksikan teman-teman sebaya dibakar hidup-hidup. Orang tua dan saudara-saudara saya dihabisi dengan berondongan peluru mematikan. Satu demi satu mereka menghembuskan nyawa layaknya binatang yang terkena virus yang harus dibinasakan.

Hati saya berteriak meradang. Apa salah orang tua dan saudara-saudara kami kepada pemerintah? Mengapa mereka harus mati dengan cara yang tragis? Mengapa pula saya dan teman-teman saya harus mendekam di hotel prodeo?

Hari naas itu, Senin 6 Februari 1989. Pukul 11 siang. Kapten Sutiman, Komandan Daerah Militer Way Jepara, Lampung Tengah, bersama 15 anak buahnya datang ke permukiman kami. Mereka mendatangi tempat pengajian yang dipimpin Bapak Warsidi di Cihideung, Talangsari. Tak pernah kami menyangka kedatangan mereka bakal menebar maut.

Kapten Sutiman, tanpa disertai salam dan permisi, langsung mencabut pistol dan menembakkannya pada jamaah pengajian yang sedang bersiap menunaikan sholat dzuhur. Timah panas segera menyembur ke segala arah dengan membabi buta.

Otomatis, jamaah pengajian berhamburan keluar demi menghindari hujan peluru.

Serangan mendadak ini membuat anggota pengajian marah. Mereka meneguhkan hati untuk melawan. Bergegas mereka pulang ke rumah. Ada yang mengambil golok, cangkul, dan panah yang biasa dipakai untuk memanah bajing.

Dan, terjadilah perlawanan. Kelompok pengajian Bapak Warsidi melawan pasukan Kapten Sutiman. Sebuah perlawanan yang amat tidak seimbang. Orang kampung hanya bersenjata ala kadarnya, sedangkan pasukan Kapten Sutiman dilengkapi senjata berpeluru tajam.

Dalam perlawanan itu Kapten Sutiman terkena sabetan golok. Di pihak jamaah pengajian, ada dua orang yang terluka: Bapak Ja'far tertembak di bagian paha kanan dan Bapak Mukhlis yang terkena sabetan clurit di jidat dan tangannya.

Saya dan teman-teman ketika itu sedang duduk di dekat mushola sambil menunggu waktu salat dzuhur. Tiba-tiba terdengar suara tembakan menderu, dor, dor, dor, dor...!

Penasaran, kami berlari menghampiri suara tembakan. Ada apa gerangan? Saya menyaksikan seorang tentara sedang menembakkan pistol ke arah anggota jamaah pengajian. Bapak-bapak dan saudara-saudara saya segera kalang-kabut mundur menghindari tembakan. Mereka berlari ke rumah masing-masing yang memang tidak jauh dari lokasi penembakan.

Saya dan teman-teman langsung menuju ke pondok pesantren sambil menggemakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami berseru sebagai wujud ketakutan, memohon pertolongan kepada Allah. Kami pasrah atas apa yang sedang dan akan terjadi.

Beberapa saat kemudian, Bapak Warsidi masuk ke dalam pondok dan memerintahkan kami untuk berdoa dan membaca Al Qur'an. Sekitar setengah jam, doa-doa pun berkumandang.

Setelah itu, keributan mereda. Letusan senjata aparat tidak terdengar. Saya dan teman-teman pun pulang ke rumah.

Di luar pondok, kondisi begitu mencekam. Ada kabar bahwa Kapten Sutiman tewas. Saya juga melihat Bapak Ja'far dipapah beramai-ramai akibat tembakan di paha kanannya. Aroma ketakutan masih kental.

Sampai di rumah, saya hanya melihat ibu dan adik saya yang masih bayi. Tamu-tamu dari Solo yang menginap di rumah sudah dipindahkan ke rumah lain di dekat pondok. Ibu yang sedang menggendong adik mengajak saya pindah ke rumah Paman Jayus, tak jauh dari pondokan yang dihuni anak-anak dan ibu-ibu. Jaraknya sekitar 60 meter dari rumah kami.

Hari berikutnya, horor yang lebih dahsyat menanti.

Selasa, 7 Februari 1989, tepat pukul 5. Pagi masih berkabut.

Bapak dan saya sedang bersiap sholat subuh, kami hendak berangkat ke mushola. Dari arah selatan, rentetan suara tembakan mengejutkan kami. Kami bergegas memeriksa keadaan di luar. Melihat suasana yang tegang, bapak memutuskan kami sholat di rumah saja.

Dor, dor, dor, suara tembakan terus terdengar, keras dan semakin keras. Sekitar pukul 6, satu dua peluru bahkan menyambar rumah kami. Kontan, penghuni rumah —ada 13 orang—panik.

Ketakutan. Doa tanpa putus kami lafalkan. Di luar, hujan peluru makin deras. Entah mengapa, mungkin karena doa-doa kami, tidak satu pun peluru mengenai kami.

Saya memberanikan diri mengintip dari celah dinding yang bolong. Saya terperanjat. Ratusan tentara, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), berbaju loreng dalam posisi merangkak tiarap berada di halaman rumah kami. Senapan M-16 ada di tangan mereka, siap memuntahkan peluru.

Gemetar, saya membalikkan badan dan langsung menceritakan apa yang saya lihat kepada penghuni rumah. Ibu dengan wajah ketakutan menyuruh saya bersembunyi di kolong tempat tidur. Saya turuti perintah ibu. Di kolong itu, jantung saya berdetak kencang. Cemas, takut, merajai hati saya. Peluru berdesing-desing di sekitar rumah.

Tak bisa lain, saya hanya pasrah. Tiba-tiba, prakk...! Ada yang menggedor-gedor pintu rumah. Sayup-sayup terdengar teriakan dari luar memanggil saya, “Pur, Pur, Purwoko! Cepat kamu lari keluar. Rumahnya mau dibakar sama ABRI!”

Otak saya berputar. Ah, itu suara Muhammad Ali, anak Ustadz Imam Bakri. Segera, saya, adik, dan ibu keluar dari kolong tempat tidur. Kami bergegas ke luar rumah dengan langkah berat. Firasat saya mengatakan bahwa rumah itu akan segera rata tanah. Benar saja, tak berapa lama kemudian, bapak-bapak ABRI membakar rumah kami.

Di luar, kami disambut moncong senjata para tentara. Caci-maki, hinaan, disemburkan kepada kami. “Kalian ini anak-anak bajingan, GPK, pemberontak.” Satu dua tentara menimpali, “Sudah, habisi saja anak-anak ini. Tembak sekalian, biar nggak dendam sama ABRI kalau sudah besar nanti.”

Ada juga tentara yang berusaha meredam nafsu membunuh teman-temannya. “Jangan, jangan dibunuh...! Masih kecil-kecil, kasihan. Nanti kita kuwalat,” katanya. Sejenak, suara itu meredakan detak jantung saya yang berderap begitu kencang.

Rasa takut, ngeri, semakin pekat. Kobaran api dengan asap mengepul melalap pondok yang dihuni anak-anak dan ibu-ibu. Rintihan dan jeritan mereka terdengar menyayat dan mengiris hati. Sayang, jeritan itu tak sanggup menghentikan kobaran api yang terus membesar.

Beberapa saat kemudian, saya dan warga lainnya digiring 100 meter ke arah timur, tepatnya di depan rumah Bapak Mardi. Ibu dan teman-teman saya ternyata sudah berkumpul di sana. Mereka hanya membisu. Kosong. Tak tahu harus berkata dan berbuat apa. Kami dikumpulkan satu tempat.

Lalu, saya melihat Bapak Warsidi dan Marsudi diseret dari arah barat dengan posisi tertelungkup. Bapak Warsidi diletakkan di pos ronda. Bapak Marsudi terus diseret ke arah kami. Di hadapan kami, Bapak Marsudi, yang kedua pahanya terkena peluru, kakitangannya diikat tambang, disiksa bagai binatang.

Jarak antara kami dan pos ronda tidak terlalu jauh, sekitar 25 meter. Jadi kami bisa menyaksikan Bapak Warsidi, yang sudah tidak bernyawa akibat terkena peluru di kepala dan dada kiri, tetap dianiaya. Biar pun Bapak Warsidi sudah meninggal, tentara ABRI itu tetap menyembelih lehernya sampai hampir putus. Sampai kini, saya masih ketakutan apabila mengingat peristiwa itu.

Pukul 8. Rentetan tembakan mulai reda. Pasukan ABRI datang berbondong-bondong ke arah kami. Tatapan mereka tajam menikam. Segala rupa kata-kata kotor dimuntahkan dari mulut mereka. Seolah kami ini makhluk paling menjijikkan.

Dari kejauhan, saya mendengar para tentara itu membicarakan ciri-ciri paman Jayus. Bentuk badannya, warna kulitnya, juga wajahnya. Rupanya Paman Jayus dituding sebagai aktor utama di balik prahara ini.

Ternyata para tentara itu tak ada yang tahu sosok Paman Jayus. Beberapa warga digelandang, termasuk saya. Saya khawatir akan dieksekusi di sebuah tempat sunyi. Tapi, saya tak bisa apa-apa. Hanya bisa pasrah mengikuti langkah para tentara itu.

Rupanya, saya dijadikan alat untuk mengenali sosok Paman Jayus. Saya dipaksa memeriksa satu demi satu mayat yang bergelimpangan. Bermacam-macam luka yang dialami mayat-mayat itu. Ada yang kepalanya tertembak peluru hingga pecah isinya berhamburan, ada yang dadanya berlubang menganga. Pemandangan yang membikin siapa pun merinding. Tapi, saya – yang masih muda—harus tahan dan dipaksa terus memelototi tumpukan mayat saudara-saudara kami.

Pencarian pun berlanjut. Kami diminta menyusuri sungai yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian.

Di pinggiran sungai, tampak ada mayat terkapar. Kami mendekat, memeriksa apakah itu Paman Jayus. “Astaghfirullah,” saya berucap lirih. Mayat dengan kepala yang nyaris pecah itu adalah ayahku sendiri. Kaget, terperangah, saya menyaksikan kondisi ayah yang mengenaskan.

Peristiwa itu menorehkan trauma dalam diri saya. Sering kali sebuah film berputar dalam benak saya, membentangkan kembali kisah kesadisan yang menimpa ayah. Inilah pengalaman terpahit saya, kehilangan orang yang saya cintai dengan cara begitu sadis.

Belum sempat meneteskan air mata menangisi kepergian ayah, saya dipaksa terus mencari mayat-mayat lain yang belum

teridentifikasi. Dari 80-an mayat yang kami periksa, tidak tampak tubuh Paman Jayus. Akhirnya, seorang tentara meminta kawan-kawannya menghentikan pencarian. Usulan ini disetujui.

Pukul 11 siang. Horor berlanjut.

Bapak, ibu, dan anak-anak yang masih hidup, dikawal dengan todongan senapan M-16, digiring menuju arah Utara, desa Pakuan Haji. Tiga kilometer jarak kami tempuh dengan 30 menit berjalan kaki.

Kami dikumpulkan di depan rumah Bapak Atmo, Kepala Dusun Pakuan Haji. Kami menjadi tontonan gratis masyarakat, bagai berada di kebun binatang.

Bagi saya, rasa malu jadi tontonan telah mengalahkan rasa takut akan kematian yang mengancam. Meskipun saya masih kanak-kanak, tidak tahu duduk persoalan sebenarnya, tapi saya tak habis pikir, mengapa anak-anak tak berdosa turut menanggung semua ini. Apakah kami telah melanggar hukum di negeri ini? Apakah kami dikategorikan sebagai serdadu-serdadu anak yang akan melawan pemerintah Indonesia hingga harus dibinasakan?

Beberapa saat kemudian, teman dan saudara-saudara saya sampai di Pakuan Haji. Kondisi mereka amat memprihatinkan. Banyak yang sebenarnya tidak bisa berjalan jauh. Moncong senjata telah memaksa mereka berjalan mengikuti perintah tentara.

Isteri Bapak Marzuki, asal Tanjung Priok, Jakarta Utara misalnya. Sekujur tubuhnya terbakar oleh peluru yang bersarang di pantatnya, tapi dia tetap dipaksa berjalan. Kami saja —yang tidak terluka—kelelahan menempuh perjalanan yang menyiksa itu.

Setelah semua warga berkumpul, kami digiring ke sebuah truk bak terbuka. Truk pengangkut pasir yang kotor sekali.

Pukul 2, truk berangkat membawa kami, entah ke mana. Sepanjang perjalanan yang ada hanya kesunyian. Tidak ada percakapan dan tegur sapa di antara kami. Yang ada hanya rintihan, juga doa-doa kepada Sang Khalik.

Siang itu cukup terik. Langit cerah. Lapar dan haus, yang tadinya tak sempat kami rasakan karena begitu tegang, sekarang mulai muncul. Sedikit hiburan datang dari langit. Hujan gerimis turun seolah membasuh kami.

Truk berhenti di depan sebuah bangunan berpagar tembok yang tinggi. Kami diturunkan dan digiring ke sebuah ruangan yang luas. Suasana ruangan itu angker. Banyak manusia berpakaian loreng dengan menenteng senjata berlalu-lalang.

Seorang petugas meminta kami duduk. Satu per satu kami dipanggil sesuai hubungan famili. Identitas kami didata. Mulai nama lengkap, alamat, umur, orang tua, sidik jari, berat dan tinggi badan. Pas foto seluruh badan diambil. Jika mengenang itu, saya merasa seperti tawanan di Teluk Guantanamo.

Selesai diidentifikasi, saya bersama sembilan orang lainnya dimasukkan ke dalam penjara berukuran 2 x 4 meter yang disekat dengan toilet. Kami seperti ikan sarden yang dikalengkan. Merebahkan badan saja sangat sulit. Saya, dengan sehelai pakaian yang terus melekat di badan, tidak bisa memejamkan mata. Biar pun keletihan, kami tak bisa tidur.

Akhirnya, pukul 6 sore, saya dan teman-teman mendapatkan jatah makan untuk yang pertama kali. Baki aluminium dengan kotak-kotak yang memuat bermacam makanan. Begitu

mengasyikkan tampaknya. Namun, ternyata rasanya hambar. Nasinya pun sudah mengeras. Susah payah kami berusaha menelan butiran-butiran nasi untuk masuk ke lambung.

Selepas makan malam yang menyedihkan, saya berusaha menghilangkan penat dan letih dengan beristirahat. Tapi, saya tak kunjung tidur. Peristiwa mengerikan dalam dua hari terus berlintasan di pikiran saya. Rumah dibakar, pondok tempat sekolah telah rata dengan tanah, dan bapak saya yang tersungkur tak bernyawa. Kelelahan, akhirnya saya pun tertidur.

Pukul 6 pagi. Rabu, 8 Februari 1989. Saya dan teman-teman memulai aktivitas di penjara. Antre di WC adalah agenda pertama. Hampir semua dari kami terkena diare akibat santapan makan semalam. Ibu dan adik saya juga begitu.

Sepanjang hari kami lelah dan letih akibat buang air terus-menerus. Saya mengalami dehidrasi. Mata berkunang-kunang, kepala terasa berat, pikiran melantur entah ke mana. “Inikah yang dinamakan sekarat? Jika iya, sebentar lagi saya akan hilang dari bumi ini,” begitu saya membatin.

Dari sebelah sel penjara, saya mendengar ibu memanggil sipir penjara. Atas permohonan ibu, sipir membawakan air hangat dan oralit untuk saya. Kondisi saya pun membaik.

Di penjara, sarapan pagi datang pukul 11 siang. Menyanya tidak jauh berbeda dengan yang semalam saya makan, kecuali tambahan telur rebus. Setelah mengunyah makanan beberapa lama, perut saya kembali seperti diperas. Rupanya oralit yang saya minum tidak cukup ampuh mengusir diare. Kondisi saya pun semakin mengenaskan. Berjalan ke arah WC saja saya harus berjuang setengah mati, saking beratnya.

Kamis, 9 Februari 1989. Kami diberikan kesempatan untuk mandi di luar sel penjara Kodim Lampung Tengah. Saya mengetahuinya dari ibu yang bertanya kepada sipir penjara tentang nama tempat ini.

Menelusuri sel-sel penjara, menuju kamar mandi, kami berjumpa dengan banyak tahanan. Ada seorang bapak yang melontarkan pertanyaan, “Dik, dik, kecil-kecil kok sudah masuk penjara? Emangnya salah apa?” Kami hanya bisa menahan senyum pahit. “Nggak tahu, Pak.”

Sesuai mandi, kami digiring kembali ke sel. Ada sedikit pengecekan kesehatan dan pemberian obat. Lumayan, tubuh saya sedikit segar.

Pukul 3, menjelang Asar, kami digiring keluar menuju ke satu ruangan yang agak luas. Di sana, ibu-ibu dan kawan-kawan kami sudah berkumpul, termasuk isteri Bapak Marzuki. Saya hampir tidak mengenali mereka. Sebagian besar mata mereka membengkak dan nyaris tertutup, kulit mengelupas kemerahan seperti kambing yang baru saja dikuliti.

Ruangan berisi ratusan orang itu serasa bagaikan kamp konsentrasi. Ada yang merintih kesakitan. Orang dewasa dan anak kecil menangis tanpa henti. Suasana begitu riuh.

Di ruangan itu ada seorang anak termenung sendirian diiringi rintihan menahan rasa sakit. Rupanya dia adalah Rohman, anak Bapak Warsidi. Ia teman kami menimba ilmu di pondok. Saya hampir saja tidak mengenalinya. Ia berubah drastis. Matanya sipit akibat bengkak, kulitnya terkelupas, kupingnya tegak lurus seperti kuping drakula.

Rohman bercerita, ketika pondok dibakar, dia dan kakak perempuannya, Thoifah, sedang ada di dalam pondok. Mereka memberanikan diri keluar, di tengah kobaran api. Keduanya selamat, tapi sekujur tubuh mereka telah terbakar api.

Lima hari, Rabu sampai Minggu, kami berada di tahanan Kodim. Kemudian, kami —saya, adik, nenek, dan isteri Paman Jayus—diangkut menuju Korem. Kawan-kawan lain tetap tinggal di penjara Kodim.

Di penjara Korem, kami bertemu dengan Paman Joko dan Paman Jayus. Keduanya tampak kurus. Saya tidak mengira Paman Jayus masih hidup. Kami semua kemudian ke ruang kerja Bapak Komandan Resimen Militer Hendro Priyono.

Bapak Hendro Priyono lebih banyak bertanya kepada paman, nenek, dan ibu saya. Pertanyaan yang diajukan itu seputar keluarga kami, berapa jumlah keluarga dan saudara, mereka tinggal di mana, berapa keluarga yang tewas ketika terjadi penyerbuan, kondisi rumah, apakah masih utuh atau terbakar, juga dari mana saja tamu-tamu yang datang ke rumah kami.

Ada satu pertanyaan menggelayuti pikiran ketika itu. Mengapa hanya keluarga kami yang mendapatkan “dispensasi” untuk dikirim ke Korem? Saya menduga, keluarga kamilah yang selama ini dianggap sebagai tuan rumah dan juga pentolan “Jama’ah Warsidi”

Empat hari kami berada di tahanan Korem. Kami semua ada di dalam satu sel. Saya, Paman Jayus dan isterinya, Paman Joko, ibu, adik, dan nenek berkumpul jadi satu.

Hari keempat, pukul 9, kami dijemput Bapak Parmo menggunakan mobil jeep berwarna hijau tua. Lagi-lagi kami tak tahu hendak dibawa ke mana. Kami hanya diam mengikuti ke mana mobil itu membawa kami.

Setengah jam kemudian, kami sampai di sebuah rumah biasa, bukan kantor polisi atau tentara. Ternyata ibu-ibu dan kawan-kawan saya sudah tiba terlebih dahulu di sini. Saya bersyukur. Mereka tidak ada lagi yang meringkuk di penjara Kodim.

Saya baru sadar belakangan bahwa isteri Bapak Marzuki tidak terlihat. Rupanya, ia telah meninggal ketika keluarga kami dipindahkan ke Korem. Sedari awal saya sudah menduga bahwa dia akan meninggal jika lukanya tidak dirawat. Dengan luka bakar, juga peluru itu, dia bukannya mendapat perawatan medis tetapi diperlakukan layaknya orang “sehat” seperti kami ketika di penjara.

Lembaga Pengasingan Padang Cermai, itulah nama tempat baru kami. Di sini kami lebih dimanusiakan dibanding di Kodim atau di Korem. Tempat ini sebenarnya adalah asrama untuk panti jompo dan anak-anak yatim piatu.

Kami hanya luntang-lantung di tempat ini tanpa kejelasan. Tak ada fasilitas dan sarana belajar apa pun, yang dibutuhkan anak seusia saya waktu itu. Ibu-ibu kami terus berusaha. Mereka tak henti bertanya kepada petugas dari Korem, sampai kapan kami harus tinggal di sini? Tak ada jawaban.

Doa-doa tak lupa kami panjatkan. Kami biasanya memanjatkan doa bersama setelah salat berjamaah. “Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah arwah bapak-bapak dan saudara-saudara kami yang telah terbunuh di sisi-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah diperbuat oleh bapak-bapak dan saudara-saudara kami.

Terimalah amal mereka. Ya Allah keluarkanlah kami semua dari tempat ini. Jadikanlah kami semua anak-anak yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama kami. Amiiin. Ya Robbal Aalamin.”

Tiga bulan saya dan keluarga bermukim di sini. Ada juga yang tinggal 1-2 bulan karena sudah dijemput sanak famili mereka. Pada bulan ketiga, tempat ini berangsur-angsur sepi. Kami tinggal empat puluh orang.

Akhir April 1989, keluarga kami dijemput Bapak Parmo menuju ke Korem. Di sana, kami sudah ditunggu oleh Paman Munar, kerabat yang berasal dari Jabung, Lampung Tengah. Kami juga bertemu dengan Paman Jayus yang saat itu masih mendekam di penjara Korem.

Paman Munar membawa kami pulang ke rumahnya, di Jabung. Kami sekeluarga menumpang beberapa tahun di sana. Bagaimana lagi? Rumah kami sudah tiada, tinggal serpihan genteng dan batu bata berserakan.

Kami pun tergolong beruntung, masih punya saudara tempat menumpang. Berbeda dengan ibu-ibu lain yang tak punya sanak kerabat. Miris rasanya memikirkan nasib mereka.

Seiring berjalannya waktu, kami terus membenahi hidup. Trauma, kepedihan, dan perasaan kehilangan semenjak tragedi di bulan Februari itu perlahan mereda. Kami juga terus berharap dan berjuang mencari keadilan.

Titik terang muncul pada 21 Mei 1998. Rezim Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun tumbang sudah. Gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa berusaha mengambil kendali.

Seiring dengan tumbangya sang diktator, tak sedikit pihak yang menginginkan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Talangsari, di masa rezim Soeharto diungkap. Para pelakunya harus diadili.

Menyusul dorongan berbagai pihak, akhirnya dibentuklah Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) Hak Asasi Manusia Timor-Timur dan KPP HAM Tanjung Priok.

Kami pun mulai memikirkan untuk menuntut hak-hak kami yang telah dirampas negara. Namun, kami belum mengetahui bagaimana caranya.

Akhir tahun 1998, saya mendapatkan informasi bahwa tahanan politik korban Talangsari di Nusakambangan telah dibebaskan. Mereka langsung menandatangani kesepakatan perdamaian, *islah*, yang kemudian terkenal dengan nama GIN (Gerakan Islah Nasional) yang disponsori Bapak Darsono dan kelompoknya selaku perwakilan dari korban. Pada perjanjian ini, pemerintah diwakili oleh Bapak Letjen AM. Hendro Priyono.

Para korban yang berada di Lampung mendapatkan himbuan dari Bapak Darsono dan kelompoknya untuk terlibat dalam *islah* tersebut. Sebagian korban, termasuk saya, pun sepakat melakukan *islah*. Dengan pengertian bahwa kesepakatan *islah* itu untuk memulihkan dan mengembalikan hak-hak korban yang telah dirampas negara yang meliputi rehabilitasi, restitusi, maupun kompensasi.

Namun, hingga bertahun-tahun, *islah* yang kami sepakati bersama ternyata tidak ada realisasinya. Alih-alih restitusi dan kompensasi, rehabilitasi saja kami tidak mendapatkannya. Kesepakatan *islah* telah mengalami pembusukan. Pemerintah telah mengingkari dari butir-butir kesepakatan *islah* itu sendiri.

Karena merasa diingkari oleh Bapak Letjen AM. Hendro Priyono, keluarga korban yang berada di Lampung sepakat mencabut *islah* pada tahun 2001. Kami pun berkoordinasi untuk mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya.

Saya, dari kesepakatan tersebut, diutus paman Jayus untuk mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung untuk meminta pertimbangan dan advokasi atas kasus Talangsari.

Dengan ditemani oleh Bapak Azwar Kaili, saya berangkat ke LBH Bandar Lampung. Kami bertemu dengan Edwin Hanibal dan Fatoni Nurdin dari LBH Bandar Lampung. Dari pertemuan itulah disepakati untuk bersama-sama memunculkan kembali isu mengenai kasus Talangsari di tingkat daerah. Kami juga mendapatkan dukungan penuh dari Komite Smalam dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Bandar Lampung.

Pada 5 September 2001, rombongan korban Talangsari yang berada di Lampung, didampingi LBH Bandar Lampung dan Komite Smalam, berangkat ke Jakarta. Kami menuju kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan KontraS. Bersama kedua lembaga inilah kami merancang langkah dan strategi kegiatan selama di Jakarta.

Pada 7 September 2001, dengan didampingi KontraS dan Komite Smalam, kami mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kedatangan kami disambut oleh Bapak BN Marbun, Ketua Komnas HAM saat itu. Atas desakan kami, akhirnya, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM Talangsari.

Dalam perjalanannya, KPP HAM Talangsari ternyata tidak seindah dan semanis yang dibayangkan. Perjalanan pengungkapan kasus ini makin terseok-seok. Hidup segan, mati pun tak mau. Kinerja tim KPP HAM tidak jelas, selalu bergonta-ganti ketua dan komposisi keanggotaannya, hingga amburadulnya administrasi.

KPP HAM Talangsari punya sederet alasan dan jawaban untuk menghindari tuntutan kami. Misalnya, “Oh, ya. Kami sebelumnya minta maaf, beribu-ribu maaf. Kami masih sibuk dengan urusan-urusan yang begitu banyak, sehingga tim kami kurang kompak.” Atau, “Yah, coba akan kita pelajari lagi berkas-berkasnya sekaligus akan kita lengkapi data-datanya dulu baru kita melangkah untuk selanjutnya.” Jawaban lainnya, “Oke, kita mohon saudara-saudara sedikit bersabar. Percayalah, kami akan bekerja cepat setelah berkas-berkas kita dapatkan. Sementara ini berkas-berkas tersebut masih disimpan oleh Ketua KPP HAM Talangsari yang lalu.”

Begitulah, kami harus sabar memperjuangkan kasus ini ke pengadilan. Semoga kami semua memiliki nafas panjang dalam memperjuangkan kasus ini hingga waktu yang tak terbatas. Semoga para pembela kebenaran yang selalu mendampingi kami, khususnya KontraS, tetap konsisten dengan apa yang diperjuangkannya dalam membela dan memperjuangkan keadilan.

Saya, salah seorang korban Talangsari, merasa sangat terbantu oleh KontraS. Sudah tak terhitung lagi pengorbanan lembaga ini dalam memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM. Sebagai korban kami memang layak untuk selalu didampingi, dibantu, dan dipupuk spiritnya.

Sebagai korban Talangsari, kami sangat sadar bahwa kami tidak memiliki kemampuan yang bisa diandalkan dan dibanggakan.

Kami juga tidak memiliki jaringan yang luas, finansial yang cukup untuk hilir-mudik memperjuangkan kasus Talangsari. Tanpa dukungan, dorongan, dan arahan semua pihak, terutama KontraS, upaya memperjuangkan kasus Talangsari ini hanya akan seumur jagung.

Jakarta, Agustus 2008

TANJUNG PRIOK, SEBUAH PERJALANAN PENCARIAN DIRI

Oleh :
Muhammad Daud Berueh

Saya tumbuh merindukan sosok ayah. Sosok yang menjadi pengayom keluarga, mendatangkan rasa aman dan nyaman. Tapi, sosok yang kurindukan itu tak pernah ada di rumah.

Kelas satu sekolah dasar (SD), saya pernah bertanya kepada ibu, “Mah, *koke*, bapak tidak pernah pulang?” Dengan sedih ibu menjawab, “Belum saatnya bapak pulang ke rumah. Tunggu saja, nanti juga dia akan pulang.”

Sungguh, saya tidak mengerti apa yang telah terjadi pada ayah. Saya hanya bisa bertanya kepada kakek, nenek, paman, dan saudara yang lain.

Menurut kakek (almarhum), ayah ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena dianggap melawan negara. Ayah diberi label kelompok ekstrim kanan oleh rezim Orde Baru. Kakek, dengan pendidikan terbatas, menelan begitu saja stereotype dari rezim Orde Baru.

Alih-alih memuaskan, penjelasan kakek semakin membuat saya makin terpuruk dalam ketidaktahuan. Apalagi saya masih bocah ingusan, tujuh tahun, belum paham keruwetan dunia.

Saya kerap menghabiskan waktu liburan dengan menemani ibu menjenguk ayah di penjara, di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur. Puluhan penjaga berseragam dan bersenjata mengelilingi.

Paman dan kakek bercerita serba sedikit tentang penyebab ayah dipenjara. Pada 12 September 1984, kakek bertutur, terjadi tragedi besar di Tanjung Priok. Banyak warga kehilangan ayah, saudara, sanak, dan kerabat. Begitu pula harta benda.

Ratono, ayah saya, menurut kisah kakek dan paman, mengikuti pendidikan di Akademi Pendidikan Militer TNI Angkatan Laut. Lulus dari pendidikan, dia menjadi anggota Marinir TNI Angkatan Laut dengan dinas pertama di Surabaya. Sehari-hari ayah berada di atas kapal laut.

Tahun 1980-an, ayah dipindahkan ke kantor Marinir Angkatan Laut di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Letak kantor ayah tidak begitu jauh dari Perguruan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) yang didirikan almarhum Prof. Oetsmany Al-Hamidy. Kampus itu dikenal sebagai kampus perjuangan. Banyak penceramah yang kritis belajar di kampus itu.

Setiap hari, ketika adzan berkumandang, ayah biasanya langsung menuju mesjid untuk salat berjamaah di PTDI. Berawal dari seringnya salat berjamaah ini muncul ketertarikan ayah untuk belajar agama Islam lebih dalam. Ayah bahkan memutuskan untuk kuliah lagi, mengambil program sarjana dakwah di kampus tersebut.

Praktis, ayah makin sibuk. Selain bekerja di kantor TNI Angkatan Laut, dia juga harus meluangkan waktu belajar menekuni materi perkuliahan. Karena ketekunan dan keuletannya, dia dipercaya menjadi asisten almarhum Profesor Abu Hamidy. Salah satu tugasnya adalah menggantikan Profesor Abu Hamidy bila berhalangan berceramah.

Lalu, situasi politik semakin menekan. Pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan asas tunggal bagi semua partai politik,

organisasi masyarakat, dan seluruh elemen lembaga kemasyarakatan. Kebijakan ini memunculkan sejumlah protes keras dari berbagai pihak, termasuk dari para ulama di tanah air.

Melalui ceramah di berbagai mesjid, para ulama menyampaikan pendapat. Momentum pengajian, sholat Jumat, sholat lima waktu—terutama subuh dan maghrib dimanfaatkan para mubaligh. Ayah termasuk yang berceramah di masjid-masjid di Jakarta, mengkritik kebijakan asas tunggal. Saat itu dia masih aktif di TNI Angkatan Laut.

Puncak protes di kawasan Tanjung Priok terjadi pada 12 September 1984. Tabligh akbar digelar. Ayah salah satu dari penceramah pada tabligh itu, menggantikan Syarifin Maloko yang berhalangan hadir.

Ribuan umat Islam berkumpul di acara malam itu. Selain menyatakan protes atas asas tunggal, mereka juga menuntut pembebasan empat rekan mereka yang ditahan beberapa hari sebelumnya akibat insiden di Musholla As'saadah. Keinginan ini tidak terpenuhi. Pada pukul 11 malam, massa tabligh bergerak menuju kantor Kodim dan Mapolres Jakarta.

Ayah tidak ikut dalam barisan massa. Bersama para mubaligh, ayah berada di salah satu rumah warga. Saat itulah tragedi meletus. Suara rentetan tembakan terdengar. Korban berjatuh. Suasana di luar begitu kacau dan tidak terkendali.

Menyusul kekacauan itu, ayah melarikan diri ke luar kota. Ia khawatir akan menjadi target operasi berikutnya. Benar saja. Menurut ibu, saat ayah keluar kota untuk mengamankan diri, banyak aparat TNI dan intel—berpakaian sipil maupun seragam militer lengkap—datang mencari ayah.

Rumah kami di Bogor diawasi ketat. Paman saya, misalnya, ditodong senapan saat pulang dari kerja di malam hari. Tanpa ada proses bertanya lebih dahulu. Setelah tahu dia bukan ayah saya, barulah para tentara berhenti bertindak intimidatif terhadap paman. Keluarga besar kami sering kena bentak aparat dalam proses itu. Pencarian dan pengintaian ayah juga telah membuat warga kampung merasa tidak nyaman.

Pada bulan Oktober 1984, empat puluh hari setelah peristiwa Tanjung Priok, ayah ditangkap intel TNI Angkatan Laut di Pandeglang, Banten. Menurut ibu, seluruh keluarga –termasuk kakek yang sudah sepuh dan saya yang masih bayi tujuh bulan—dijadikan jaminan. Kami semua dibawa ke Pandeglang.

Setelah melalui proses yang berlarut-larut, ayah dipindahkan ke tahanan Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda), di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dengan tuduhan subversif.

Pada waktu itu berkembang pendapat bahwa sikap kritis terhadap pemerintah adalah tindakan melawan negara. Orang yang aktif dalam kegiatan agama juga disebut kelompok ekstrim kanan. Dengan asumsi semacam inilah sebagian besar warga kampung menyudutkan keluarga kami ketika ayah ditangkap. Apalagi penjara selalu diartikan sebagai tempat para kriminal. Ucapan-ucapan tidak nyaman sering menyambar keluarga kami.

Keadaan ini tidak membuat keluarga kami terpuruk dalam keputusan. Kami tidak berkecil hati. Dengan hati tulus kami terus berusaha menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar.

Sementara itu, keluarga ayah di Tegal, Jawa Tengah, menggelar tahlilan. Mereka menganggap ayah telah tiada.

Tulang punggung keluarga otomatis berpindah dari ayah kepada ibu. Selain mengurus rumah tangga, ibu adalah guru bantu di sebuah sekolah. Gajinya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli susu saya, anaknya.

Kami pun mengandalkan belas kasihan sanak saudara. Saat lebaran, misalnya, tak mungkin ada acara membeli baju bersama ibu. Kami hanya bisa berharap dan menunggu dibelikan baju oleh saudara atau orang yang lain yang bersimpati pada keluarga kami.

Pembebasan Ayah

Pada tahun 1992, ayah dibebaskan. Saya masih delapan tahun ketika itu.

Pada masa ayah ditahan, saya hanya bisa bertemu sekali seminggu, 2-3 jam, pada waktu *bezoek*. Saya tidak pernah merasakan kehangatan seorang ayah. Bercanda, berlibur, bermanja dengan ayah adalah khayalan.

Lalu, tibalah hari itu, hari ketika ayah dibebaskan dari penjara. Saya senang tiada terkira. Kerinduan saya terobati. Keluarga kami mengundang warga kampung dan kerabat untuk selamatan, merayakan kepulangan ayah dari penjara.

Informasi tentang ayah pun perlahan-lahan terkumpul. Potongan *puzzles* mulai menjadi utuh. Ayah menuturkan peristiwa Tanjung Priok yang berbuntut pada penangkapannya. Ayah juga menuturkan pengalamannya saat disiksa dan diperlakukan dengan kejam oleh aparat TNI. Saya hanya bersedih dan menangis mendengarnya.

Saya memang masih ingusan, bocah delapan tahun. Tapi, saya mengerti bahwa ayah menderita akibat disiksa, disetrum, dan dikenai berbagai tindakan kekejaman.

Bagi ayah, ada yang lebih menyakitkan dari sekadar siksaan fisik. Reaksi keluarga dan saudara yang menganggap ayah sebagai seorang kriminal dan melawan negara, itu yang lebih menyakitkan ayah.

Beranjak Dewasa

Beranjak remaja, saya bersekolah di SMU (Sekolah Menengah Umum) di Bogor. Saya aktif di organisasi siswa intra sekolah (OSIS) untuk memupuk percaya diri. Saya mulai berani mempertanyakan berbagai hal yang tidak saya mengerti.

Pelajaran yang saya sukai adalah sejarah. Lewat pelajaran inilah saya dapat mengetahui masa lalu bangsa saya. Berbagai pertanyaan saya tentang masa lalu dijawab memuaskan oleh ibu guru. Namun, ada satu pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab, yakni tentang peristiwa Tanjung Priok.

Mereka tidak bisa menjawab bukan karena tidak mampu menjelaskan, tetapi lantaran keterbatasan informasi mengenai peristiwa itu. Pertanyaan serupa saya ajukan kepada teman di organisasi Karang Taruna, pengajian kampung, hingga teman di berbagai kegiatan sosial. Namun, tak ada satu pun penjelasan memuaskan. Tak sedikit pula yang menyalahkan korban peristiwa Tanjung Priok. Tak ada yang melihat peristiwa itu secara lebih jernih.

Walaupun berbagai keterangan yang saya dapatkan lebih banyak menyudutkan ayah, namun kepercayaan saya terhadap ayah tidak

surut. Saya sangat percaya dengannya. Ia tidak mungkin melakukan tindakan kriminal. Di mata saya, dia orang yang memiliki harga diri, wibawa, dan idealisme. Terlebih lagi dengan posisi sebagai seorang mubaligh yang memiliki latar belakang militer di Angkatan Laut. Tentunya ia memiliki disiplin, karakter, dan mental yang kuat.

Saya juga yakin bahwa kebenaran yang berpihak pada ayah pasti akan datang. Kejahatan yang terjadi pada peristiwa Tanjung Priok akan terkuak. Keteguhan membela kebenaran adalah sikap yang diwariskan oleh ayah. Pernah dia berucap, “Ayah dipenjara oleh negara gara-gara membela kebenaran.”

Pencarian Jati Diri

Lulus SMA (Sekolah Menengah Atas), pada 2002, saya berniat melanjutkan kuliah di Jakarta. Namun harapan itu pupus. Ayah tidak punya uang untuk membiayai kuliah.

Selepas dari penjara dia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain mengajar di Perguruan Tinggi Dakwah Islam, ayah biasanya mengisi ceramah di masjid. Itupun jika ada orang yang mengundangnya.

Melihat kondisi ini, saya sedih, marah, dan sakit. Semuanya campur aduk. Perekonomian keluarga kami menjadi hancur. Hancur karena ditinggalkan tulang punggung yang harus dipenjara tanpa alasan kuat.

Saya berusaha bangkit. Sudah cukup orangtua menyekolahkan saya hingga SMA. Sekarang saatnya saya melanjutkan hidup. Saya tidak berkecil hati. Kondisi ini saya jadikan cambuk pemicu untuk menggapai cita-cita dan harapan saya : kuliah.

Saya tak segan menjadi tukang ojek. Setiap pagi saya berhenti di perempatan jalan menunggu penumpang yang lewat. Tapi, penghasilan mengojek belum juga cukup untuk membiayai kuliah. Saya memberanikan diri membawa mobil angkutan kota bernomor 06, jurusan Parung-Bogor. Lagi-lagi, penghasilan sebagai supir angkot tak kunjung cukup untuk membuat saya bisa mendaftarkan diri ke universitas.

Saya berhenti menjadi supir angkot. Berbekal ijazah SMA, saya melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan. Pada tahun 2003, saya berkesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. Dua bulan saya mengikuti program ini. Sertifikat saya kantong.

Singkat kata, saya memberanikan diri datang ke Jakarta. Saya diterima bekerja di salah satu percetakan di Senen, Jakarta Pusat.

Sejak di Jakarta ini saya sering diajak ayah pergi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya bertemu dengan rekan-rekan ayah sesama korban Tanjung Priok. Dari merekalah saya mengerti tentang proses persidangan yang sedang berjalan. Saya rajin mengikuti persidangan Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok yang digelar seminggu tiga kali. Melalui proses persidangan itu, saya mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu dan apa yang sedang diperjuangkan ayah.

Saya sangat kaget ketika pertama kali datang ke persidangan. Begitu banyak tentara berseragam memadati ruang persidangan. Tak ayal, kondisi ini menciptakan rasa ketakutan kepada pengunjung.

Pada saat mengikuti persidangan, saya merasa ada sesuatu yang berharga dalam hidup saya yang dulu pernah hilang dan kini kembali. Proses pencarian jati diri saya pun semakin mengkilat.

Setiap kali pulang dari persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya diajak rekan-rekan ke kantor KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Kami mengikuti rapat menyikapi proses persidangan. Ada kebanggaan dalam diri saya ketika ikut berdiskusi dan melakukan rapat di KontraS.

Aktivitas di KontraS, juga perjumpaan dengan sesama korban peristiwa Priok, membuat saya makin mendalami berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Saya mulai rajin membaca buku tentang HAM dan sering membawa pulang buletin KontraS untuk dibaca di rumah. Pergumulan ini semakin menguatkan pemahaman saya bahwa peristiwa Tanjung Priok adalah pelanggaran HAM berat.

Saya juga mulai mengikuti serangkaian aksi yang dilakukan korban bersama KontraS ke berbagai lembaga terkait. Kami mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan instansi terkait lainnya. Saya sering mendengarkan orasi yang dilakukan almarhum Munir dan rekan-rekan KontraS. Dari pergumulan ini saya sadar bahwa pelanggaran HAM di Indonesia cukup banyak, bukan hanya peristiwa Tanjung Priok.

Lewat aktivitas inilah saya menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Saya mengundurkan diri bekerja di percetakan dan memutuskan bergabung bersama korban, keluarga korban, dan KontraS untuk terus mengikuti persidangan Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok.

Setelah persidangan itu selesai, saya bergabung di KontraS.

Untuk mendukung kemampuan pendampingan, saya melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta mendalami Ilmu Hukum. Tak disangka, cita-cita saya untuk kuliah tercapai. Tuhan memberi jalan tak terduga.

Harapan dan Impian

Tak hanya cita-cita kuliah yang tercapai, saya juga berkesempatan berjuang di bidang penegakan hak asasi manusia. Ini sebuah keistimewaan yang luar biasa bagi saya.

Berbagai kasus pelanggaran HAM terus dan terus terjadi di negeri ini. Hal ini karena tak ada penegakan hukum yang berarti bagi para pelaku pelanggaran HAM.

Maka, deretan kasus pelanggaran HAM begitu panjang. Mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Tanjung Priok, Talangsari, tragedi Mei, penculikan dan penghilangan paksa, Trisakti, Semanggi I dan II, DOM di Aceh, Papua, pembunuhan Munir, dan banyak lagi lainnya.

Bersama teman-teman KontraS, saya terus berjuang bersama korban pelanggaran HAM untuk menagih hak dan keadilan mereka yang dirampas oleh negara dan para penguasa.

Adanya penghukuman terhadap pelaku, tentunya dapat memberikan efek jera agar penguasa tidak mengulangi kejahatan serupa. Penghukuman juga menunjukkan kepada bangsa dan dunia internasional bahwa negara kita adalah negara hukum.

Penuntasan kejahatan masa lalu adalah langkah awal menuju bangsa yang lebih baik dan bermartabat. Sebagaimana pernah diungkapkan para pendiri bangsa, “Jangan pernah melupakan sejarah kelam di masa lalu. Jangan sampai ketidakadilan diadakan dan ketidakbenaran yang dibenarkan.”

Jakarta, September 2008

PIALA UNTUK AYAH

Oleh :
Lita BM

Aku selalu gagal menghalau air mata setiap kali mengenang gerbang sekolah. Di gerbang itu, tak pernah kujumpai sosok ayah menjemputku, sebagaimana kawan-kawanku lainnya.

Kepahitan semakin terasa ketika stigma yang mengelilingi ayahku, penyandang gelar “buronan” dan “gali”, diarahkan kepadaku. Teman-teman menjauhiku. Aku berkawan dengan kesendirian.

Entah ke mana ayahku pergi, tak pernah kutahu. Yang aku tahu, keceriaan kanak-kanak bukan milikku. Saban kali kuterima tatapan tajam dari orang tua dan kawan-kawanku. Tatapan yang seolah hendak menelanjangiku.

Sejak lahir, aku belum pernah melihat paras ayahku. Sepenurut cerita kakak tertuaku, ayah mempunyai banyak teman. Ayah adalah sosok yang hangat. Beliau tidak segan memberikan pertolongan baik pada saudara maupun kawan-kawannya.

Mungkin sebuah kesalahan ketika beliau mau direkrut untuk dunia intelejen dan mendirikan Yayasan Fajar Menyingsing dimana beliau mendidik eks narapidana untuk diarahkan menjadi lebih baik. Sampai kemudian tiba-tiba beliau dikejar-kejar hendak dijadikan target **Petrus**. Sampai sekarang sebab beliau dijadikan target kami tidak tahu. Kami selalu bertanya-tanya, mengapa sosok ayah yang selalu berperilaku baik menjadi buronan petrus alias penembakan misterius.

Beruntung, di tengah kepahitan ditinggal ayah, aku masih memiliki harta tak ternilai bernama cinta. Kasih sayang dari ibu

dan kakak-kakakku begitu melimpah. Merekalah yang turut membangun hatiku hingga tumbuh kuat seperti cadas.

Ayah “pergi” meninggalkan rumah ketika kami, enam bersaudara, anak-anaknya, masih kecil. Kakak tertuaku bahkan masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar (SD).

Aku, si bungsu, hanya 15 menit merasakan pelukan ayah. Tubuh merahku tak sempat merasakan dekapan ayah karena beliau harus menyelamatkan diri sesaat setelah kelahiranku.

Kepergian ayah membuat keadaan ekonomi keluargaku begitu carut marut. Ibuku, hanya ibu rumah tangga biasa, harus sepenuhnya mengambil kendali. Bisa dibayangkan betapa kalangkabut ibu mengurus enam anak.

Namun, penderitaan justru membuatku terpacu untuk melakukan pembuktian. Bahwa tanpa sosok ayah, kami sekeluarga mampu bertahan menghadapi semua beban, termasuk deraan stigma negatif tentang ayah. Semakin kencang stigma miring itu ditimpakan, semakin menebal perasaan bahwa gelar “buronan” dan “gali” buat ayah adalah omong kosong belaka.

Menurut cerita kakakku, ayah sangat mencintai keluarga, terutama anak-anaknya. Beliau sosok yang hangat dan berwibawa. Hal inilah yang membuatku kuat. Aku bagai ditenagai oleh energi luar biasa yang membangunkan kesadaranku tentang sosok ayahku yang sejati. Kakakku bercerita, ayah tidak menyukai anak cengeng. Sejak itu aku berusaha untuk tidak cengeng bin *nangisan*.

Perlahan aku mulai bisa menalar atas apa yang menimpa ayahku. Aku pun mengerti bahwa, dalam pelariannya, ayah tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Beliau masih melakukan kontak dan rutin mengirim sejumlah uang kepada kami. Entah bagaimana caranya, mungkin ayahku harus bertaruh nyawa untuk itu.

Semua itu membuatku memandang ayahku sebagai tokoh kesatria Jawa. Kesatria yang dalam pelariannya masih memikirkan masa depan anak-anaknya. Kesatria yang selalu bertaruh nyawa demi menafkahi darah dagingnya –yang demi keselamatan bersama, berpisah raga tapi tidak rasa.

Aku masih kanak-kanak biasa. Aku selalu merindukan kehadiran ayah dalam arti sebenarnya. Untung, Tuhan selalu ada di sisiku, karena Dia selalu mengirimkan ayahku lewat mimpi. Tidak berlebihan bila pernah aku berpikiran tidak akan pernah bangun dari tidur, demi berjumpa dengan ayah. Tapi, hidup harus terus berjalan, meski tanpa pelukan ayahku.

Setiap bulan, ada kawan ayah atau kurir datang ke rumah. Mereka membawa kiriman dari ayah: uang sekolah, susu, dan baju. Tak kalah istimewanya adalah kiriman surat dan kaset yang berisi rekaman suara ayah. Kaset dan surat inilah yang menemani kami tumbuh.

Melalui kaset-kaset itu, ayah menorehkan benang merah tentang arti kehidupan. Pelajaran tentang kebenaran hidup yang dituangkan dalam bahasa sederhana dan ringan untuk anak-anak. Namun, melalui kata-kata yang sederhana ini beliau mampu mengirimkan tenaga dan kekuatan. Kami harus terus belajar, berjuang, dan melawan kesulitan hidup.

Kami selalu ingat hangatnya suara ayah dalam kaset-kaset yang beliau kirimkan. Ayah selalu menutupnya dengan kalimat: “Teruslah berjuang dan berdoa anakku. Jangan pernah menyerah. Ayah selalu mencintai kalian.” Air mata selalu menetes ketika

kami mendengar kalimat itu. Kalimat penuh cinta yang membangun mental kami yang masih belia.

Ayah selalu membuat kami tercengang akan petuah yang dituturkannya lewat kaset. Dialah yang pertama memberikan pelajaran bagi kami tentang nilai-nilai hidup. Tentang keteguhan pendirian, ketekunan, keinginan kuat, dan semangat pantang menyerah untuk menggapai cita-cita. Sekolah tidak membekali kami dengan nilai-nilai ini. Ayahku, yang harus putus SMA karena keterbatasan ekonomi, ternyata memiliki pandangan yang luas.

Beliau meyakinkan kami bahwa hidup akan dapat sedemikian bahagia jika kita mampu memaknai keterbatasan dengan ikhlas dan mental berjuang tanpa mengenal lelah. Gemuruh hatiku mendengar suara ayah dalam pita kaset itu menasehatiku untuk rajin belajar dan berusaha menjadi yang terbaik.

Lewat pita kaset itulah, petuah-petuah ayah menyelinap, merasuk, menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kami, anak-anaknya. Kekuatan pesan suara ayah ini adalah kemewahan yang tak akan kutukar dengan kemewahan yang dimiliki teman-temanku di sekolah, tentang liburan atau punya berbagai benda bagus.

Pesan-pesan ayah juga membuat keyakinanku semakin membumbung tinggi. Aku harus membuktikan diri sanggup berprestasi walau aku dicap sebagai “anak gali”.

Pelahan aku mengenal sosok ayahku yang sebenarnya. Aku percaya ayahku adalah kesatria tanpa pamrih yang tertindas karena loyalitasnya terhadap negara. Kesatria yang menjadi tumbal kebijakan penguasa. Dalam kesahajaan ayah dan loyalitas itulah kebahagiaan keluarga kami terenggut. Nyawa ayah kami setiap detik harus ada di ujung tanduk. Dialah saksi sekaligus korban dalam drama republik ini.

Tapi aku masih terlalu kecil untuk bisa mencerna dan mengerti cerita kakak-kakakku tentang jiwa nasionalis dan loyalitas dalam diri ayahku. Yang bisa kulakukan adalah terus belajar dan menggali potensi diri sesuai pesan ayah.

Walau tak pernah bertemu, aku akan membuatnya bahagia dengan berprestasi. Aku memupuk hobiku menyanyi karena nilai akademisku di sekolah tidak meloloskanku masuk dalam tiga besar siswa. Nah, dari hobi menyanyiku aku mulai memberanikan diri unjuk kebolehan di depan kelas.

Aku mengikuti berbagai lomba. Mulai dari sekolah, pelataran parkir swalayan, aku ikuti. Semuanya demi mengasah kemampuanku bernyanyi. Dengan segala keterbatasan, aku menguatkan hati. Aku ingin mempersembahkan kebanggaan kepada ayahku, yang entah ada di mana.

Pertama kali mengikuti perlombaan menyanyi ketika aku masih kelas 2 SD, ditemani kakak laki-lakiku yang saat itu kelas 3 SD. Aku memberanikan diri mengikuti perlombaan di sekolah ternama di daerah tempat tinggalku. Kupeluk erat kakakku yang mengayuh sepeda butut untuk menghantarkan dan menemaniku menuju sekolah itu.

Kami cuma berbekal makanan seadanya. Mengenakan baju kakak perempuanku, yang dirajut ulang oleh ibuku, aku mengikuti perhelatan itu. Baju itu tak berani kupakai dari rumah, karena takut kotor terkena lumpur dalam perjalanan.

Nyaliku diuji begitu kami tiba di sekolah itu. Semua peserta mengenakan baju-baju bagus. Rasa minder mulai menggelayutiku. Terlebih suara mereka diolah oleh guru-guru vokal yang serius. Sedangkan aku, aku hanya belajar menyanyi dalam kesendirianku.

Sungguh, nyaliku ciut. Beruntunglah, di sampingku ada kakak yang memberikan dukungan. Dia mengutip kata-kata ayah untuk membuatku tetap bersemangat.

Sayang, kemenangan belum dapat kuraih. Mungkin Tuhan ingin agar aku lebih keras lagi dalam belajar menyanyi. Kekalahan ini tidak membuatku menyerah. Aku terus mencoba mengasah kemampuanku bernyanyi. Dimulai dari perlombaan karaoke tingkat kampung, pelataran pakir, hingga mall mall besar di kotaku. Panggung-panggung kecil ini memberiku pelajaran luar biasa. Akhirnya, pada perlombaan yang kesekian kali, aku bisa membawa piala kemenangan untuk keluargaku.

Piala pertamaku ini adalah gerbang dari langkah awal untuk terus menggapai prestasi. Aku terus mencoba mengikuti ajang perlombaan yang lain yang mungkin lebih bergengsi. Aku juga mengikuti perlombaan yang menjanjikan hadiah uang yang nilai nominalnya lumayan untuk anak seusiaku. “Jika aku bisa menang, maka pulangnya harus naik taksi,” begitu kukatakan kepada ibu dan kakak perempuanku.

Tuhan mendengar doaku. Saat itulah untuk pertama kali aku dan ibu beserta kakak-kakakku merasakan bahagianya bisa naik taksi bersama, dan membawa piala kemenangan.

Sejak itu aku sering diminta membawa nama sekolah untuk mengikuti berbagai festival menyanyi. Mulai dari sinilah aku bertekad untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk sekolahku. Sesuai pesan yang diajarkan oleh ayahku bahwa hidup untuk memberi atau menyumbang dalam bentuk apapun sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun sebanyak-banyaknya.

Suatu ketika aku mengikuti lomba yang lumayan berbobot, yaitu kejuaraan memperebutkan piala walikota. Ajang pelombaan yang

cukup bergengsi. Biaya pendaftaran menyanyi ditanggung oleh sekolah. Namun, baju dan perlengkapan lomba menjadi tanggungjawabku.

Dengan doa dan semangat yang selalu menyala, aku berjuang. Dalam babak penyisihan yang pertama semua peserta wajib mengenakan seragam sekolah. Aku menarik nafas lega karena tidak dipusingkan dengan urusan baju.

Ibuku, perempuan perkasa yang selalu melimpahiku dengan kasih sayang, mendampingiku setiap kali aku mengikuti lomba. Ibu setia membawakanku perasan jeruk nipis untuk menjernihkan pita suara. Asamnya rasa air jeruk yang mengalir ke dalam kerongkongan, membasahi pita suaraku, terasa bagai cambuk yang menggambarkan guratan keletihan ibuku. Cambuk inilah yang membuatku mampu berdiri tegak dan mengobarkan semangat pantang menyerah.

Aku mampu menyingkirkan ratusan peserta dari berbagai macam sekolah. Namaku masuk sepuluh besar finalis. Pejuanganku belum usai. Di babak final, peserta diharuskan mengenakan gaun.

Gaun sangat mahal harganya. Tubuh gempal yang kumiliki tidak bisa berkompromi untuk sekedar menyewa baju. Baju kakak-kakakku tak lagi dapat kupakai karena sudah terlalu sempit untukku. Ingin rasanya aku menangis.

Namun, di telingaku selalu berdengung pesan-pesan ayahku untuk tidak menyerah walau dalam himpitan keterbatasan. Pesan yang mengkristal dalam hatiku, bagai magma yang luar biasa bergemuruh dalam hatiku.

Ah.. kupikir masa bodoh dengan semua ini, aku akan tetap mengenakan seragam sekolah dalam babak final. Ajang ini bukan

ajang pemilihan putri kecantikan. Seragam sekolah kiriman ayahku hasil dari peluh dan air mata penderitaan ayahku, akan menjadi baju terbaik di antara gemerlap gaun finalis yang lain.

Aku meneguhkan niat mempersembahkan yang terbaik untuk sekolahku. Aku harus membawa nama sekolahku yang tertempel di seragam sekolahku. Seperti ayahku, aku tak boleh menyerah.

Para finalis lain memandangu dengan roman muka kesombongan. Aku tak peduli. Bukankah aku sudah terlatih untuk menghadapi semua itu? Tak ada yang perlu kupusingkan. Aku tak perlu takut karena di dalam tubuh gempalku mengalir darah kesatria yang tak pernah menyerah pada realita kehidupan. Panitia perlombaan cukup bisa memberiku toleransi untuk tetap mengikuti perlombaan. Aku bersyukur, ternyata masih tersisa orang-orang yang tidak buta dan tuli oleh paradigma yang menyulitkan.

Semangatku terus meroket dalam detik-detik kegalauan. Detak jantungku menggemuruh menunggu hasil pengumuman perlombaan. Akhirnya, Tuhan mendengar pinta ibuku dalam tiap sujud dan doanya agar aku bisa membawa piala kemenangan.

Tepuk tangan riuh terdengar. Saat itu aku merasa diakui, aku merasa dihargai, aku merasa diterima oleh dunia.

Langkahku gemetar menuju panggung. Akhirnya, aku bisa benar-benar menggenggam piala kemenangan dari walikota. Tak bisa kubendung air mataku. Kupejamkan mataku sekian detik, dan kubayangkan wajah ayah yang tersenyum. Aku harap ayah bahagia, meskipun piala ini pastilah tak mampu menghilangkan penderitaan dan getir yang terus menyelimuti hari-hari ayahku dalam pelariannya. Kalaupun KOMNAS HAM telah membentuk tim penyelidikan kasus Penembakan Misterius toh masih panjang

jalan yang harus kami tempuh.

Yang pasti hanya satu keinginanmu, ayah bahagia dan kala piala itu dalam genggamanku lirih dalam hati kuucapkan, "Ayah, piala ini kupersembahkan untukmu."

Jakarta, September 2008

PEMBANTAIAN MASSAL DALAM MEMORI

Oleh :
Bedjo Untung

Ada ironi yang terus menghantui sejarah kontemporer kita. Ironi teramat pahit yang susah dipercaya, terutama oleh generasi yang lahir jauh dari era 60-an.

Pembantaian massal telah terjadi di negeri yang katanya berpenduduk ramah ini. Pembantaian di masa damai, bukan di tengah perang. Ya, tragedi itu terjadi di negeri yang menyatakan diri memiliki dasar dan falsafah Pancasila. Sebuah ideologi yang diracik dari unsur terbaik demokrasi Barat ala Amerika, Manifesto Komunis, dan demokrasi model Lenin. Sebuah ideologi yang semestinya menumbuhkan toleransi dan penghormatan kepada sesama yang beraneka ragam. Bhinneka Tunggal Ika.

Dini hari 1 Oktober 1965, awal serentetan peristiwa yang akan dicatat sejarah dengan tinta hitam. Dini hari itulah terjadi drama penculikan enam orang jenderal oleh sekelompok orang berseragam militer Angkatan Darat. Drama yang diikuti dengan kudeta berlumuran darah, *creeping coup d'etat*, berpindahnya kekuasaan dari tangan Soekarno ke Soeharto.

Drama gelap tak berhenti hanya dengan duduknya Soeharto di kursi penguasa. Orang-orang, baik yang beraliran kiri atau yang sekedar “berbau” kiri, diburu. Mereka disiksa, dibuang, dibunuh, dan dibantai. Berapa sebenarnya korban pembantaian massal ini tak pernah jelas.

Oei Tjoe Tat, Ketua Tim Pencari Fakta yang ditugasi Presiden Soekarno untuk mengumpulkan data korban pembantaian

massal, menyebut angka 80.000 jiwa yang terbunuh. Namun, angka itu jauh lebih kecil dari kejadian sesungguhnya. Pada buku *Memoar Oei Tjoe Tat* disebutkan bahwa korban pembantaian massal tersebut mencapai 800 ribu jiwa.

Versi lain datang dari Ratna Sari Dewi Soekarno, isteri Presiden Soekarno, yang menyebut korban mencapai ada 2 juta jiwa. Amnesty Internasional menyatakan 1 juta jiwa terbunuh. CIA (Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat) dalam laporannya menyebut angka korban terbunuh 500.000 jiwa. Bahkan, Sarwo Eddy Wibowo yang ketika itu sebagai Komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) pasukan elit yang ditugasi untuk menumpas dan membunuh orang-orang yang dituduh komunis, menyebut korban terbunuh sekurangnya tiga juta orang. Kesaksian Sarwo Eddy ini disampaikan kepada Permadi S.H., tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Bukan hanya sekadar angka korban yang dikerdilkan, makna pembantaian massal pun kerap direduksi demi alasan ideologi. Publikasi CIA setebal 300 halaman yang ditulis oleh Helen Louis Hunter, memberi justifikasi, pembenaran pada pembunuhan massal itu. Menurut Hunter, pembantaian adalah tindakan alami yang wajar. Partai Komunis Indonesia (PKI) dianggap ancaman sehingga terjadilah *clash* horisontal itu.

Padahal, mengingat skala korban dan penderitaan yang luar biasa, alasan pembenaran itu adalah penghinaan pada kemanusiaan. Tindakan penghilangan paksa nyawa seseorang yang dilakukan oleh sekelompok orang, baik bersama-sama mau pun sendiri-sendiri, apalagi dalam skala besar, tidak dapat dibenarkan oleh agama dan kepercayaan mana pun.

Berikut ini adalah testimoni saksi korban langsung tragedi kemanusiaan 1965/1966. Kesaksian pertama dari mulut seorang

ibu yang menceritakan kembali amuk massal yang menimpa desanya di Boyolali. Kesaksian kedua dari seorang aktivis Gerwani yang ditahan di Palembang.

Penggalan Kepala di Sepanjang Jalan

Ibu Endang Kustantinah kini berusia 51 tahun, saat ini tinggal di Tangerang, Banten. Bekerja sebagai tenaga pengajar pada sebuah sekolah negeri.

Sejak peristiwa 1965 ia harus mengungsi, meninggalkan tempat kelahirannya karena teror di desanya. Bertahun-tahun ia tidak bisa menceritakan kisah yang ia alami. Trauma berat setiap kali mengenang ayahnya yang hilang. Derai air mata dan isak selalu menyertai setiap kali ia mengisahkan kembali pengalaman tragedi kemanusiaan 1965.

Inilah petikan testimoni Ibu Endang yang kala kejadian itu adalah murid Sekolah Dasar (SD) Kragilan, Boyolali, kelas 2.

Pagi itu aku berangkat ke sekolah seperti hari-hari biasa. Namun, begitu melangkah ke luar rumah perasaan aneh menyergap diriku. Jalanan desa begitu lengang.

Dan perasaan aneh itu tidak berhenti ketika aku sampai di sekolah. Gerbang sekolah masih ditutup rapat. Aku ingin segera masuk ke pelataran sekolah, masuk ke ruang kelas dan menaruh tas di laci bangku, kemudian berlari ke sekumpulan teman yang sedang bermain. Tapi pagi itu teman-temanku, juga guru-guruku, tak muncul. Beberapa jam menunggu, akhirnya aku yakin: hari itu sekolah libur.

Seorang bakul (pedagang) yang melewati sekolah itu berkata, “*Nduk, sekarang sekolah libur, lebih baik pulang saja.*”

Aku bergegas pulang, akan kukatatakan kepada ibu bahwa sekolah libur hari ini. Dan aku akan segera bisa membantu ibu menyapu lantai, menyapu halaman, atau bermain dengan adikku yang masih kecil.

Namun, apa yang kusaksikan di tikungan jalan kecil menuju ke rumahku membuatku pening. Sekelompok orang yang tidak aku kenal menghalangi jalan. Wajahnya garang, mengacungkan golok, pentungan kayu, linggis, clurit, kelewang, bambu runcing, dan senjata tajam lainnya. Aku berlari menghindar, mencari jalan lain menuju ke rumahku.

Ke mana pun aku berlari, kujumpai kerumunan orang beringas itu. Mereka mengeroyok dan memukuli orang. Malahan ada yang menenteng penggalan kepala. Darah berceceran di sepanjang jalan. Aku lebih merasa takut lagi karena di setiap sudut jalan ada penggalan kepala yang berlumuran darah, dicocokkan pada potongan bambu runcing.

“Bunuh orang-orang PKI, tangkap hidup atau mati,” begitu teriak kerumunan massa berulang-ulang.

Aku menjadi miris, takut sekali. Karena yang dimaksud dengan orang-orang PKI antara lain ayahku sendiri dan teman-teman ayahku. Ketika itu ayahku menduduki jabatan penting di daerah Boyolali. Ayah seorang anggota DPRD, di desanya ia seorang sekretaris desa atau carik desa yang juga merangkap ketua PPDI (Persatuan Pamong Desa Indonesia).

Ayah yang kukenal adalah seorang lelaki yang sangat baik. Namanya Siswowitzono, 47 tahun ketika geheran itu terjadi. Ia pamong desa yang banyak bekerja untuk kesejahteraan warga desanya.

Rumah kami selalu ramai dikunjungi warga. Ayahku orang yang dihormati. Aku masih ingat, suatu hari seorang petani dari dusun

Cepogo di lereng Gunung Merapi datang bertamu. Ia datang secara khusus untuk mengucapkan terima kasih. Berkat perjuangan ayahlah, sang petani akhirnya mendapat tanah garapan dari tanah bekas perkebunan karet yang ditinggalkan Belanda.

Aku tidak mengerti, apa dosa dan salah orang-orang yang dituduh PKI itu sehingga mereka dipukuli, dikejar-kejar, dan dipotong lehernya. Aku jadi teringat salah satu di antara mereka seorang yang masih beruntung. Namanya Supomo, ketika itu umurnya sekitar 24 tahun dan ia anggota Pemuda Rakyat. Telinga Supomo dipotong sampai darahnya berceceran di jalanan. Ia sekarang masih hidup, menghabiskan sisa umurnya dengan bertani, tinggal di desa Teras, Kabupaten Boyolali.

Di jalanan, aku menyaksikan sendiri puluhan orang laki-laki dalam keadaan tangan diikat dengan tali goni. Ada yang kedua tangannya diikat ke belakang, ada pula yang tangannya diikat di depan perutnya. Mereka membungkuk sambil mengerang kesakitan,

“Duh.... duh..... duh.... aduh..... duh..... dduhhhh.....” Sekujur tubuh dan kepala mereka berlumuran darah. Baju dan celana mereka robek-robek karena diseret-seret di sepanjang jalan, malahan ada yang telanjang dada dan bercelana kolor saja. Mereka digiring menuju ke kantor kelurahan sambil dicambuki. Aku tidak tahan melihat pemandangan itu. Aku terus berlari dan berlari secepat-cepatnya, takut kalau-kalau aku juga akan ditangkap. Sampai di rumah aku segera masuk dan menemui ibu. Kudapati ibu sedang mendekap adikku perempuan, si bungsu yang masih kecil. Sambil menangis aku bertanya: “Bu, di mana ayah ? Bu, di luar sana banyak teman-teman ayah dikeroyok, dipukuli. Bu, di mana, di mana, di mana ayah?”

Sudah beberapa hari ini ayahku tidak ada di rumah. Ada yang memberitahukan bahwa ayah sudah ditahan di Kantor Kodim

Boyolali. Ada yang mengatakan ia memenuhi panggilan aparat militer untuk menyerahkan diri. Atau bisa jadi ayahku menghindar dan bersembunyi di suatu tempat dari amuk massa.

Aku, ibu, adikku tak tahu di mana ayah berada. Dan ini membuat kami khawatir, jangan-jangan kejadian buruk menimpa ayahku. Apalagi, beberapa hari yang lalu kakak-kakakku mengungsi, bersembunyi, menyelamatkan diri dari gerombolan orang-orang yang ingin membunuh, dan menangkap orang-orang atau keluarga-keluarga yang diduga anggota PKI.

Hari itu, rumahku terhindar dari amukan massa yang ingin menangkap ayahku. Mungkin mereka sudah tahu bahwa bapak dan kakak-kakakku sudah pergi entah ke mana. Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai kira-kira seminggu sejak kejadian yang aku ceriterakan di atas.

Lalu, kira-kira minggu ke tiga Oktober 1965, ayahku pulang. Ketika itu menjelang Maghrib, hari sudah gelap sehingga orang tidak mengetahui kepulangan ayahku. Aku terisak menangis dan bersyukur menyaksikan ayahku selamat. Aku lega karena nasib ayahku tidak seburuk teman-temannya yang disiksa, dipukuli, diseret, dicambuki, dipotong telinga, atau dipenggal lehernya.

Kegembiraan ini rupanya tidak berlangsung lama. Malam itu, kira-kira sehabis Isya', gerombolan massa beringas itu mengepung rumahku. Membawa pentungan, linggis, tombak, kelewang, dan golok, mereka berteriak, "Tangkap PKI. Bunuh. Jangan sampai lolos." Jumlah mereka lebih besar dari kelompok massa yang menghadangku saat pulang sekolah pekan lalu. Ada lima puluhan orang.

Aku mendengar jelas suara linggis yang dipukul-pukulkan ke tembok rumahku. Mereka rupanya akan mendobrak pintu. Ayahku dengan tenang membukakan pintu. Dua orang aparat militer bersenjata diikuti gerombolan pemuda terus masuk dan

menghambur ke dalam rumah. Mereka mengacak-acak, mengobrak-abrik, dan menjarah rumahku. Padi, beras, pakaian, dan barang-barang berharga lainnya mereka ambil. Tidak tanggung-tanggung, telur ayam di sarang yang sedang dierami juga digasak bersama ayamnya. Nasi dan bakulnya juga disikat.

Tanpa memberi waktu untuk berpamitan kepada ibuku, aku, dan adikku, sang tentara membentak ayah, “Cepat ke luar, ikut aku.” Dari kejauhan aku masih mendengar ayahku berteriak, “Jaga anak-anak baik-baik.”

Kata-kata singkat itulah pesan terakhir ayah buatku, ibuku, adikku, dan juga kakak-kakakku. Ya, itulah perpisahan. Sungguh aku menyesal, mengapa aku tidak mencium dan menggenggam erat-erat tangannya, sebelum ia digiring ke luar.

Ibuku pucat menyaksikan kejadian yang baru saja dialaminya itu. Di kemudian hari ia melukiskan betapa menakutkan peristiwa itu. “Saat itu, sekiranya daging tubuhku diiris-iris, ia tidak akan mengeluarkan darah, karena saking takutku. Miris melihat gerombolan orang yang beringas yang ingin membunuh sesamanya,” katanya.

Sejak itu aku dan adikku juga ibuku mengungsi ke tempat sanak famili untuk menyelamatkan diri. Aku harus keluar dari kota tempat kelahiranku Boyolali untuk mencari nafkah dan bertahan hidup. Aku pindah dari kota yang satu ke kota yang lain, sampai akhirnya bertahan hingga saat ini di Tangerang.

Waktu bergerak, usiaku bertambah, tapi rasa ingin tahuku akan nasib ayah tidak kunjung surut. Suatu ketika aku mendapat informasi penting. Menurut penelitian dan kesaksian orang yang mengetahui pembunuhan massal di Boyolali, terdapat beberapa lokasi kuburan massal di Jawa Tengah. Antara lain di pinggiran kali dekat kuburan Sonolayu, di hutan perbukitan daerah Ampel, di dekat kuburan umum Cepogo, di desa Pundung.

Diperkirakan jumlah korban di Boyolali lebih dari 10 ribu orang meninggal dunia, dibunuh. Boyolali terkenal sebagai daerah basis PKI dan daerah pergerakan kaum tani.

Suatu hari di penghujung tahun 1982, seorang tua penjaga kuburan di Sonolayu, menghampiri kakakku yang sedang mencari pasir di dekat pinggir kali. *“Le, ya neng kene kubure suwargi bapakmu Siswowitzono, ya ing kene iki biyen diperjoyo.”* (Nak, di sinilah tempat ayahmu bapak Siswowitzono dikuburkan, di sinilah dulu dia disiksa sampai wafat). Tidak lama setelah memberi kesaksian tempat kuburan ayahku, Embah Engkom, penjaga kubur itu, meninggal dunia.

Ya, di pinggir kali dekat kuburan umum Sonolayu itu, diperkirakan ratusan orang yang diduga anggota PKI dan simpatisannya dibunuh. Aku hanya bisa mengutuk-menyesali peristiwa hitam itu. Sayang sekali penguasa negeri ini tak pernah berusaha cukup serius untuk mengusut tuntas dalang pembantaian massal itu.

Neraka di Pulau Kemarau

Kesaksian Murtini, Gerwani, Lampung

Murtini telah meninggal dunia pada tahun 2005, dalam usia 79 tahun, dimakamkan di daerah Way Halim, Lampung, kampung di mana beliau bertempat tinggal sampai akhir hayatnya.

Menurut keterangan yang diperoleh kawan-kawan jaringan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 (YPKP 65) Cabang Lampung, Bu Murtini tidak mempunyai anak. Beliau sempat bekerja sebagai tenaga guru di sebuah sekolah swasta di Lampung. Semasa mudanya aktif sebagai anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) sebuah organisasi perempuan yang memperjuangkan emansipasi wanita,

menentang poligami, dan meningkatkan pendidikan terhadap kaum perempuan.

Konsistensi dan keteguhan dalam membela dan memperjuangkan nasib kaum perempuan menjadikan Gervani salah satu organisasi perempuan yang sangat diperhitungkan, baik di dalam mau pun luar negeri.

Beliau sempat diundang ke negeri Belanda atas undangan kawan-kawan Korban 65 yang bermukim di negeri tersebut untuk memberikan testimoni tentang kekejaman rejim Soeharto dan berbagi pengalaman bagaimana beliau bertahan di Pulau Kemarau.

Berikut ini petikan testimoniya:

Pulau ini terletak di tengah sungai Musi, tepatnya di sebelah hulu Plaju, Sungai Gerong dan Plaju. Tepat di daerah yang namanya kampung Mariana, sungai Musi terbelah menjadi dua, dan sungai mengalir mengelilingi Pulau Kemarau. Sungai bertemu kembali di ujung hilir dan langsung mengalir ke muara ke laut.

Daerah yang namanya Mariana, tempat sungai terbelah menjadi dua itu, dinamakan Simpang Mariana.

Sebelum peristiwa 1965, pulau ini ditempati PT Waskita Karya untuk menimbun besi tua. Di sana terdapat dua bedeng berukuran 7 X 20 meter, berbentuk huruf L, berdinding papan jarang, berlantai semen kasar, pintunya satu, dan tidak berplafon. Di depan bedeng ada satu rumah kecil, rupanya untuk dapur dan kamar mandi.

Setelah peristiwa 1965, bedeng yang tadinya dipakai sebagai tempat tinggal buruh itu dipakai menahan tapol (tahanan politik) yang dituduh menjadi anggota atau simpatisan PKI. Kamp itu dijaga oleh Polisi Militer (PM) dan pasukan Angkatan Darat yang

baru lulus dari pendidikan. Luas tempat yang digunakan untuk kamp kira-kira dua atau tiga hektar.

Kamp dipagari kawat berduri dua lapis, jadi di tengah bisa dipakai jalan penjaga. Tingginya empat meter. Pada dua penjurunya berdiri pos sekuriti untuk penjaga yang menyandang bedil.

Pulau Kemarau beserta Simpang Mariana menyimpan banyak cerita pedih. Inilah tempat anggota atau yang dituduh simpatisan PKI dikirim pasca kejadian Oktober 1965.

Saya dikirim ke Palembang pada 1 Februari 1966 dari Lampung, berdua dengan Bung Darwis Bachtiar, anggota Komite Daerah Besar (CDB) PKI Lampung. Tepat sebulan kemudian, 1 Maret 1966, saya dikirim ke Pulau Kemarau bersama kawan-kawan tapol lainnya.

Menurut keterangan kawan-kawan terdahulu, ini pengiriman gelombang ke tiga. Dari Detasemen Palembang, kami naik mobil menuju pelabuhan yang namanya Sungai Lais. Dari situlah kami naik kapal sungai menuju Pulau Kemarau. Jumlah kami semuanya sekitar 30 orang, wanitanya saya sendiri, dikawal Corps Polisi Militer (CPM) yang menyandang bedil (bren). Kira-kira jam tujuh malam kami sampai di kamp pulau Kemarau, langsung disuruh melakukan apel. Sesudah itu kami dimasukkan ke dalam barak masing-masing.

Saya masuk kamp wanita, bertemu dengan kawan-kawan tahanan wanita lainnya. Mereka semua berasal dari Palembang, jumlahnya kira-kira 20 orang. Pagi hari, kira-kira jam tujuh, semua pintu kamp dibuka, dan di situ baru jelas betul yang namanya Pulau Kemarau dan kawan-kawan yang ditahan. Waktu itu kawan laki-laki yang berasal dari Lampung belum datang.

Penjaga kamp ini seorang komandan CPM, pangkatnya letnan, namanya Muis, dan seorang lagi berpangkat kopral, saya lupa

namanya. Seminggu sekali mereka menjaga bergiliran. Kecuali mereka, ada tiga orang lagi CPM yang biasa memimpin kami senam pagi dan menjaga waktu para tahanan dikeluarkan dari bangunan kamp.

Agar tidak kelihatan terlalu kejam, mereka menggunakan orang lain, seorang preman sinting dan sadis, untuk menyiksa tahanan.

Di dalam kamp itu ada satu kran air, satu bak di kamar mandi, dan sebaris WC bertutup papan, tingginya kira-kira satu setengah meter. Selesai senam, kawan-kawan tentu pergi ke tempat ini. Ada yang cuci muka, mengambil air, dan sebagainya. Mereka berebut. Selain waktunya terbatas, tempat airnya pun terbatas. Di sinilah Pak Tjik, si preman sinting itu berperan. Dengan sabetan karetnya ia menghajar kami yang sedang berebut air, tanpa kenal ampun. Dia memukul, menendang, dan memperlakukan kami bagaikan binatang. Tentu saja kami merasa kesakitan.

Selesai memimpin senam, para petugas biasanya kembali ke pos jaga. Ada pula yang bertugas memasukkan para tahanan kembali ke dalam kamp. Yang mengunci pintu adalah Pak Tjik itu.

Biasanya, kawan-kawan wanita memanggil Pak Tjik, diajak bercanda, hingga ia lupa tugasnya menjaga tahanan. Walhasil, kawan-kawan tahanan laki-laki bisa leluasa menggunakan air. Tentu saja, ini tugas kawan-kawan wanita yang muda-muda.

Setelah jam sembilan, barulah kawan-kawan laki-laki dimasukkan kamp, sampai esoknya lagi, atau sampai pukul 12 siang waktu pembagian nasi. Kondisi kawan-kawan waktu itu belum begitu parah, walau menurut kawan-kawan yang datang lebih dulu, sudah banyak juga yang meninggal.

Menurut kawan-kawan yang lebih dulu sampai di sini, para tahanan diberi makan sekali sehari. Pemasaknya para tahanan juga, dan yang membagikan kami para tahanan wanita.

Makanan dibagi setelah pukul 12. Para tahanan dikeluarkan dari barak, berbaris sap tiga sambil jongkok. Piringnya plastik, cangkirnya juga plastik, kecil. Sayurnya kangkung dicacah, direbus dengan bumbu garam saja. Karena jumlah garam cuma sedikit, sayur tidak berasa apa-apa. Hambar.

Tanah di sana berpasir. Anginnya kencang sekali. Jadi, waktu mendapat jatah, kawan-kawan harus kencang memegang piring dan cangkirnya. Kalau tidak, piring dan nasi bisa terbang dan tumpah. Karena kondisi kawan-kawan itu sudah lemah, ada juga yang tumpah nasinya. Terpaksalah mereka memunguti nasi tumpah yang sudah bercampur pasir.

Sebagai pembagi nasi, sebetulnya kami bermaksud mengganti nasi yang tumpah itu. Tapi, Pak Tjik, si preman bengis itu melarangnya. Padahal, nasinya cuma sedikit, paling tiga sendok. Kami sendiri, sebagai pembagi hanya dapat kelebihan sedikit. Untung kami terbantu oleh kawan yang dipekerjakan di asrama prajurit. Sisa-sisa nasi yang tidak habis mereka kumpulkan dan boleh dibawa masuk kamp.

Nasi tiga sendok itu pun sudah sebuah kemewahan. Kemewahan yang bertahan sementara. Memasuki bulan Mei, tiga bulan setelah saya ditahan, menu diganti dengan jagung 25 butir untuk setiap orang.

Pada waktu itu sudah muncul berita dari pasukan penjaga. Mereka meneriakkan kata-kata: “Ketentuan nasib ibu-ibu ini nanti di bulan Juni.” Kami semua bertanya-tanya, akan ada apa nanti di bulan Juni? Apakah akan ada komando Presiden Sukarno?

Tepat tanggal 1 Juni 1966, ketentuan nasib kami benar-benar tiba.

Pagi itu semua sel kami dikunci, tanpa kecuali laki-laki atau wanita, kecuali kamar yang ada anak-anaknya. Memang ada satu wanita yang boleh tinggal di luar untuk melayani kepentingan anak-anak dan membawa air untuk kami, para wanita.

Barak kawan-kawan laki-laki ditutup. Tidak ada yang boleh menolong mereka. Kalau ketahuan ada yang menolong, misalnya memberi mereka air, hukumannya berat. Tahu sendiri, apa macam hukuman itu, tendangan, pukulan, *push up* sampai pingsan adalah ganjaran bagi yang ketahuan menolong para tapol.

Setelah tiga hari tiga malam dikurung, pintu barak itu dibuka. Bayangkanlah, tiga hari tiga malam tidak makan tidak minum! Segera kami minum air sepuas-puasnya. Tapi, bayangkanlah, perut kosong cuma diisi air!

Memang lama juga kami dikeluarkan dari barak. Kira-kira dua jam kami di luar, lalu dimasukkan lagi ke barak yang mirip kandang kambing itu. Setelah tiga hari tiga malam, kami dikeluarkan lagi.

Kondisi kawan-kawan sangat menurun. Dan mulailah satu demi satu kawan berguguran. Mulanya lima orang meninggal dalam semalam, kemudian 15 orang, lalu 20 orang. Kawan-kawan yang tersisa sudah seperti jerangkong, tengkorak, mayat hidup.

Kira-kira bulan April-Mei 1966, berdatangan lagi rombongan tahanan dari daerah-daerah lain seperti Lampung. Saya melihat dan mengenali sebagian dari mereka yang sekampung halaman dengan saya. Lalu, menyusul kawan-kawan dari Bengkulu, Jambi, Bangka, dan Belitung. Ada yang datang suami isteri, bahkan ada yang membawa anak.

Sedikit nasib baik kami bagi para tahanan wanita. Ada seorang wakil penjaga kamp yang memiliki sedikit rasa perikemanusiaan. Biasanya, sesudah pukul delapan malam, selesai penguburan

mayat, kami dikirim sepotong singkong rebus, kira-kira sebesar tangan anak kecil. Ada juga air untuk diminum. Anak-anak mendapat jatah singkong sehari sekali, kira-kira sebesar kepalan tangan. Menurut keterangan kawan yang dinas di pos, singkong itu didapat dari perahu-perahu yang lewat dekat tempat tahanan. Kadang kami juga diberi pisang rebus, tidak lebih dari satu biji.

Pada 1 Juni 1966 itu, tahanan di kamp Pulau Kemarau tidak diberi makanan. Apakah itu hanya berlaku di Pulau Kemarau atautah berlaku juga di tempat kamp-kamp yang lain, saya tidak tahu.

Padahal, kami di pulau Kemarau tidak ada besukan sama sekali. Kiriman makanan dari keluarga sama sekali tidak ada dan dilarang. Kalau pun ada, kiriman makanan dari keluarga tidak disampaikan ke alamat yang dituju melainkan dimakan petugas jaga. Ini berlaku sampai satu tahun, tahun 1967.

Pada hari nahas itu pula, 1 Juni 1966, barak laki-laki ditutup tiga hari tiga malam. Setelah hari ketiga, pintu dibuka, kawan-kawan masih bisa berjalan, tetapi kedua kaki mereka lemas, tidak kuat menyangga tubuh. Mulailah kawan-kawan jatuh berguguran.

Yang mengurus kawan-kawan yang meninggal adalah kawan-kawan yang masih hidup. Meski badan mereka bagaikan tengkorak dan tidak punya tenaga lagi, mereka harus mengurus mayat-mayat itu.

Caranya mayat kawan-kawan itu ditumpuk menjadi satu, dibungkus karung, disusun selang seling kepala dengan kaki, diikat kedua ujungnya dan bagian tangannya, lalu diangkat, dibawa ke tepi sungai. Mayat dibanduli besi, kemudian dinaikkan ke motor boat. Bunyi mesin motor boat itu, “Jung, jung, jung, jung.”

Mayat-mayat itu dibawa menuju tempat yang dinamakan Simpang Mariana. Di sana mereka dibuang dan jatuh ke dasar Sungai Musi.

Yang mengurus kawan-kawan yang meninggal itu kondisinya sudah lemah juga. Tapi, apa boleh buat. Petugas mengatakan: “Itu kan kawan-kawan kamu sendiri. Harus setia kawan, dong!” Walhasil, sering terjadi, malam ini mereka mengurus kawan, besok malamnya mereka sendiri yang meninggal.

Peristiwa itu terjadi kira-kira satu bulan. Selanjutnya para tahanan dipukuli kepalanya sampai mati.

Pukul delapan malam. Petugas, bersama dua orang algojo, masuk ke barak tahanan laki-laki. Diam-diam. Tapi, bagaimana pun masih terdengar suara pintu dibuka, kemudian suara kaki berjalan. Sret, sret, sret. Karena barak tidak berlampu, para algojo mencari-cari tahanan dengan menggunakan lampu senter. Para tahanan itu disoroti satu demi satu. Kalau sudah ketemu orang yang dicari, orang itu ditunjuk, dipanggil dengan jari, dan disuruh bangun. Kalau sudah tidak bisa bangun, dia diangkat dan diseret ke luar sampai ke pinggiran kali.

Menurut keterangan kawan yang kerja di pos, ada satu tempat seperti pos kecil yang digunakan sebagai tempat menyiksa dan membunuh. Memang kurang jelas cara membunuhnya. Apakah diikat dulu, baru dibunuh, saya tak tahu. Yang pasti, kepalanya dipukul dari belakang dengan menggunakan sepotong besi. Tiap malam, tak kurang dari tiga orang diambil dan dibunuh.

Di antara tahanan wanita, ada dua orang yang dibunuh dengan pukulan besi itu. Satu namanya Ibu Ani asal dari kampung Kali Doni, Palembang, dan Napsiah dari Bangka. Keduanya anggota Pemuda Rakyat.

Napsiah anak dari keluarga tidak mampu yang ingin maju. Ia bergabung dengan Pemuda Rakyat agar bisa bersekolah. Baru

berjalan beberapa bulan, terjadilah peristiwa 1965. Ia ditahan dan dikirim ke Pulau Kemarau. Menurut keterangan kawan-kawan, ia dibunuh karena pemberani. Ia biasa mendekati petugas jaga di pagar kawat berduri, minta sesuatu.

Ia pun pandai melukis. Oleh petugas ia ditanya, “Bisa tidak kau melukis kamp ini?” Napsiah menjawab dengan berani, “Bisa.” Maklum masih anak-anak, belum bisa menyimpan rahasia, bicara apa adanya tanpa memperhitungkan dampak dari jawabannya itu. Pikirnya, dengan melukis kamp, ia akan memperoleh imbalan, bisa untuk makan.

Menurut kabar yang kami dengar, rupanya petugas menganggap Napsiah berbahaya. Kalau masih hidup, jangan-jangan ia melukis pulau Kemarau dengan segala isinya, termasuk menggambarkan segala siksaan yang dirahasiakan aparat militer.

Napsiah badannya mungil, cantik, rambutnya panjang keriting seperti mayang mengurai. Waktu ia diambil, sebenarnya rangkaian pembunuhan terhadap tawanan laki-laki sudah berhenti beberapa hari. Kami pun menyangka tak ada wanita yang harus dibunuh.

Kepada kami, petugas mengatakan Napsiah hendak dipindah ke Detasemen di Palembang. Tapi, pada pukul sepuluh malam, pasukan penjaga berteriak: “Hei, jangan enak-enakan kamu orang. Kawan kamu orang itu sudah di Simpang Mariana!” Kami semua terkejut. Jadi, Ibu Ani dan Napsiah itu dibunuh. Kami semua menangis.

Setelah pembantaian yang dimulai sejak 1 Juni 1966 itu, jumlah tahanan laki-laki tinggal beberapa orang.

Lalu, didatangkan lagi tahanan yang lain dari Palembang. Tahanan baru diperlakukan secara baru. Mereka tidak diperiksa, tetapi langsung dikirim ke Pulau Kemarau. Tahanan tidak diberi makan, tapi pintu barak dibuka. Jadi, para tahanan politik bisa berkelieran di dalam kamp.

Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Ada dua tahanan, yang dianggap tidak berbahaya, yang dipekerjakan di luar barak. Mereka kerja apa saja: membantu, mencuci pakaian petugas, merumput, menyiangi rumput di sawah, mencangkul atau apa saja yang dibutuhkan para petugas. Sebagai imbalan, mereka diberi makan kenyang, ditambah tembakau.

Wanita boleh ikut, satu orang untuk membantu pekerjaan kawan-kawan laki-laki. Sebagai imbalan, dia juga dapat makan kenyang. Pukul setengah empat kami diistirahatkan selama satu setengah jam. Waktu istirahat itu kami gunakan untuk mencari makanan apa saja yang bisa dimakan: daun-daunan, keladi gatal, umbi-umbian, singkong, jeruk asam, atau apa saja untuk oleh-oleh kawan-kawan di dalam.

Sampai di dalam kamp, barang-barang itu dibagi masing-masing kelompok. Ada warung kecil di luar barak yang menjual kebutuhan sehari-hari. Ini diperuntukkan bagi para petugas jaga.

Kami pesan kepada pemilik warung, kalau ada kulit pisang, kulit singkong, kulit ubi, ampas kelapa, gagang bayam, gagang kangkung, daun singkong tua, daun pepaya tua yang dibuang, dan apa saja yang kira-kira bisa dimakan, tolong dikumpulkan untuk kami. Sore harinya, sepulang dari kerja di luar barak, saya menghampiri warung untuk mengambil sisa-sisa makanan yang saya pesan. Hasilnya, sungguh dapat untuk bertahan hidup.

Dengan cara itulah kami bisa bertahan hidup sampai akhir 1967. Meski, keladi gatal itu, biar sudah dimasak sampai lama sekali pun, tetap saja gatal. Rasanya memang manis, tapi selesai makan, mulut kita gatal sekali. Obatnya ialah garam atau jeruk asam.

Pernah ada bangkai kambing terdampar di pinggir pantai dekat tempat kami bekerja. Tidak kami sia-siakan. Daging bangkai itu saya masak, saya rebus dengan garam. Bagaimana rasanya? Ya, begitu itulah. Terpaksa, perut yang kosong minta diisi. Beruntunglah kalau kawan dapat ular, belut atau pun keong.

Kira-kira pertengahan tahun 1967 mulai ada kawan yang dibon. Artinya, diambil untuk dipinjam layaknya sebuah barang. Sering kali orang yang dibon itu tidak pulang lagi, karena dibunuh atau pun mati disiksa. Menurut berita, ada beberapa kawan yang dibebaskan terutama bagi tahanan yang diklasifikasikan Golongan C (Golongan simpatisan yang tidak tahu apa-apa dalam peristiwa 1965).

Sampai akhir tahun 1967, tahanan politik laki-laki di Pulau Kemarau tinggal tiga orang. Tahanan wanitanya juga tinggal tiga orang. Kami senang sekali, karena dengan jumlah yang sedikit itu kami dapat lebih mudah bertahan hidup. Selain saya, yang masih tinggal di kamp Pulau Kemarau ialah Mbak Kholifah dari Palembang dan Maryamah dari Muara Enim. Di sini, Mbak Kholifah hidup dengan anak lelakinya yang masih berumur 2 tahun.

Suatu hari, akhir 1967, kami para tahanan wanita dibon ke Detasemen di Palembang. Ketika itulah saya melihat ada tigabelas kawan laki-laki dari Lampung akan dikirim lagi ke Pulau Kemarau. Di antara kawan-kawan itu, yang saya kenal ialah Bung Pane, Bung Ashari S, dan Bung Darwis Bachtiar. Yang lainnya, saya tidak kenal.

Dari Detasemen, sebagian dari kami golongan C dibebaskan, sisanya dikenai tahanan rumah. Ada yang dijemput keluarganya. Yang tidak punya keluarga –termasuk saya—diambil sebagai pembantu rumah tangga oleh bapak-bapak CPM. Saya menjadi pembantu rumah tangga di rumah bapak CPM yang namanya Mardin, orang Lahat, tinggal di kampung Tanggo Buntung, pangkatnya pembantu letnan satu (Peltu). Saya bekerja di rumahnya selama dua tahun.

Tahun 1970, semua yang dikenai tahanan rumah diambil dan ditahan kembali, tetapi tidak lagi dikirim ke Pulau Kemarau,

hanya ke Detasemen Palembang. Mereka ditahan di sana sampai adanya pembebasan massal pada tahun 1979. Pada saat itulah saya tahu, bahwa tiga belas orang dari Lampung, termasuk kawan-kawan dari CDB yang dikirim ke pulau Kemarau pada akhir 1967, semuanya meninggal dunia.

Itulah kisah neraka di Pulau Kemarau yang kami beri nama Pulau Maut, tempat kami tinggal dari tahun 1966 sampai 1967. Soeharto dengan Orde Baru-nya pernah mengatakan “tumpas habis PKI sampai ke akar-akarnya.” Dan, barangkali itulah yang sesungguhnya terjadi di pulau itu.

EPILOG

Oleh :
Maria Hartiningsih

Narrowly constructed, the present is never and always. It is here and gone with the thick of clock, then here again.

(Michael T. Isenberg, *Puzzles to the Past: An Introduction to Thinking About History*, 1985)

Waktu dalam ingatan korban dan keluarganya tidak dipenjara oleh ukuran-ukuran detik, menit, jam, hari, bulan dan tahun. Dalam ingatan, secara subyektif ukuran waktu sangat kaya dan beragam karena terkait dengan rasa, dan rasa yang senantiasa melejit meninggalkan ruang dan waktu.

Di dalam ingatan, peristiwa yang meninggalkan luka batin berapa puluh tahun pun berlalu, tersimpan bukan di ruang masa lalu, tetapi di suatu ruang antara, yang senantiasa mendorong masa sekarang dan masa depan ke masa lalu, membuat waktu yang menurut hitungan obyektif konvensional berputar ke depan, kehilangan daya untuk memudarkannya.

Dengan situasi seperti itu, selalu timbul pertanyaan dalam diri saya setiap kali menemui korban dan keluarga korban kekerasan politik yang kasus-kasusnya tak pernah diselesaikan dengan memenuhi rasa keadilan mereka: Masa depan seperti apa yang bisa dibangun oleh suatu bangsa, ketika ingatan kolektif akan penderitaan dan bayangan kekejian terus berdiam di situ mengisi ruang dan waktu, sehingga masa sekarang tak pernah benar-benar mengada?

Seorang jenderal terkemuka dalam Perang Dunia II, Winston Churchill dari Inggris dengan gagah menyatakan, suatu bangsa yang terus mempertentangkan masa lalu dengan masa kini tak akan meraih masa depan.

Kata-kata itu menjadi mantra bagi mereka yang memegang senjata dan menggunakan kekuasaan dengan senjata itu untuk membungkam dan menyingkirkan siapa pun yang didefinisikan sebagai “penjahar”, “pemberontak”, “gerombolan separatis” atau apa pun, sehingga memberi pengesahan untuk dibungkam, bahkan dienyahkan.

Secara sepintas, korban dan keluarga korban tak ada bedanya dengan warga masyarakat lainnya. Mereka bukan orang-orang yang selalu mengerenyitkan dahi dan memasang wajah muram, marah atau sangat serius berdiskusi. Mereka juga bisa tertawa dan tampak riang. Akan tetapi, ada sejarah kelam yang harus terus dibawa sepanjang hidup karena salah satu anggota keluarganya dipandang sebagai “liyan” atau “the other” melalui definisi-definisi yang dibuat secara sepihak oleh penguasa.

Karena pandangan itu lah maka pelanggaran yang terjadi tak pernah diselesaikan. Stigmanya ditimpakan. Kebenaran, menurut versi korban, belum mendapat tempat dan keadilan masih jauh dari jangkauan.

Berbagai peristiwa yang ditulis oleh korban atau keluarga keluarga di buku ini memiliki spektrum waktu yang panjang, mulai dari peristiwa tahun 1965 sampai kasus pembunuhan Munir empat tahun lalu. Ketika saya menulis catatan ini, perjuangan untuk mengungkap kasus Munir baru saja dicoba dipatahkan dengan pembebasan Muchdi. Peristiwa itu menutup 10 tahun perjuangan para aktivis hak asasi manusia, sekaligus menjawab euphoria “reformasi” tahun 1998.

PERJUANGAN merebut ruang ingatan untuk mengungkap pelanggaran politik di masa lalu, sangat boleh jadi, adalah

perjuangan yang tanpa ujung. Bahkan di negara-negara yang dinilai “berhasil” melalui masa transisi demokrasi karena mau dan mampu menyelesaikan pelanggaran masa lalu, warganya masih harus terus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran yang tak diungkap melalui mekanisme formal yang ada.

Beberapa perempuan sepuh dari Plaza de Mayo, Argentina yang saya temui dalam Forum Sosial Dunia di Porto Alegre, Brazil, Januari tahun 2003 mengungkapkan bahwa mereka terus berjuang untuk mengetahui di mana kerangka anak, suami dan anggota keluarga mereka yang dibunuh oleh junta militer di Argentina pada tahun 1980-an.

Ketika menemani korban pada acara aksi Kamis 16 Agustus 2007, tepat pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-62, seorang korban berkata pada saya, “Yang kita lakukan ini adalah kerja panjang yang mungkin baru berdampak pada generasi berikutnya. Tugas kita adalah menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa penguasa cenderung menutup mata, telinga dan hatinya terhadap pelanggaran berat hak-hak asasi manusia; dan bahwa bangsa ini telah mengingkari sejarahnya sendiri.”

Namun tampaknya dekade kedua ‘reformasi’ tampaknya akan ditandai dengan arus balik, dengan kembalinya para tokoh yang secara kesejarahan ditengarai memiliki hubungan dekat dengan rezim otoritarianisme Orde Baru, dan para petualang politik yang menggunakan mekanisme demokrasi untuk kepentingan politik kelompok atau golongannya.

Pada saat yang sama, gelombang arus utama mendefinisikan “masa depan bangsa”, senantiasa dikaitkan dengan isu ekonomi dan kompetisi global. Persoalannya, kita terus menerus diguncang isu ekonomi, mulai dari naiknya pasar minyak dunia sampai krisis keuangan global yang menghantam sendi-sendi ekonomi yang

selama ini ternyata tidak dibangun oleh kekuatan riel, dan berpotensi menutup lapangan kerja dari jutaan orang. Harga minyak yang turun drastis sejak kuartter terakhir tahun 2008 samasekali tidak berpengaruh pada harga pangan dan jasa, dan pada saat bersamaan daya beli menurun mendekati titik nol.

Semua yang terkait soal kebijakan ekonomi yang semakin tergantung pada sistem ekonomi global dengan peran Negara di dalamnya itu tak hanya melumpuhkan, tetapi juga memunculkan kerinduan banyak orang pada kedamaian hidup dan kemakmuran (semu) di masa lalu.

Dengan demikian, ruang untuk memperjuangkan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu tak hanya menghadapi berbagai isu terkait dengan ekonomi yang menjadi fokus perhatian para pemimpin saat ini, tetapi terutama juga dengan ingatan kolektif sebagian warga akan kemudahan hidup di masa lalu itu. Hal itu tak sulit terjadi karena ideologi rezim Orde Baru telah berkerak di dalam darah sebagian warga.

Inilah fakta yang semakin membuat banyak orang percaya dengan pernyataan Churchill dibandingkan keyakinan para pembela hak asasi manusia, bahwa, masa depan suatu bangsa yang cerah hanya bisa dibangun dengan fondasi keadilan dan penghargaan pada hak asasi manusia, kalau ada penyelesaian bagi pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu; dan bahwa harus ada kata “Cukup!” untuk kekejian terhadap kemanusiaan, agar kekejian serupa tak akan pernah dilakukan lagi.

ADA mekanisme politik yang bisa dilakukan untuk memaksa Negara menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu itu. Namun, Undang-undang No 27 tahun 2004 mengenai Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi yang memberi celah, telah dibatalkan pada bulan Desember tahun 2006, karena alasan teknis dan politis.

Para politisi selalu berlindung di balik pernyataan bahwa memaafkan dan rekonsiliasi bisa dilakukan tanpa pengungkapan kebenaran. Tampaknya mereka tak paham, atau tak mau paham, bahwa pengungkapan kebenaran, penegakan keadilan, pemutusan rantai impunitas, memaafkan dan rekonsiliasi, adalah satu paket.

Meski demikian, upaya memelihara ruang ingatan agar pengungkapan kebenaran tetap bisa dilakukan, terus berlangsung dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menuliskan pengalaman di dalam buku yang sedang kita baca bersama ini. Upaya ini sangat penting karena pengalaman masa lalu mengajarkan kepada kita bagaimana sejarah versi tunggal penguasa dilembagakan melalui buku-buku sejarah anak-anak.

Upaya menuliskan kembali pengalaman sebagai korban dan keluarga korban itu merupakan langkah strategis dari kampanye melawan lupa, *contre l'oublie*, atau malah bisa dikatakan sebagai 'kitab melawan lupa' – meminjam istilah dari sastrawan Ceko, Milan Kundera.

Catatan-catatan korban dan keluarga korban dalam buku ini, bukanlah sesuatu yang sederhana kalau ditinjau secara lebih komprehensif. Begitu seseorang menuliskan pengalaman dan perasaannya, ia harus mengingat kembali apa yang pernah terjadi terhadap dirinya dan anggota keluarganya. Tentu saja tulisan ini bersifat sangat subyektif dan selalu ada kecenderungan memilih dan memilah bagian mana dari pengalaman yang harus diungkapkan.

Ingatan manusia pun terbatas untuk menampung hal-hal yang dikehendaki untuk ditampung. Pada banyak korban dan keluarga korban yang sampai hari ini tak ingin diketahui identitasnya, ingatan akan penderitaan terus diupayakan dengan sangat keras untuk ditekan jauh ke dalam, dan dijaga agar tidak muncul lagi ke permukaan. Benar kata sosiolog Anthony Storr, bahwa pada dasarnya orang cenderung melupakan hal-hal yang tak menyenangkan dalam hidupnya.

Pengalaman yang ditulis korban dan keluarga korban ini sebenarnya merupakan basis identitas. Hubungan antara ingatan dengan identitas merupakan proses dialektika karena baik ingatan mau pun identitas membentuk materi yang hendak dikomunikasikan dalam proses sosialisasi, sekaligus dibentuk oleh proses tersebut.

Ironisnya, situasi kontekstual di mana identitas dibangun dan dampaknya dalam seluruh kehidupan individu dan kelompok, kerap kali dilupakan. Banyak diskusi mengenai identitas mengesampingkan konteks politik yang melingkupi kehidupan individu atau kelompok yang sedang berupaya membangun identitasnya.

Seluruh struktur sosial tertanam dalam struktur sosial-politik, dan identitas merupakan manifestasi politik karena direfleksikan dan dipengaruhi keadaan sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan individu mau pun kelompok.

Jadi, identitas dipengaruhi oleh situasi sosial-politik kalau dikaitkan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, siapa pun yang dianggap “liyan” atau “the other” senantiasa berada pada posisi subordinat.

Penolakan akses atau kesempatan sosial, ekonomi dan politik, senantiasa terkait dengan karakteristik yang ditentukan untuk

dinilai ‘negatif’ atau ‘positif’. Nilai itu dapat ditempelkan pada warna kulit, agama, gender, etnis, ras, juga aliran atau pandangan politik yang berbeda dari pandangan arus utama, sehingga dianggap ‘liyan’ atau ‘the other’ oleh Negara, dan secara hegemonik disosialisasikan kepada masyarakat.

Penghakiman subyektif ini dapat bertransformasi ke dalam kategori “obyektif” kalau digunakan untuk menutup akses bagi “liyan”. Pendek kata, apa yang tampaknya merupakan kriteria “obyektif” sebenarnya lebih merupakan evaluasi subyektif yang bersifat sangat politis yang dikembangkan di dalam masyarakat.

Dengan demikian, tak sulit untuk memahami mengapa keluarga korban kekerasan politik, yang paling jelas pada korban tragedi tahun 1965, sulit mendapatkan akses untuk mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti pendidikan, lapangan kerja, pelayanan kesehatan, hak bersuara, hak mengemukakan pendapat dan lain-lain untuk waktu yang sangat panjang. Mereka kehilangan hak-hak dasarnya sebagai warganegara, padahal mereka adalah warganegara.

SUNGGUH tak mudah memelihara ingatan akan penderitaan yang tertinggal dalam diri seseorang. Itulah memoria passionis, yang menurut teolog Jerman, Johannes B. Metz, bersifat dinamik dan memiliki kekuatan dahsyat, sehingga dapat digunakan secara positif mau pun negatif.

Saya teringat pada apa yang dikatakan Nani Nurrachman-Sutoyo, psikolog, bahwa, memoria passionis lebih tepat digunakan sebagai pergumulan nalar, moral dan spiritual, bukan sebagai membenaran rasa iba bagi penderitaan. Semua itu dimaksudkan untuk memutus kebencian, prasangka dan dendam.

Nani, putri Mayjen Anumerta Sutoyo Siswomihardjo yang melakukan rekonsiliasi dengan para korban peristiwa tahun 1965 yang selama ini secara politis ditempatkan sebagai "lawan" dari dirinya, menegaskan, dalam soal ingatan, individu berhadapan dengan diri sendiri. Tak ada yang harus ditakuti, kecuali ketakutan itu sendiri. Kekejian yang pernah terjadi tak boleh disangkal karena karena penyangkalan untuk menghapus peristiwa kekejaman dari sejarah justru membuat orang tak bisa melupakannya.

Ingatan akan peristiwa itu akan terus berada di bawah sadar ingatan kolektif, yang kalau tidak dikelola akan menjadi bibit-bibit kekerasan baru karena di sana ada kekecewaan, dendam dan rasa mau membalas. Itulah yang dikatakan Nani sebagai sifat negatif memori yang dinamik.

Proses rekonsiliasi politik di ruang publik, tak bisa tidak, tampaknya harus berawal dari proses rekonsiliasi dengan diri sendiri. Buku ini, menurut saya, sangat berarti bagi proses itu. Saya menaruh perhatian besar pada proses individual karena menemukan banyak korban dan keluarga korban yang tak pernah selesai dengan proses itu, sehingga perjuangan untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan yang merupakan kegiatan di ruang publik terasa sangat berat dan tertatih-tatih karena energi individu dan kolektif terkuras untuk menghadapi situasi di dalam diri.

Membuat testimoni dengan menuliskan pengalaman yang terpahit, adalah proses rumit dan berat untuk membongkar ingatan akan penderitaan, dan menjadikannya sebagai terapi untuk menyembuhkan, dan kemudian untuk memaafkan, pertama-tama pada diri sendiri.

Upaya merebut sifat positif dari memori yang dinamik itu lebih merupakan proses yang bersifat filosofis dan spiritual: suatu perjalanan yang sangat panjang untuk menemui diri sendiri.

Daftar bacaan

1. Lewis A. Coser (ed), *Maurice Halbwachs On Collective Memory*, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1992
2. Barry D. Adam, *The Survival of Domination: Inferiorization and Everyday Life*, New York: Elsevier, 1978
3. Anthony Storr, *Human Destructiveness*, New York: Ballantine, 1991
4. Herbert Hirsch, *Genocide and the Politics of Memory: Studying Death to Preserve Life*, North Carolina: University of North Carolina Press, 1995
5. Hannah Arendt, *Between Past and Future: Six Exercises in Political Thought*, London: faber and Faber, 1961
6. Michael T. Isenberg, *Puzzles to the Past: An Introduction to Thinking About History*, College Station: Texas A & M University Press, 1985
7. Daniel Dhakidae, Truth and Reconciliation Commission, pointers untuk pertemuan “Pengungkapan Kebenaran: Jalan untuk Kerekonstruksi ke-Indonesiaan”, untuk memperingati 15 tahun Elsam di Jakarta, 27 Mei 2008.

PARA PENULIS

1. **Usman Hamid** adalah pendamping korban yang sekarang menjadi koordinator KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), pernah menjadi sekretaris Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan II pada th 2001, menjadi Sekretaris Tim Pencari Fakta Munir tahun 2004-2005.
2. **Suciwati** adalah korban pembunuhan konspirasi terhadap suaminya **Munir** yang dibunuh dengan racun di atas pesawat GA 974. Sampai sekarang yang dihukum cuma pelaku lapangan, dalangnya masih bebas. Selain masih terus mengadvokasi kasusnya dia aktif di Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir dan di Yayasan Tifa.
3. **Yunita Rohani** adalah buruh migran yang bekerja di Malaysia selama 3 tahun, korban eksploitasi dan trafficking yang masih banyak sampai hari ini kita jumpai di negeri kita. Sekarang aktif di Serikat Buruh Migran Indonesia.
4. **Suparmi** adalah korban penggusuran di Tanjung Duren, tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1996. Digusur tahun 2003 tanpa alasan jelas sampai sekarang tidak mempunyai tempat tinggal dan terus menyuarkan ketidakadilan yang menimpa keluarga dan warga setempat. Sehari-hari dia berdagang.
5. **Netty Kalengkongan** adalah korban konflik Poso 2001, dimana suami dan adiknya meninggal akibat kekerasan antar agama. Konflik ini mengakibatkan dia mengungsi dan trauma berkepanjangan. Sekarang aktif di SKPHAM (Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia) Sulawesi Tengah.

6. **Nurlela** adalah ibu guru yang idealis dari SMPN 56, mempertahankan sekolah yang digusur karena kebijakan pemuda yang sewenang-wenang. Dia dipecat dan sampai sekarang nasibnya tidak jelas. Sehari-hari dia jadi ibu rumah tangga dan sampai sekarang masih mengadvokasi kasusnya.
7. **Ho Kim Ngo** adalah ibu korban **Yun Hap** yang meninggal akibat penembakan dalam tragedi pada 24 September 1999 atau yang sangat dikenal dengan peristiwa Semanggi II. Seperti korban pelanggaran HAM lainnya sampai sekarang kasusnya tidak tersentuh hukum sama sekali. Sehari-hari dia sebagai ibu rumah tangga.
8. **Arief Priyadi** adalah ayah korban tragedi Semanggi I pada November 1998 anaknya **B.R Norma Irmawan (Wawan)**, mahasiswa Unika Atma Jaya yang menjadi relawan kemanusiaan ditembak di kampusnya sampai meninggal. Sudah 10 tahun lebih kasusnya diadvokasi tapi keadilan yang dirindukan tidak jua hadir. Sehari-hari menjadi pegawai swasta, istrinya Sumarsih setelah pensiun dari Setjen DPRRI kini aktif di JSKK sebagai salah satu presidium.
9. **Muhammad Sani alias Mamang** adalah korban yang dua orang anaknya meninggal dalam kasus Tragedi Mei 1998. Sudah 10 th lebih terus meminta pertanggung jawaban atas kematian anaknya dan mengadvokasi bersama KontraS. Sehari-hari berdagang.
10. **Mugiyanto** korban penculikan 1998 yang dibebaskan berkat advokasi yang dilakukan KontraS. Bersama korban penculikan dan pelanggaran HAM dia mengadvokasi, sudah 10 tahun lebih keadilan yang diminta belum juga hadir. Sehari-hari menjadi ketua IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang) dan menjadi presiden AFAD organisasi orang hilang se-Asia menggantikan almarhum Munir.
11. **Christina Widiantarti** adalah pendamping untuk korban kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat bawah.

Aktif di Institut Sosial Jakarta (ISJ) dan FAKTA (Forum Warga Kota Jakarta). Mewawancari pak **Slamet** tukang becak yang selama ini kasusnya didampingi oleh organisasinya.

12. **Purwoko** korban kasus Talangsari pada tahun 1989 yang tidak saja kehilangan ayahnya dia juga dipenjarakan. Sampai sekarang terus bersuara minta keadilan atas kasus pembunuhan massal yang belum terjamah hukum dan keadilan. Sehari-hari dia menjadi buruh.
13. **Muhammad Daud Berueh** adalah korban Tanjung Priok tahun 1984, ayahnya dituduh ekstrim kanan yang kemudian dipenjara tanpa proses hukum yang jelas. Korban banyak berjatuhan tapi sampai saat ini tidak ada yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Selain menyelesaikan skripsi sarjana hukumnya dia aktif di KontraS.
14. **Lita BM** adalah korban yang bapaknya hampir kena Petrus (Pembunuhan Misterius) yang marak ditahun 1983-1984, setelah bertahun-tahun kemudian dapat bertemu kembali dengan bapaknya. Sampai sekarang kasusnya belum tersentuh hukum. Sehari-hari menjadi penyanyi, setahun yang lalu launching album lagu 'Lahir kembali'.
15. **Bedjo Untung** adalah korban 1965 yang aktif di YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966) bersama korban peristiwa 1965 yang lainnya. Menuliskan hasil wawancara Endang Kustantinah dan Murtini korban langsung. Sehari-hari sebagai guru musik tetap mengadvokasi kasusnya sampai hari ini..
16. **Maria Hartiningsih** adalah wartawan senior Kompas, yang konsisten menyuarakan Hak Asasi Manusia dalam tulisannya dan dekat dengan korban pelanggaran HAM. Meraih Yap Thiam Hien Award tahun 2001.

PROFIL JSKK

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan disingkat JSKK, adalah sebuah paguyuban yang berdiri sejak 9 Agustus 2005. Mereka yang tergabung dalam paguyuban ini adalah para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terampas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budayanya, baik yang kasusnya telah disentuh oleh proses peradilan maupun yang masih harus diperjuangkan menuju penyelesaian secara hukum. Dalam perkembangannya, turut bergabung pula anggota masyarakat lainnya baik yang aktif dalam institusi-institusi yang bergerak di bidang HAM maupun perorangan yang *concern*, menaruh perhatian, terhadap penegakan HAM di Indonesia.

JSKK bermula dari kegiatan *sharing*, sarasehan, dan diskusi seputar tuntutan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, pemahaman masyarakat terhadap makna HAM dan penerapannya. Selain itu JSKK juga melakukan berbagai audiensi serta aksi damai turun ke jalan. Berbagai kegiatan itu mengkristal pada sebuah sikap yakni terus berjuang mengungkap kebenaran, mencari keadilan, dan melawan lupa. Salah satu implementasi sikap perjuangannya adalah aksi damai, diam, berdiri selama satu jam dari Pukul 16.00-17.00 di depan Istana Presiden, setiap hari Kamis, dengan pakaian dan payung hitam. Kegiatan ini kemudian dikenal dengan 'Aksi Kamisan' yang berlangsung sejak 18 Januari 2007. Ketika profil singkat JSKK ini ditulis, Aksi Kamisan telah berlangsung 100 kali.

Sebagai sebuah paguyuban yang bernafaskan demokrasi, dan menjunjung tinggi prinsip egaliter, JSKK memosisikan berbagai kasus pelanggaran HAM dalam proporsi yang relatif sama. Sejalan dengan hal itu, JSKK dikoordinasikan oleh sebuah presidium, yang berdasarkan kesepakatan para anggota pada awal

berdirinya paguyuban, telah ditunjuk beberapa orang menjadi Koordinator JSKK yakni Suciwati, Sumarsih, dan Bedjo Untung.

JSKK

(Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan)

Jl. Bonang No. 1A, Menteng, Jakarta Pusat 12870

Telepon (021) 31931181, Fax (021) 3913473

E-mail: jstk.indonesia@gmail.com